

RELASI PASLON DENGAN PONDOK PESANTREN
(Study Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilukada 2020)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik (IP)



Oleh:

Luthfi Ichsanuddin

1706016022

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengikuti aspek akademis sebagai syarat kelulusan maka kami ingin mengajukan proposal skripsi dari mahasiswa:

Nama : Luthfi Ichsanuddin
NIM : 1706016022
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : **RELASI PASLON DENGAN PONDOK PESANTREN
(Study Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilukada 2020)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

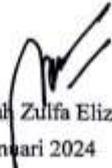
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Januari 2024

Pembimbing

Bidang Substansi Penulisan

Bidang Substansi Materi


Prof. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
Tanggal : 22 Januari 2024


Solkhah Mufrikhah, M. Si
Tanggal : 22 Januari 2024

SKRIPSI

RELASI PASLON DENGAN PONDOK PESANTREN

(Studi Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilu 2020)

Disusun oleh

Luthfi Ichsanuddin

1706016022

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 28 Mei 2024 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Solkhah Mufrikhah, M. Si

Penguji I

Sekretaris

Nafisah, M.A

Masrohatun, M.Si

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.

Solkhah Mufrikhah, M. Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Luthfi Ichsanuddin menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*Relasi Paslon Dengan Pondok Pesantren (Studi Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilu 2020)*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sumber-sumber lain yang menjadi referensi dan rujukan di dalam penulisan skripsi ini saya sertakan untuk menjadi koreksi kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini maka saya siap bertanggung jawab dan siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan Terima Kasih.

Semarang, 22 Januari 2024

Yang Menyatakan



Luthfi Ichsanuddin

NIM 1706016022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirohim

Segala puji bagi Allah

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*RELASI PASLON DENGAN PONDOK PESANTREN (Study Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilu 2020)*”. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi lentera kegelapan bagi umat manusia, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya Skripsi ini, penulis masih menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya support, bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Yahya, M. Ag.
3. Prof. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku ketua skripsi camp sekaligus juga merupakan Dosen pembimbing skripsi I penulis, atas segala ilmu yang diberikan saat bimbingan, arahan, saran dan motivasi serta kesabaran memberikan waktunya dalam penulisan skripsi ini.
4. Drs. Nur Syamsudin, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
5. Solkhah Mufrikhah, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Muhammad Mahsun, M.A selaku wali dosen akademik yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
7. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.

8. Kepada segenap dosen dan staff Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang yang memberikan ilmu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tanpa ada halangan apapun.
9. Teristimewa kedua orang tua saya Ibu dan Bapak penulis, Ibu Nuridah dan Alm. Bapak Mathori dan kakak dan adik penulis, Muhammad Eko Handoyo dan Ayu Nurussobah yang selalu memberikan dukungan, do'a, motivasi, moral dan material yang tak terhingga, serta keluarga besar KH. Amiruddin Brangsong yang telah membantu dalam penulisan skripsi baik secara langsung dan tidak langsung. Semoga mereka diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah.
10. Ky. Basirudin selaku Guru ngaji dan pelaksana Majelis Dzikirul Ghofilin Kendal yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya.
11. Ketua umum PPP dan jajarannya terutama Bapak Dr. KH. Mukh Mustamskin S.Ag., M.S.I yang telah memberikan banyak informasi dalam pengambilan data lapangan untuk skripsi.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an As-Shiddiqie dan jajarannya, terutama KH. Irfan Shaddiq dan Gus Asep yang telah memberikan banyak informasi dalam pengambilan data lapangan untuk skripsi ini.
13. Rekan-rekan dekat penulis M. Akhmad Najih Alfayn, Masyikhatul Alimah, Syifa Fauziah, Akbar Nur Razzaq, H.M. Mathori Ridwan, Handita Timur Adlima, Abdullah Azzam, R.M Derry Mukarom, Nur Fauziah, Diana Fitri Hapsari, Alhafidz Munandar, Dila Vita, Nurul Aini, Diah Ayu Pitaloka, Syarief al Badawy, Mirza, Putra Pamungkas, dan Aji Ali Saputra yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a yang tak terhingga.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2017, terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
15. Ibu Mahmudah dan keluarga yang telah membantu untuk kelancaran skripsi ini, baik membantu dalam penulisan skripsi, memberikan kritik dan saran, serta memberikan sarana pra-sarana dan menyediakan tempat menulis skripsi.
16. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis haturkan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan

balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Penulis menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyusunan skripsi masih terdapat kesalahan, sedapat mungkin penulis mencoba memberikan yang terbaik pada skripsi ini. Sebagai akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca. Sekian.

Semarang 18 April 2024

Penulis



Luthfi Ichsanuddin

NIM 1706016022

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam

Dengan ini saya mempersembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya Ibu Nuridah dan Alm. Bapak Mathori yang telah mendo'akan dan selalu memberikan dukungan dalam kehidupan saya.

Untuk kedua dosen pembimbing saya, Ibu Misbah Zulfa Elizabeth dan Ibu Solkhah Mufrihah yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingan supaya saya dapat menjadi orang hebat seperti beliau berdua.

Dan untuk Almamater UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya mengukir sejarah dan sebagai batu lompatan kesuksesan saya di masa depan.

MOTTO

“Ini akan berlalu.”

(Fahrudin Faiz dalam Seorang Sufi menasehati Raja)

Mumpung masih muda, carilah ilmu sepuas-puasnya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis peran serta RELASI PASLON DENGAN PONDOK PESANTREN (Study Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilu 2020). Studi ini mengeksplorasi bagaimana partai politik yang berbasis di pondok pesantren memengaruhi dinamika politik lokal serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat dukungan terhadap calon dari partai politik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik berbasis pondok pesantren memiliki pengaruh yang signifikan dalam Pemilu 2020 di Kabupaten Kendal. Mereka memainkan peran penting dalam mobilisasi massa dan penentuan arah politik di tingkat lokal. Dukungan yang kuat dari pondok pesantren juga memberikan keuntungan politik bagi calon yang didukungnya, meskipun tidak selalu menjamin kemenangan secara mutlak. Selain itu, faktor-faktor seperti relasi sosial, ideologi politik, dan strategi kampanye juga memengaruhi tingkat dukungan terhadap calon dari partai politik berbasis pondok pesantren. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang peran partai politik berbasis pondok pesantren dalam konteks politik lokal, serta implikasi mereka terhadap dinamika politik dan demokrasi di tingkat daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat partisipasi politik yang inklusif dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal dan daerah sejenisnya.

Kata Kunci: Partai Politik, Pondok Pesantren, Pemilu, Kabupaten Kendal, Politik Lokal, Mobilisasi Massa

ABSTRACT

This research aims to explore and analyse the role and RELATIONSHIP OF PASLON WITH PONDOK PESANTREN (Case Study of Tino Mustamsikin in the 2020 Regional Election). This study explores how political parties based in Islamic boarding schools influence local political dynamics and the factors that influence the level of support for candidates from these political parties. The research method used is a case study with a qualitative approach, through data collection through in-depth interviews, observation, and document analysis. The results showed that pesantren-based political parties had a significant influence in the 2020 Local Election in Kendal Regency. They play an important role in mass mobilisation and political direction at the local level. Strong support from Islamic boarding schools also provides political advantages for the candidates they support, although it does not always guarantee absolute victory. In addition, factors such as social relations, political ideology, and campaign strategies also influence the level of support for candidates from political parties based on Islamic boarding schools. This research contributes to the understanding of the role of pesantren-based political parties in the context of local politics, as well as their implications for political dynamics and democracy at the regional level. The findings of this research are expected to serve as a basis for the development of more effective policies in strengthening inclusive political participation and promoting sustainable development in Kendal Regency and similar regions.

Keywords: Political Party, Islamic Boarding School, Local Election, Kendal Regency, Local Politics, Mass Mobilisation

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	8
1. Definisi Konseptual	8
2. Teori Identitas Francis Fukuyama	11
F. Metodologi Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber dan Jenis Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PARTAI POLITIK, PONDOK PESANTREN DALAM PEMILUKADA DAN TEORI POLITIK IDENTITAS FRANCIS FUKUYAMA.....	19
A. Definisi Konseptual.....	19
1. Partai Politik	19
2. Pondok Pesantren	24
3. Pemilu	25
4. Politik dalam Perspektif Islam.....	27
B. Teori Politik Identitas Fukuyama	29
1. Asumsi Dasar.....	30
2. Istilah-istilah kunci dalam teori politik Identitas Fukuyama	31
BAB III PARTAI POLITIK DAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL .	33

A. GAMBARAN UMUM KAB. KENDAL.....	33
1. Kondisi Geografis.....	33
2. Kondisi Topografi.....	35
3. Kondisi Demografis.....	37
4. Profil Kabupaten Kendal	48
B. Pondok Pesantren dan Partai Politik	51
1. Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal	51
2. Partai Politik di Kabupaten Kendal	53
BAB IV KUNJUNGAN BALON KE PESANTREN DAN ALASANNYA	58
A. Aktivitas Kunjungan Bakal Calon ke Pesantren	58
1. Kunjungan dalam agenda rapat tertentu	58
2. Harapan atas kunjungan.....	68
3. Hubungan Bakal calon dengan pesantren.....	72
BAB V DAMPAK DUKUNGAN BALON KE PESANTREN	82
A. Dampak Psikologis bagi balon.....	83
B. Dampak Publik bagi balon	93
BAB VI PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
Daftar Pustaka	111
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Relasi antara partai politik dan pondok pesantren merupakan relasi yang telah ada sejak awal negara Indonesia berdiri (Azahra, 2019). Partai-partai Islam yang terlibat dalam pemilihan umum merupakan partai politik yang digerakkan oleh para kyai yang merupakan pimpinan pondok pesantren (Marbun, 2007). Dalam data-data sejarah dapat ditemukan beberapa pesantren yang menjadi basis dalam gertakan partai politik. Dapat diambil contoh misalnya pesantren di Jawa Timur pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, namun juga berperan penting dalam dinamika politik lokal maupun nasional (Azahra, 2019).

Pesantren Tebuireng di Jombang, misalnya, yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), adalah salah satu pesantren yang memiliki pengaruh signifikan dalam arena politik. NU sendiri, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, kemudian melahirkan banyak tokoh politik yang memegang peranan penting di berbagai level pemerintahan. Di sisi lain, pesantren seperti Al-Munawwir di Yogyakarta, yang lebih memilih untuk menjauhkan diri dari kegiatan politik praktis, tetap memiliki peranan penting dalam menyuarakan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan dan dakwah. (Musliudin, 2013).

Integrasi antara pesantren dan politik ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, agama dan politik seringkali saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pesantren, dengan tradisi dan jaringannya yang kuat, seringkali menjadi tempat bagi pemimpin-pemimpin politik untuk mendapatkan dukungan, sementara para kyai (pemimpin pesantren) seringkali mempengaruhi kebijakan dan arah politik dengan pandangan dan pemikiran mereka (Gunawan, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara partai politik dengan pondok pesantren merupakan keterkaitan yang telah lama terjalin dalam dunia politik di Indonesia.

Jika membicarakan pondok pesantren pada umumnya konsep yang muncul berkaitan dengan pondok pesantren sebagai sebuah Lembaga akademik, sebagai tempat

para santri mengaji ilmu-ilmu agama (Dhofier, 2019). Dalam konteks entitas seperti ini pondok pesantren dikaitkan dengan karakteristik spesifik, yaitu dengan adanya kyai, masjid, pondok pesantren, santri, dan kitab kuning (Dhofier, 2019). Dengan karakteristik seperti itu, tampak jelas bahwa pondok pesantren merupakan sebuah Lembaga pendidikan agama yang unsur sentralnya adalah kyai dan santri. Namun demikian, pondok pesantren juga memiliki makna yang berbeda, yaitu sebagai sebuah kesatuan komunitas. Komunitas dalam hal ini adalah kesatuan manusia dalam suatu lokus tertentu dengan nilai-nilai tertentu yang hampir homogen (Barth, 2008). Dalam konteks pondok pesantren komunitas yang dimaksud adalah mereka yang berada atau tinggal dalam lingkup pesantren. Mereka adalah payu kyai, ustadz serta para santri.

Kajian mengenai kaitan antara partai politik dengan pesantren misalnya telah dilakukan oleh Ahmad Ramdani(2009). Kajian Ahmad Ramdani di kabupaten Bogor menunjukkan adanya Adanya kesamaan ideologi yaitu sama-sama berideologi Islam. Relasi yang terjadi antara partai politik dan pondok pesantren bukan terjadi antara partai PPP dengan pondok pesantren Daruttafsir, namun relasi yang terjadi adalah hubungan individu dengan individu antara Drs. H. Rachmat Yasin, MM. dengan K.H. Nu'man Istichori, Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antara partai politik dengan pondok pesantren antara lain: Adanya kepentingan, relasi atau hubungan tidak lepas dari beberapa unsur keterkaitan kepentingan, ketika ada yang menjembatani kesamaan kepentingan atau akomodasi kepentingan maka akan dengan mudah terjadinya relasi atau hubungan. Itulah yang terjadi antara Drs. H. Rachmat Yasin, MM. dengan K.H. Nu'man Istichori.

Ada juga pencerahan politik yang baik bagi masyarakat dalam membentuk mental berpolitik yang baik dan santun bagi masyarakat itu merupakan wujud dari akhlakulkarimah, begitu juga bagi para pengurus partai harus ada pencerahan dalam partai sehingga masyarakat yang terlibat di dalam politik praktis dapat memberikan nuansa bagi penganut partai berakhlakulkarimah, supaya apa yang di perbuat oleh masyarakat dapat berakhlakulkarimah. Maka kepentingan pondok pesantren Daruttafsir di dalam partai untuk memberikan amal ma'ruf nahi munkar, jadi partai bukan hanya untuk pengurus partai tapi partai untuk umat. (Nahdli, 2017)

Kajian ini berbeda dengan kajian di atas karena fokus utamanya adalah pada peran dan dinamika partai politik berbasis pondok pesantren khususnya di Kabupaten Kendal selama Pemilu 2020. Meskipun banyak literatur yang meneliti tentang pesantren

dan politik di Indonesia, namun sedikit sekali yang spesifik membahas bagaimana pondok pesantren di Kabupaten Kendal mempengaruhi dan berinteraksi dengan partai politik dalam konteks pemilihan lokal tahun 2020.

Kabupaten Kendal memiliki karakteristik demografis, sosial, dan budaya yang unik, serta tradisi pesantren yang mungkin berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, melihat bagaimana pondok pesantren di Kabupaten Kendal berperan dalam dinamika politik lokal dapat memberikan wawasan yang berbeda dan menambah kekayaan literatur tentang peran pesantren dalam politik Indonesia. (Khasanah, 2019) Selain itu, Pemilukada 2020 di Kabupaten Kendal menarik untuk diteliti karena dinamika politiknya yang kompleks. Dengan adanya beberapa calon yang memiliki latar belakang atau dukungan dari pondok pesantren, serta bagaimana pemilih bereaksi terhadap hal tersebut, memberikan sebuah fenomena yang belum banyak diteliti sebelumnya.

Pada Pemilukada 2020, terdapat jumlah tiga calon yang bersaing untuk memperebutkan posisi kepala daerah Kabupaten Kendal, yakni Tino Indra W-Mustamsikin, Dico Ganinduto-Windu Suko Basuki, dan Ali Nurudin-Yeti Handayani. Di Kabupaten Kendal, seperti di seluruh Indonesia, ada dinamika politik yang berbeda. Proses Pemilukada dapat dipengaruhi oleh variabel seperti kekuatan partai politik, popularitas calon, masalah lokal yang sedang berkembang, dan dinamika sosial masyarakat. Seperti banyak daerah di Indonesia, banyak pondok pesantren memainkan peran penting dalam kehidupan politik dan sosial di Kabupaten Kendal. Mereka seringkali menjadi basis pendukung bagi calon tertentu atau memiliki kekuatan politik yang kuat untuk memengaruhi politik lokal.

Tino Indra W adalah seorang politisi yang berpengalaman dalam politik lokal dan pemerintahan. Mustamsikin adalah orang yang terkenal di Kabupaten Kendal. Pasangan ini mungkin mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat dan dari partai politik tertentu. Dico Ganinduto mungkin seorang politisi lokal atau regional sebelumnya. Windu Suko Basuki mungkin berasal dari berbagai latar belakang, seperti bisnis atau bidang lain. Pasangan ini mungkin memiliki inisiatif atau platform yang berbeda dari pasangan calon lainnya, yang dapat menjadi fokus utama kampanye mereka. Ali Nurudin mungkin memiliki pengalaman dalam pemerintahan lokal atau dia berasal dari tokoh masyarakat yang terkenal. Yeti Handayani mungkin figur dengan latar belakang pendidikan dan aktivitas sosial. Selain itu, pasangan ini mungkin

mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik, serta memanfaatkan basis dan jaringan pendukung mereka untuk memenangkan Pemilu.

Sebelum mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu) 2020 di Kabupaten Kendal, Mustamsikin telah melakukan banyak hal. Ia dikenal sebagai anggota masyarakat yang aktif dalam aktivitas sosial dan kemasyarakatan Kabupaten Kendal. Latar belakang pendidikannya mungkin menunjukkan prinsip-prinsip keislaman, dan ia mungkin telah mengajar di pondok pesantren atau institusi pendidikan lainnya. Selain itu, Mustamsikin mungkin juga terlibat dalam organisasi sosial, keagamaan, atau amal. Ada kemungkinan bahwa pengalaman-pengalaman ini telah membentuk visi dan misi mereka untuk membangun Kabupaten Kendal.

Mustamsikin mungkin juga telah berhubungan dengan banyak orang karena dia aktif dalam kegiatan masyarakat. Orang-orang ini mungkin telah membangun hubungan dengan banyak orang di masyarakat, seperti politisi, pemimpin agama, dan aktivis sosial. Jaringan ini mungkin menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan politiknya menuju pencalonan dalam Pemilu 2020. Pencalonan Mustamsikin dalam Pemilu 2020 mungkin merupakan langkah alamiah dalam perjalanan karirnya, karena ia percaya bahwa kehadirannya sebagai pemimpin dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk memajukan Kabupaten Kendal sesuai dengan visi dan misinya. Oleh karena itu, pencalonan Mustamsikin dalam Pemilu 2020 dapat dianggap sebagai tindakan yang didorong oleh keinginan untuk melakukan pekerjaan nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Menganalisa pondok pesantren berbasis partai politik di kabupaten Kendal dalam pemilu 2020 dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana institusi religius berperan dalam politik lokal. Ini penting tidak hanya dari sudut pandang akademik, namun juga untuk pemangku kebijakan, praktisi politik, dan masyarakat umum dalam memahami dinamika politik di Indonesia yang selalu berkembang.. Bapak KH. Irfan selaku tokoh agama sekaligus pondok pesantren Tahfizul Qur'an As-Shoddiqie menyampaikan bahwa seringkali para pimpinan partai politik maupun calon yang akan di usung oleh partai politik dating kemari dengan niat silaturahmi, tidak hanya di tahun 2024 ini tetapi juga di tahun-tahun pemilu sebelumnya ada dari partai PPP, PKB, HANURA, dan PDI. Oleh karena itu menarik untuk meneliti fenomena ini dalam konteks politik di Indonesia. Asumsi yang dibentuk adalah bahwa politik sangat ditentukan oleh identitas dan relasi social yang ada.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan penelitian ini digunakan untuk menjawab tiga permasalahan utama yang telah dijelaskan dalam latar belakang yang telah dipaparkan. Selanjutnya rumusan permasalahan akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Apa saja yang dilakukan oleh paslon saat kunjungannya di pesantren?
2. Apa yang mereka harapkan dengan melakukan hal-hal itu?
3. Apa dampak dari yang dilakukan kunjungan dalam perolehan dukungan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan dikaji dari judul pondok pesantren berbasis partai politik di kabupaten Kendal dalam pemilu pada 2020, kemudian penulis akan menguraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui apa saja yang dilakukan paslon saat kunjungannya di Pondok Pesantren di kabupaten Kendal.
- b. Mengetahui apa yang balon harapkan dari melakukan kunjungan ke pesantren.
- c. Mengetahui bagaimana dampak kunjungann yang dilakukan balon untuk memperoleh dukungan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini secara khusus dapat di uraikan menjadi manfaat secara teoritik dan juga manfaat secara praktis, berikut merupakan uraian yang dapat dituliskan oleh peneliti:

- a. Manfaat Teoritik
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam khasanah keilmuan yang baru dan dapat mengembangkan wawasan tentang relasi paslon dengan pondok pesantren (study kasus tino mustamsikin dalam pemilu pada 2020)
 2. Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan gambaran bagaimana harapan dari paslon dalam melakukan kunjungan ke pesantren serta dampak yang dilakukan balon dalam memperoleh dukungan.
- b. Manfaat Praktis
 1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber kajian yang relevan bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian dengan topic serupa namun lebih spesifik dan komperhensif.

2. Secara praktis penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui—sebuah pondok pesantren berbasis partai politik untuk memperoleh dukungan.

D. Tinjauan Pustaka

Partai Politik, Banyak peneliti telah melakukan penelitian tentang partai politik. Salah satunya (Santoso, 2018) menyelidiki dinamika partai politik dalam demokrasi Indonesia. Santoso menekankan fungsi penting partai politik dalam pembentukan kebijakan publik, memobilisasi massa, dan menyediakan platform untuk partisipasi politik warga. Partai politik mewakili berbagai kepentingan masyarakat dan mengukung kandidat (Santoso, 2018). Studi terbaru juga menekankan peran partai politik dalam demokrasi lokal (Wijaya, 2021). Wijaya berkonsentrasi pada pemilihan kepala daerah dan melihat bagaimana partai politik lokal bergerak. Partai politik memainkan peran strategis penting dalam membentuk aliansi politik, mengawasi kampanye, dan meningkatkan representasi politik di tingkat kabupaten (Wijaya, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar penting untuk memahami bagaimana partai politik memainkan peran penting dalam konteks politik lokal. Informasi ini digunakan sebagai dasar untuk menyelidiki partai politik berbasis pondok pesantren di Kabupaten Kendal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2020 yang diadakan.

Studi oleh Ismail (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara pondok pesantren dan partai politik dalam pembentukan basis politik lokal. Studi ini menunjukkan bahwa beberapa pondok pesantren bukan hanya tempat untuk mengembangkan iman tetapi juga tempat untuk membentuk pendapat politik. Tokoh agama, terutama kyai, atau pemimpin pondok pesantren, sering kali berperan penting dalam mendukung partai politik tertentu. Selain itu, (Hamdan, 2021) meneliti dinamika hubungan antara partai politik dan pondok pesantren di era digital. Penelitian ini menyoroti peran media sosial dan teknologi informasi dalam memengaruhi persepsi politik di kalangan santri (peserta pondok pesantren). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik yang dapat memanfaatkan media sosial dengan efektif dapat membentuk opini publik di kalangan santri dan mendapatkan dukungan politik yang signifikan.

Politik, sebagai bentuk interaksi individu dalam masyarakat yang melibatkan pengambilan keputusan kolektif, merupakan aspek yang kompleks dan berubah-ubah

dari perkembangan demokrasi (Dahl, 2015). Politik modern melibatkan lebih dari hanya proses pemerintahan formal; itu juga mencakup partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti demonstrasi, advokasi, dan pemilihan umum. Konsep ini menunjukkan bagaimana politik telah berkembang menjadi alat untuk menyampaikan kepentingan dan prinsip masyarakat yang lebih luas (Held, 2006). Dinamika politik telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam era globalisasi, masalah seperti migrasi internasional, ketidaksetaraan ekonomi, dan perubahan iklim menjadi bagian penting dari agenda politik (Norris, 2017). Selain itu, pertumbuhan media sosial telah memungkinkan partisipasi politik yang lebih langsung dari masyarakat dan mempercepat aliran informasi. Oleh karena itu, penelitian politik memerlukan pemahaman menyeluruh tentang perubahan ini agar dapat menangani peluang dan tantangan baru yang muncul dalam peta politik modern.

Studi yang melihat hubungan erat antara pondok pesantren dan kebijakan publik di tingkat lokal memperkuat pemahaman kita tentang peran politik pondok pesantren (Syafii, 2018). Studi ini menunjukkan bagaimana beberapa pondok pesantren dapat membantu masyarakat dan pemerintah berbicara satu sama lain, membantu dalam proses membuat keputusan tentang pembangunan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, politik pondok pesantren mencakup pengaruh pada pemilihan umum dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada masyarakat setempat. Di samping itu, penelitian Hakim (2022) tentang hubungan antara pondok pesantren dan politik lokal menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya kadang-kadang tidak sejalan. Ada dinamika internal di pondok pesantren yang dapat mempengaruhi sikap dan preferensi politik santri. Studi ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pola perilaku politik santri di tingkat mikro dan merinci kompleksitas interaksi antara pondok pesantren dan realitas politik lokal.

Pondok pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam konvensional, juga memiliki pengaruh dalam politik dan partai politik. Peran pondok pesantren dalam pembentukan identitas politik lokal digambarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2019). Studi ini menemukan bahwa pondok pesantren dapat berfungsi sebagai sumber dukungan politik dan strategis dalam pemilihan umum di berbagai wilayah. Selain itu, peran pondok pesantren sebagai tempat untuk membangun kader politik disebutkan (Huda, 2020). Studi ini melihat bagaimana pondok pesantren dapat menjadi tempat bagi para pemuda untuk terlibat dalam politik dan belajar tentang peran partai politik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif yang relevan untuk

memahami interaksi antara pondok pesantren, politik, dan partai politik dalam konteks pemilihan umum di Kabupaten Kendal.

Sangat penting untuk memahami dinamika politik internal yang terjadi di pondok pesantren. Studi oleh Arfin (2019) membahas peran kyai sebagai pemimpin pondok pesantren dan bagaimana keberadaannya dapat memengaruhi lanskap politik lokal. Kyai tidak hanya menjadi figur keagamaan, tetapi juga sering dihormati sebagai tokoh politik yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi pemikiran politik santri dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, (Rahayu, 2020) menyoroti dampak pendidikan politik di pondok pesantren terhadap partisipasi politik santri. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik di pondok pesantren tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup pengetahuan dan pemahaman tentang sistem politik dan partai politik. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesadaran politik dan partisipasi aktif santri dalam kehidupan politik lokal.

Diantara semesta penelitian ini yang membedakan dengan penelitian saya adalah membahas permainan paslon dalam memainkan permainan penting dalam memobilisasi masa dan penentuan arah politik local. Dukungan yang kuat dari pondok pesantren juga memberikan keuntungan politik bagi calon yang didukungnya, meskipun tidak selalu menjamin kemenangan secara mutlak.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

A. Partai Politik

Partai Politik merupakan sebuah wadah organisasi penting dalam menyatukan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, sehingga tujuan dan orientasi mereka dapat terkonsolidasi, sehingga mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan. (Miriam Budiardjo, 2010)

Partai politik adalah entitas organisasi yang muncul dalam konteks politik sebuah negara atau wilayah dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan pengaruh, kebijakan, kekuasaan, dan representasi. Partai politik memiliki peran integral dalam demokrasi modern, mengoordinasikan dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Melalui proses politik dan pemilihan umum, partai politik berusaha memengaruhi arah kebijakan negara dan

pemerintah, serta meraih dukungan masyarakat untuk mendapatkan posisi politik yang diinginkan. (Miriam Budiardjo, 2010)

Partai politik bukan hanya wadah untuk bersaing dalam pemilihan, tetapi juga merupakan alat komunikasi yang kuat untuk membawa isu-isu sosial, ekonomi, budaya, dan politik kepada publik. Mereka mewakili visi dan misi beragam kelompok masyarakat, dari yang bersifat ekonomi, agama, etnis, hingga ideologi tertentu. (Miriam Budiardjo, 2010)

Dalam konteks demokrasi, partai politik juga berfungsi sebagai jembatan antara wakil-wakil masyarakat dan pemerintah. Mereka menjadi perantara dalam proses pengambilan keputusan, mengemukakan pandangan masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan platform partai. Oleh karena itu, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas demokrasi dan menjalankan kewajibannya terhadap pemilih dan masyarakat pada umumnya. (Subakti : 2010)

Partai politik memiliki dinamika internal yang melibatkan kepemimpinan, struktur organisasi, dan pemilihan pimpinan. Selain itu, partai juga berinteraksi dengan partai lain dalam konteks kompetisi politik, saling berusaha mendapatkan dukungan publik dan memenangkan pemilihan umum. Di tengah dinamika ini, partai politik berupaya menjaga kohesi internal, konsistensi ideologi, dan membangun citra publik yang positif. (Priyanto, 2017)

Dalam konteks global, partai politik memiliki peran penting dalam diplomasi politik dan kerja sama antarnegara. Partai-partai politik sering kali memiliki afiliasi dengan partai di negara lain, membentuk aliansi politik internasional, dan menjalankan agenda bersama terkait isu global. (Hasibuan, 1996).

Secara khusus bahwa setiap partai politik telah mengatur aturannya sendiri. Partai Politik bertujuan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh partai, seperti terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (Nahdli, 2017).

B. Politik

Politik adalah inti dari interaksi manusia dalam konteks sosial yang melibatkan proses pembuatan keputusan, distribusi sumber daya, pengaturan konflik, dan pembentukan norma yang mengatur kehidupan bersama. Ini mencakup serangkaian aktivitas kompleks yang terjalin dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional.

Politik melibatkan berbagai aktor, mulai dari individu hingga kelompok besar, dan memiliki dampak yang luas pada tata kelola masyarakat. (Muhammad Labolo, 2015)

Politik merupakan dinamika yang berkelanjutan dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat dinamika kekuasaan, otoritas, dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana tujuan bersama dicapai. Politik bukan hanya terbatas pada ranah institusi pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan politik. (Subakti, 2010)

Dalam setiap tatanan sosial, politik mencerminkan upaya manusia untuk memecahkan konflik, menegosiasikan perbedaan, dan mengorganisir masyarakat. Aktivitas politik berkisar dari pengambilan keputusan pribadi hingga tindakan kolektif yang mengarah pada perubahan sosial. Dalam konteks demokrasi, politik memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan penciptaan kebijakan. (Subakti, 2010)

Peran utama politik adalah mengatur distribusi sumber daya, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya, agar memenuhi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, politik mencakup peran pemerintah dalam mengelola aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pemerataan, dan hak asasi manusia. (Subakti, 2010)

Politik juga merupakan wadah untuk mengembangkan ideologi dan pandangan dunia yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Ideologi politik membentuk kerangka kerja pandangan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan apa tujuan akhir yang dikejar. (Lestari, 2018)

Dalam dunia global yang semakin terhubung, politik telah meluas dari batas-batas nasional ke arena internasional. Isu-isu seperti perdagangan internasional, lingkungan, dan konflik bersenjata menciptakan tautan antara politik nasional dan geopolitik global. (Lestari, 2018)

C. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan dalam memberikan pendidikan agama, moral, dan akademik kepada santri (peserta didik) dalam lingkungan yang khas. Pondok pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kyai (pemimpin spiritual) dan mencakup berbagai aspek pembelajaran, seperti pemahaman teks suci, ilmu agama, bahasa Arab, serta ilmu-ilmu keislaman lainnya. Santri di pondok pesantren tidak hanya mendapatkan pendidikan formal,

tetapi juga dilatih dalam etika, disiplin diri, dan nilai-nilai keagamaan yang melandasi kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya dalam masyarakat. (Abdul Wahid Zaini, 1996)

D. Politik dalam Perspektif Islam

Politik dalam perspektif Islam adalah upaya pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan ajaran-ajaran Islam. Ini mencakup pengaturan kebijakan dan tata kelola yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam kepemimpinan. Politik dalam Islam mencakup prinsip-prinsip seperti syura (musyawarah), amar ma'ruf nahi munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan), adil dan setara dalam distribusi kekayaan, serta tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pemahaman politik dalam perspektif Islam juga dapat mencakup konsep negara Islam atau negara berdasarkan hukum syariah (khilafah). (Nahdli, 2017)

Dengan definisi konseptual ini, penulis dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dua elemen penting dalam penelitian ini. Ini akan membantu penulis dalam merancang metodologi penelitian dan menganalisis hubungan antara partai politik berbasis pondok pesantren dan pandangan politik dalam perspektif Islam, terutama dalam konteks Pemilukada 2020 di Kabupaten Kendal.

2. Teori Identitas Francis Fukuyama

A. Konsep Teori Politik Identitas

Politik identitas menurut Francis Fukuyama adalah konsep yang memainkan peran penting dalam dinamika politik dan dapat terbentuk melalui berbagai faktor, termasuk agama, budaya, atau bahkan afiliasi politik. Konsep ini memberikan wawasan yang berharga dalam konteks penelitian tentang 'Partai Politik Berbasis Pondok Pesantren (Studi Kasus di Kabupaten Kendal dalam Pemilukada 2020).' Dalam konteks Pondok Pesantren dan pemilu, identitas agama dan budaya mungkin menjadi faktor sentral yang membentuk dukungan politik dan preferensi pemilih. Identitas Islam, dalam hal ini, bisa menjadi elemen kunci dalam membentuk preferensi politik di Kabupaten Kendal, di mana Pondok Pesantren memiliki pengaruh yang signifikan.. (Fukuyama, 2018)

Teori identitas yang dikemukakan oleh Fukuyama menekankan pentingnya inklusi dan eksklusivitas dalam politik identitas. Menurut teori ini, pertanyaan penting

adalah sejauh mana berbagai entitas politik mampu memasukkan beragam identitas ke dalam platform dan agenda politik mereka. Hal ini dapat memengaruhi sejauh mana entitas-entitas tersebut dapat mendapatkan dukungan lintas identitas. Oleh karena itu, dalam analisis dinamika politik, penting untuk mempertimbangkan bagaimana identitas politik yang terbentuk dapat memengaruhi dinamika politik dan strategi berbagai entitas politik.. (Fukuyama, 2018)

A. Asumsi dasar teori politik Identitas

Asumsi dasar teori politik identitas Fukuyama adalah bahwa identitas politik adalah unsur yang mendasar dalam pemahaman perilaku politik individu dan kelompok. Salah satu asumsi kunci dalam teorinya adalah bahwa manusia secara inheren memiliki kebutuhan untuk diakui dan diidentifikasi oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Identitas politik, seperti identitas agama, etnis, atau budaya, memainkan peran krusial dalam membentuk preferensi politik dan orientasi pemilih. Fukuyama menganggap bahwa identitas ini tidak hanya mencakup faktor-faktor sosial dan budaya, tetapi juga berakar dalam kebutuhan manusia untuk merasa bagian dari komunitas yang lebih besar (Fukuyama, 2018).

Selain itu, Fukuyama berpendapat bahwa identitas politik bukanlah fenomena statis, tetapi dapat berubah seiring waktu dan situasi politik. Identitas dapat diperkuat atau dilemahkan oleh isu-isu politik tertentu, kampanye politik, atau perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian *relasi paslon dengan pondok pesantren (study kasus tino mustamsikin dalam pemilukada 2020)*, pemahaman terhadap asumsi dasar teori identitas Fukuyama dapat membantu menjelaskan bagaimana identitas politik di kalangan pemilih dan aktor politik dalam Pondok Pesantren dapat berubah atau berkembang seiring dengan dinamika politik lokal dan nasional. Ini juga dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana partai politik memanfaatkan atau menghadapi perubahan dalam identitas politik ini untuk mencapai tujuan politik mereka. (Fukuyama, 2018)

B. Istilah istilah kunci dalam teori politik Identitas Fukuyama

Identitas Politik: Ini adalah istilah sentral dalam teori Fukuyama yang mengacu pada cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik. Identitas politik dapat mencakup aspek-aspek seperti identitas agama, etnis, budaya, atau sosial yang memengaruhi preferensi politik seseorang.

- a. Inklusi dan Eksklusi: Ini merujuk pada cara kelompok-kelompok politik atau masyarakat memasukkan atau mengecualikan individu atau kelompok lain dalam pembentukan identitas politik mereka. Pertanyaan tentang sejauh mana suatu kelompok bersedia memasukkan kelompok lain dalam identitas politiknya dapat memiliki dampak signifikan pada dinamika politik. (Fukuyama, 2018).
- b. Perubahan Identitas Politik: Fukuyama menggarisbawahi fleksibilitas identitas politik. Ini berarti identitas politik dapat berubah seiring waktu dan pengaruh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Perubahan ini bisa signifikan dalam konteks perubahan orientasi politik individu atau kelompok. (Fukuyama, 2018).
- c. Kebutuhan akan Pengakuan: Fukuyama menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diakui dan diidentifikasi oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Kebutuhan ini dapat memainkan peran penting dalam pembentukan identitas politik dan motivasi politik. (Fukuyama, 2018)
- d. Kohesi Sosial: Ini mengacu pada konsep bahwa identitas politik dapat menjadi perekat yang mempersatukan anggota kelompok dalam masyarakat. Kohesi sosial sering kali muncul ketika individu merasa terkait dengan identitas politik yang sama. (Fukuyama, 2018).
- e. Isu Identitas: Dalam konteks politik, isu-isu identitas merujuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas seperti agama, etnisitas, atau budaya yang menjadi fokus dalam kompetisi politik dan perdebatan publik. (Fukuyama, 2018) .

Menguraikan istilah-istilah ini dengan lebih rinci dalam sub bab akan membantu pembaca memahami kerangka teoretis Fukuyama dalam konteks penelitian tentang relasi paslon dengan pondok pesantren (study kasus tino mustamsikin dalam pemilu pada 2020).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini sangat relevan untuk mengkaji sebuah penelitian yang tidak berpola. Karena dengan metode kualitatif ini untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian penelitian kualitatif menurut Moehadjir (1989). Adalah penelitian yang

dimaksudkan untuk sebuah fenomena yang akan dialami oleh subjek penelitian, lebih tepatnya metode ini sangat relevan jika digunakan peneliti untuk meneliti hal-hal yang bersangkutan dengan persepsi perilaku sikap motivasi dan tindakan subjek dalam pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kaya dan bahasa yang memanfaatkan berbagai metode ilmiah, dikarenakan hal-hal tersebut kurang relevan jika menggunakan metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih cenderung menekan peneliti untuk memahami sebuah peristiwa yang berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu dan data yang disajikan berupa dokumentasi, kata-kata dan bahasa bukan berupa angka.

Sedangkan definisi dari Penelitian Studi kasus adalah sebuah penelitian yang akan terfokus pada sebuah kasus tertentu untuk diamati dan dianalisa secara cermat sampai tuntas. Terkait dengan judul yang akan diangkat oleh peneliti, penulis mencoba untuk melihat fenomena pondok pesantren berbasis partai politik di kabupaten Kendal dalam pemilu pada 2020 dengan pengamatan secara menyeluruh, dimana penulis akan berperan sebagai instrument utama dalam mengumpulkan data dan informasi terhadap fenomena yang diangkat oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas. Peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang terkait dengan objek yang dikaji, sehingga tidak ada manipulasi data dan informasi di dalam penelitian yang akan dikaji.

2. Sumber dan Jenis Data

Subjek yang akan digunakan sebagai data penelitian merupakan sumber data penelitian. (Arikunto, 1991). Terdapat dua jenis data yang akan di dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer sebagai sumber data utama yang diperoleh langsung lapangan melalui subjek yang bersangkutan melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Azwar, 2001). Dalam penelitian ini data primer berasal dari informan yang diperoleh dari Ketua Partai Persatuan Pembangunan yakni Dr. K.H. Mukh Mustamsikin S.Ag., M.S.I. TU partai PPP yakni Pak Agus Siswanto Am. D, ketua Tani PCNU kabupaten Kendal dan timses yakni Muhammad Ridwan dan pengasuh pondok pesantren Asshidiqie yakni K.H Irfan Shodiq Al Hafidz, pengurus pondok pesantren Asshidiqie yakni mas Husna Albab dan Mughis dan tiga santri pondok

pesantren Asshidiqie dengan fokus penelitian terkait dengan relasi antara kedua pihak.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung yang cara memeprolehnya berasal dari buku artikel jurnal penelitian dan media elektronik atau media cetak(Azwar, 2001). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder di ambil dari buku, jurnal penelitian, artikel dan berbagai sumber dari media elektronik maupun media cetak yang berkaitan dengan pondok pesantren berbasis partai politik di kabupaten Kendal dalam pemilukada 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan lakukan oleh peneliti dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif yang sesuai dengan tema yang dikaji. Karena hal ini sangat penting untuk memperoleh data pendukung dalam sebuah penelitian (Moehadjir, 1989 : 50-51). Adapun cara mengumpulkan data yang dilakukan peneliti diantaranya wawancara, dokumentasi atau studi literatur dokumen dan observasi. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh peneliti sebagai berikut:

a) Interview

Interview atau wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi secara intensif dengan cara pembekalan verbal sepihak, yakni dua belah pihak atau lebih melakukan tanya jawab yang nantinya hasil dari interview tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam sebuah penelitian. (Hadi, Haryono, 1998 : 135). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan interview secara mendalam dan terstruktur untuk memperoleh data-data dari balon tentang kunjungan dan hal apa yang dilakukan balon di pesantren. Narasumber dari balon adalah Bapak KH. Mustamskin selaku balon, Pak Agus Siswanto Am.D, selaku tata usaha partai PPP, Muhammad Ridwan selaku ketua tani PC NU Kendal sekaligus timses balon dan dari Pondok Pesantren adalah Pak KH. Irfan Shodiq Al-Hafidz selaku pengasuh PPTQ As-Shiddiqie, dan Gus Mughis selaku Lurah PPTQ As-Shiddiqie.

b) Dokumentasi dan studi literatur

Dokumentasi atau studi literatur adalah sebuah data pendukung yang berasal dari data statistik, peta, foto gambar dan lain-lain yang nanti akan dimasukkan kedalam objek penelitian.(Soekanto, 1986 : 21).

Metode dokumentasi ini digunakan untuk penulis untuk membantu dalam menganalisa sebuah objek yang akan dikaji yang selanjutnya akan dimasukkan kedalam objek kajian peneliti. Selanjutnya peneliti melakukan studi literatur untuk yang datanya berasal dari beberapa jurnal, buku, artikel, dan sebagainya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi literature sendiri adalah untuk menganalisis teori yang nantinya berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai sumber rujukan dalam menganalisis hasil penelitian.

c) Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan yang sistematis untuk melakukan penilaian yang bertujuan untuk memperoleh data. Hal ini dapat dipahami sbagi sebuah dasar dalam penelitian karena untuk mendapatkan temuan terhadap objek yang akan diteliti dan selanjutnya dicatat dalam sebuah catatan observasi. (Subagyo, 1991: 63). Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipasi pasif.

Observasi partisipasi pasif adalah sebuah observasi yang mengharuskan peneliti untuk terjun namun tidak ikut berpartisipasi dan hanya mengamati setting sosial terhadap objek yang akan dikaji dan dari pengamatan tersebut peneliti akan mencatat data dari lapangan(Sugiyono, 2007:310). Dari data yang diperoleh dari lapangan ini selanjutnya akan di olah kemudian digunakan sebagai dasar dari laporan penelitian.

Peneliti menggunakan metode ini untuk menggali data secara keseluruhan tentang pondok pesantren berbasis partai politik di kabupaten Kendal dalam pemilukada 2020.

4. Teknik Analisis Data

Sebuah data yang telah terkumpul setelah melalui interview dan melakukan observasi selanjutnya data tersebut akan dianalisa lebih mendalam oleh peneliti dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskripsi. Analisa data-data yang telah terkumpul dari lapangan merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian.

Teknik analisis data dimulai dengan menyusun, mengklasifikasi dan mengaitkan antara data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang relevan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan. (Antonius & Sosrodiharjo, 2014)

Teknik dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2007:91) Data reduksi merupakan data pokok yang berasal dari lapangan yang nantinya akan disesuaikan dengan tema peneliti untuk memudahkan pemahaman dan penyajian data. Selanjutnya penyajian data yang akan memudahkan peneliti dalam memahami dan menemukan analisa dari data yang berasal dari lapangan untuk melakukan analisa selanjutnya. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan fokus penelitian dari hasil proses reduksi data dan penyajian data. Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, maka kesimpulan yang didapat dari seluruh rumusan masalah yang telah diuraikan adalah mengetahui pondok pesantren berbasis partai politik di kabupaten Kendal dalam pemilu pada 2020 analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan dengan cara reduksi data penyajian data

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menyusun tiga bagian dengan enam bab, dan berikut sistematika yang digunakan oleh peneliti :

1. Bagian Pertama terdiri dari Cover, Nota Pembimbing, Kata Pengantar, Persembahan dan Motto
2. Bagian Kedua terdiri isi skripsi yang meliputi:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama dipaparkan latar belakang penelitian dan selanjutnya dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. kemudian akan dijelaskan tentang tujuan dan juga manfaat yang akan didapat dari penelitian ini. Pada bab pendahuluan ini, akan diuraikan sebuah metodologi pendekatan penelitian, landasan teori yang menjadi analogi kerangka pemikiran skripsi serta sistematika penulisan yang akan dirangkai secara terstruktur menjadi sebuah skripsi.

- **BAB II PARTAI POLITIK, PONDOK PESANTREN DALAM PEMILUKADA DAN TEORI POLITIK IDENTITAS FRANCIS FUKUYAMA**

Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas definisi konseptual yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tentang partai politik, politik, pesantren dan politik dalam perspektif islam. Sementara bagian kedua berisi teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori identitas politik Francis Fukuyama, yang meliputi konsep identitas politik, asumsi dasar teori identitas politik, dan istilah-istilah penting dalam teori identitas politik Francis Fukuyama.

- BAB III PARTAI POLITIK DAN PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL

Bab ini memaparkan tentang kondisi umum kabupaten Kendal yang meliputi kondisi geografis, kondisi topografis dan kondisi demografis, dan gambaran umum partai politik dan pesantren di Kendal.

- BAB IV KUNJUNGAN BALON KE PESANTREN DAN ALASANNYA

Dalam bab ini dipaparkan tentang kunjungan balon di pesantren dan alasannya. Pada bagian pertama dipaparkan antara lain tentang siapa yang berkunjung, berapa frekwensi, kapan waktu berkunjung, dan alasannya

- BAB V DAMPAK KUNJUNGAN BALON KE PESANTREN DAN PEROLEHAN DUKUNGAN.

Bab ini memaparkan tentang dampak bagi balon dan dampak bagi pesantren. Dampak bagi bakal calon bupati meliputi dampak psikologis berupa kuatnya keyakinan untuk terus maju dan mencalonkan diri, dan dampak psikologis berupa keyakinan akan menang. Sementara itu dampak pada pondok pesantren adalah adanya perubahan dukungan dan perubahan pola dukungan:

- BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, dan saran adalah masukan yang berdasar pada kesimpulan.

3. Bagian akhir : Daftar Kepustakaan, dan Lampiran.

BAB II

PARTAI POLITIK, PONDOK PESANTREN DALAM PEMILUKADA DAN TEORI POLITIK IDENTITAS FRANCIS FUKUYAMA

Kerangka teori memiliki peran penting dalam penelitian terhadap objek yang sedang diteliti. Menurut Siswoyo, kerangka teori merupakan kumpulan konsep, asumsi, dan generalisasi yang berhubungan satu sama lain. (Mardalis, 2003:42) Hal ini mencerminkan pandangan sistematis tentang fenomena dan menjelaskan hubungan antar variabel dengan tujuan mengungkapkan fenomena dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori partai politik dari Miriam Budiardjo, teori politik dari Ramlan Surbakti, teori pondok pesantren dari Abdul Wahid Zaini dan politik dalam perspektif Islam dari Muhammad Ashiq Nahdli untuk mempelajari lebih lanjut tentang pondok pesantren berbasis partai politik di kabupaten Kendal dalam pemilu 2020.

A. Definisi Konseptual

1. Partai Politik

Partai Politik merupakan sebuah wadah organisasi penting dalam menyatukan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, sehingga tujuan dan orientasi mereka dapat terkonsolidasi, sehingga mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan (Miriam Budiardjo, 2010).

Partai politik adalah entitas organisasi yang muncul dalam konteks politik sebuah negara atau wilayah dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan pengaruh, kebijakan, kekuasaan, dan representasi. Partai politik memiliki peran integral dalam demokrasi modern, mengoordinasikan dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Melalui proses politik dan pemilihan umum, partai politik berusaha memengaruhi arah kebijakan negara dan pemerintah, serta meraih dukungan masyarakat untuk mendapatkan posisi politik yang diinginkan (Miriam Budiardjo, 2010).

Partai politik bukan hanya wadah untuk bersaing dalam pemilihan, tetapi juga merupakan alat komunikasi yang kuat untuk membawa isu-isu sosial, ekonomi, budaya, dan politik kepada publik. Mereka mewakili visi dan misi beragam kelompok masyarakat, dari yang bersifat ekonomi, agama, etnis, hingga ideologi tertentu (Miriam Budiardjo, 2010).

Dalam konteks demokrasi, partai politik juga berfungsi sebagai jembatan antara wakil-wakil masyarakat dan pemerintah. Mereka menjadi perantara dalam proses pengambilan keputusan, mengemukakan pandangan masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan platform partai. Oleh karena itu, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas demokrasi dan menjalankan kewajibannya terhadap pemilih dan masyarakat pada umumnya. (Subakti, 2010) .

Partai politik memiliki dinamika internal yang melibatkan kepemimpinan, struktur organisasi, dan pemilihan pimpinan. Selain itu, partai juga berinteraksi dengan partai lain dalam konteks kompetisi politik, saling berusaha mendapatkan dukungan publik dan memenangkan pemilihan umum. Di tengah dinamika ini, partai politik berupaya menjaga kohesi internal, konsistensi ideologi, dan membangun citra publik yang positif. (Priyanto, 2017)

Dalam konteks global, partai politik memiliki peran penting dalam diplomasi politik dan kerja sama antarnegara. Partai-partai politik sering kali memiliki afiliasi dengan partai di negara lain, membentuk aliansi politik internasional, dan menjalankan agenda bersama terkait isu global. (Hasibuan, 1996).

Secara khusus bahwa setiap partai politik telah mengatur aturannya sendiri. Partai Politik bertujuan untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh partai, seperti terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (Nahdli, 2017).

Meskipun tujuan partai politik di Indonesia sangat beragam, tujuan umum mereka adalah untuk mewakili kebutuhan masyarakat, memengaruhi kebijakan publik, dan memperoleh kekuasaan politik. Menurut Alan Ware, beberapa partai politik mungkin berkonsentrasi pada memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Contohnya adalah partai-partai yang mewakili golongan pekerja, petani, atau kelompok agama tertentu. Sebaliknya, ada juga partai politik yang berusaha untuk mengontrol dan mempertahankan kekuasaan politik. Tujuan ini biasanya mencakup memperluas basis dukungan, mengembangkan kebijakan yang dapat memperkuat posisi mereka dalam politik, dan memenangkan pemilihan umum untuk menduduki jabatan pemerintahan.(Ware, 1996)

Pembentukan partai politik melibatkan serangkaian tindakan strategis, termasuk menentukan tujuan politik, mendapatkan anggota, membuat platform politik,

mendapatkan dana, dan menggunakan taktik komunikasi untuk mendapatkan dukungan publik. Dalam buku Alan Ware "Political Parties and Party Systems", (1996) dia menyatakan bahwa gerakan sosial atau kelompok kepentingan yang ingin mengartikulasikan kepentingan mereka dalam sistem politik formal seringkali merupakan titik awal pembentukan partai politik. Selanjutnya, proses ini melibatkan pembentukan struktur organisasi internal, yang mencakup pemilihan pimpinan partai dan pembentukan hierarki. Selain itu, partai politik memerlukan rencana untuk mendapatkan dukungan politik, baik melalui partisipasi dalam pemilihan umum, kerjasama dengan kelompok lain, atau kampanye publik. Selama proses ini, partai politik mengalami transformasi dan perubahan sesuai dengan perubahan politik dan masyarakat.

Di Indonesia, berbagai jenis partai politik menunjukkan perbedaan ideologi, basis dukungan, dan tujuan politik. Giovanni Sartori (2016), dalam bukunya "Parties and Party Systems: A Framework for Analysis", mengatakan bahwa partai politik ideologis seperti partai Islam, nasionalis, dan sosialis termasuk dalam kategori jenis partai politik yang ada di Indonesia. Selain itu, ada juga partai politik pragmatis yang lebih berkonsentrasi pada memperoleh kekuasaan dan kepentingan pragmatis daripada memiliki agenda ideologis yang jelas. Selain itu, ada partai politik berdasarkan etnis yang mewakili kelompok etnis atau regional tertentu. Selain itu, partai politik di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan sejarah dan latar belakangnya. Ini termasuk partai politik dengan sejarah militer atau partai politik yang berasal dari gerakan sosial masyarakat.

Dalam sistem politik, partai politik melakukan banyak hal, seperti representasi politik, mengidentifikasi dan menyampaikan kepentingan masyarakat, dan memungkinkan perselisihan politik yang damai. Menurut Giovanni Sartori (2016) partai politik juga berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dengan menyediakan platform politik yang berisi program-program yang akan diterapkan setelah mendapatkan dukungan politik yang memadai. Selain itu, partai politik membantu stabilisasi sistem politik dengan menyediakan opsi politik yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara sistematis dalam proses politik. Partai politik juga dapat membantu peralihan kekuasaan yang damai, memperkuat legitimasi pemerintah, dan membangun sistem politik yang demokratis dengan berpartisipasi dalam proses politik formal.

Proses politik di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh partai politiknya. Partai politik di Indonesia seringkali mencerminkan berbagai ideologi dan kepentingan, mulai dari partai berbasis agama seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga partai nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan partai yang mewakili kelompok etnis tertentu. Terlepas dari keanekaragaman ini, partai politik di Indonesia sering menghadapi tantangan dalam membangun legitimasi publik, memerangi korupsi, dan memenuhi harapan masyarakat akan representasi yang efektif dan kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Politik adalah inti dari interaksi manusia dalam konteks sosial yang melibatkan proses pembuatan keputusan, distribusi sumber daya, pengaturan konflik, dan pembentukan norma yang mengatur kehidupan bersama. Ini mencakup serangkaian aktivitas kompleks yang terjalin dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Politik melibatkan berbagai aktor, mulai dari individu hingga kelompok besar, dan memiliki dampak yang luas pada tata kelola masyarakat. (Muhammad Labolo, 2015)

Politik merupakan dinamika yang berkelanjutan dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat dinamika kekuasaan, otoritas, dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana tujuan bersama dicapai. Politik bukan hanya terbatas pada ranah institusi pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan aktor-aktor lain yang memiliki kepentingan politik. (Subakti, 2010)

Dalam setiap tatanan sosial, politik mencerminkan upaya manusia untuk memecahkan konflik, menegosiasikan perbedaan, dan mengorganisir masyarakat. Aktivitas politik berkisar dari pengambilan keputusan pribadi hingga tindakan kolektif yang mengarah pada perubahan sosial. Dalam konteks demokrasi, politik memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan penciptaan kebijakan (Subakti, 2010).

Peran utama politik adalah mengatur distribusi sumber daya, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya, agar memenuhi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, politik mencakup peran pemerintah dalam mengelola aspek-aspek kehidupan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pemerataan, dan hak asasi manusia (Subakti, 2010).

Politik juga merupakan wadah untuk mengembangkan ideologi dan pandangan dunia yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Ideologi politik membentuk

kerangka kerja pandangan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan apa tujuan akhir yang dikejar.(Lestari, 2018).

Dalam dunia global yang semakin terhubung, politik telah meluas dari batas-batas nasional ke arena internasional. Isu-isu seperti perdagangan internasional, lingkungan, dan konflik bersenjata menciptakan tautan antara politik nasional dan geopolitik global. (Lestari, 2018)

Analisis proses politik melibatkan pemahaman menyeluruh tentang berbagai proses politik yang terjadi di masyarakat, mulai dari membuat kebijakan publik hingga bagaimana interaksi antara antaraktor politik berjalan. Dalam buku William N. Dunn(1981) "Analisis Kebijakan Publik" menggunakan analisis politik yang menyeluruh untuk memahami dan memeriksa berbagai proses politik yang terjadi dalam konteks pembentukan kebijakan publik. Ini mencakup identifikasi dan analisis unsur-unsur yang memengaruhi pembentukan kebijakan. Ini termasuk kekuatan politik, kepentingan kelompok, dan dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, sumber daya yang relevan dengan proses politik, seperti struktur kelembagaan, peraturan hukum, dan cara antaraktor politik berkomunikasi, dipelajari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik yang kompleks. Selain itu, metode analisis politik juga melibatkan menilai dampak kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat secara keseluruhan dan hasilnya.

Dalam buku "Comparative Politics: Integrating Theories, Methods, and Cases" oleh J. Tyler Dickovick dan Jonathan Eastwood(2012), pemahaman mendalam tentang struktur institusional, proses politik, dan faktor sosial dan budaya yang membentuk dinamika politik di tingkat nasional diperlukan untuk menganalisis sistem politik suatu negara. Sistem politik daerah terdiri dari struktur, prosedur, dan dinamika yang mengatur interaksi antara aktor politik dan pembentukan kebijakan. Ini mencakup lembaga politik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta partai politik, komunitas sipil, dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses politik. Dalam sistem ini, dinamika politik mencakup persaingan politik, negosiasi kebijakan, dan pembagian kekuasaan di antara berbagai aktor politik. Nilai politik, budaya politik, dan faktor historis yang memengaruhi perkembangan politik suatu negara diwakili oleh sistem politik ini.

Dalam buku Paul Pierson(2004) "Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis" dinamika politik melibatkan melihat bagaimana politik

berkembang dari waktu ke waktu, termasuk perubahan dalam proses politik, struktur politik, dan interaksi antara antar aktor politik di suatu negara atau wilayah. Ini mencakup perubahan politik seperti transisi ke demokratisasi, perubahan rezim politik, dan pergeseran sistem politik dari otoriter menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap partisipasi masyarakat sipil. Selain itu, dinamika politik juga mencakup perubahan di mana kekuasaan politik didistribusikan, bagaimana aktor politik berpengaruh, dan pola politik yang berdampak pada proses pembentukan kebijakan dan pelaksanaan keputusan politik.

2. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan dalam memberikan pendidikan agama, moral, dan akademik kepada santri (peserta didik) dalam lingkungan yang khas. Pondok pesantren biasanya dipimpin oleh seorang kyai (pemimpin spiritual) dan mencakup berbagai aspek pembelajaran, seperti pemahaman teks suci, ilmu agama, bahasa Arab, serta ilmu-ilmu keislaman lainnya. Santri di pondok pesantren tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga dilatih dalam etika, disiplin diri, dan nilai-nilai keagamaan yang melandasi kehidupan sehari-hari. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya dalam masyarakat (Abdul Wahid Zaini, 1996).

Pendidikan agama Islam adalah fokus utama di pondok pesantren. Kyai mengajarkan santri menghafal Al-Qur'an, tafsir, hadis, fiqh (hukum Islam), dan sejarah Islam. Selain itu, mereka juga diajarkan ilmu umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan sejarah. Metode pembelajaran tradisional menggunakan diskusi dan pengajaran langsung antara kyai dan santri. Tata tertib yang ketat mengatur kehidupan sehari-hari santri di pondok pesantren. Tata tertib ini mencakup waktu bangun pagi, shalat berjamaah, kegiatan belajar, dan waktu istirahat. Untuk membangun kemandirian dan kepribadian mereka, santri juga terlibat dalam keterampilan seperti pertanian dan kerajinan tangan, serta kegiatan sosial lainnya (Najib, 2016).

Kyai, yang juga dikenal sebagai pemimpin pondok pesantren, memiliki peran penting dalam mengelola pesantren. Mereka berfungsi sebagai bukan hanya pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan sosial bagi masyarakat pesantren. Kekuatan kyai sangat penting untuk menjaga nilai-nilai Islam dan adat istiadat serta pengambilan keputusan di pesantren. Pondok pesantren sangat

memengaruhi masyarakat sekitarnya. Pesantren berfungsi sebagai tempat pendidikan agama dan tempat kegiatan keagamaan dan budaya di lingkungan sekitarnya. Seringkali, masyarakat di sekitar pesantren mengadakan acara keagamaan dan berbicara dengan kiai tentang masalah yang mereka hadapi (Najib, 2016).

Setelah lulus dari pondok pesantren, banyak santri yang menjadi guru, pemimpin masyarakat, dan tokoh nasional. Pondok pesantren sangat berkontribusi pada penyebaran Islam di Indonesia dan pembentukan karakter generasi muda. Mereka juga memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan tradisi Islam dan memajukan masyarakat (Najib, 2016).

Tradisi pendidikan Islam di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sangat kaya, dan pondok pesantren merupakan bagian penting dari warisan budaya dan keagamaan daerah ini. Beberapa pondok pesantren di Kabupaten Kendal menonjol dalam hal ilmu agama, pengajaran Al-Qur'an, atau pendidikan keterampilan praktis. Selain itu, mereka sering mengorganisir acara keagamaan dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat setempat. Beberapa pesantren terkenal di daerah ini antara lain Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Pondok Pesantren Roudlatul Mubtadiin, Pondok Pesantren Ashiddiqie dan Pondok Pesantren Al-Hikmah.

Pondok pesantren di Kendal tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi komunitas. Mereka berpartisipasi dalam berbagai program untuk mendorong ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, bantuan sosial, dan program kewirausahaan.

Pondok pesantren di Kendal juga memengaruhi kelembagaan dan politik masyarakat. Kyai dan tokoh-tokoh pesantren sering menjadi penggerak utama dalam kegiatan sosial, politik, dan keagamaan di tingkat lokal maupun nasional. Pondok pesantren di Kabupaten Kendal memiliki tradisi keislaman yang kuat dan terus berperan aktif dalam membentuk karakter generasi muda dan memelihara nilai-nilai budaya lokal, meskipun ukuran dan fokusnya mungkin berbeda. (Suyanto, 2016)

3. Pemilukada

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan proses politik yang krusial dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Pada Pemilukada

Kendal 2020, wilayah tersebut menjadi sorotan karena dinamika politik yang menarik. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kendal adalah kabupaten yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Pemilukada ini menjadi penting karena menentukan arah kebijakan dan pembangunan di kabupaten tersebut selama periode mendatang. Kampanye politik diisi dengan beragam isu, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Terdapat persaingan yang ketat antara calon-calon dari berbagai partai politik dan latar belakang, yang menunjukkan pluralitas politik dan kompetisi yang sehat.

Namun, tidak dapat dihindari bahwa pemilukada ini juga diwarnai oleh polarisasi politik, adu narasi, dan taktik kampanye yang kontroversial. Faktor-faktor seperti dukungan partai politik, popularitas calon, dan isu-isu sensitif juga memainkan peran penting dalam menentukan hasil pemilukada tersebut. Selain itu, Pemilukada Kendal 2020 juga berlangsung di tengah pandemi COVID-19, yang memberikan tantangan tambahan dalam hal penyelenggaraan dan partisipasi publik. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilukada ini menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dan komitmen untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu memajukan Kabupaten Kendal ke depan. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan proses politik yang krusial dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung.

Pada Pemilukada Kendal 2020, wilayah tersebut menjadi sorotan karena dinamika politik yang menarik. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kendal adalah kabupaten yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Pemilukada ini menjadi penting karena menentukan arah kebijakan dan pembangunan di kabupaten tersebut selama periode mendatang. Kampanye politik diisi dengan beragam isu, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Terdapat persaingan yang ketat antara calon-calon dari berbagai partai politik dan latar belakang, yang menunjukkan pluralitas politik dan kompetisi yang sehat.

Namun demikian, pemilukada ini juga diwarnai oleh polarisasi politik yang dapat memecah belah masyarakat. Taktik-taktik politik yang keras dan serangan personal antar calon seringkali menjadi sorotan dalam pemilukada tersebut. Terlebih lagi, peran media massa dan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi dan narasi politik turut memengaruhi opini publik dan dinamika kampanye. Selain itu, kendati berlangsung di tengah pandemi COVID-19,

penyelenggaraan pemilu harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, memicu perdebatan tentang dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan keabsahan hasil pemilu.

Meskipun demikian, tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara menunjukkan kesadaran politik yang tinggi di Kabupaten Kendal. Masyarakat secara aktif mengikuti perkembangan kampanye dan program-program yang diusung oleh calon-calon yang bertarung. Pemilu Kendal 2020 juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi dan keinginan mereka terhadap masa depan Kabupaten Kendal, serta menilai kinerja pemerintah sebelumnya. Dengan demikian, meskipun terdapat berbagai tantangan dan dinamika politik yang kompleks, pemilu ini merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan partisipasi politik masyarakat di Indonesia.

4. Politik dalam Perspektif Islam

Politik dalam perspektif Islam adalah upaya pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan ajaran-ajaran Islam. Ini mencakup pengaturan kebijakan dan tata kelola yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam kepemimpinan. Politik dalam Islam mencakup prinsip-prinsip seperti syura (musyawarah), amar ma'ruf nahi munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan), adil dan setara dalam distribusi kekayaan, serta tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pemahaman politik dalam perspektif Islam juga dapat mencakup konsep negara Islam atau negara berdasarkan hukum syariah (khilafah) (Nahdli, 2017).

Politik dalam perspektif Islam adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan bukan hanya masalah duniawi. Konsep kepemimpinan Islam menyatakan bahwa para pemimpin harus mengikuti nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang ditetapkan oleh agama Islam. Pemimpin harus bertindak sebagai pelayan bagi rakyatnya, memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, dan melindungi hak-hak mereka dengan segenap keadilan dan kejujuran. Dalam Islam, prinsip musyawarah dan syura memungkinkan partisipasi politik, di mana keputusan politik dibuat secara kolektif dengan mempertimbangkan pandangan dan perspektif semua pihak yang terlibat (Hashmi, 2012).

Selain itu, politik Islam menekankan pentingnya adil dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penegakan hukum, penyediaan layanan publik, dan pembagian sumber daya. Konsep Maqasid al-Shariah, yang menempatkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama hukum Islam, bersumber dari prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, politik harus terkait dengan nilai-nilai moral dan etis, dan harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap Allah SWT dan umat manusia (An-Na'im, 2010).

Konsep politik Islam juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, dengan sistem politik yang ideal terdiri dari keadilan sosial dan keberpihakan kepada kaum lemah. Dalam visi politik mereka, partai politik berbasis Islam sering menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan redistribusi kekayaan bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Selain itu, Islam menetapkan aturan tentang hubungan antara negara dan agama, yang berarti bahwa kebijakan publik dan hukum negara harus sesuai dengan ajaran agama Islam (An-Na'im, 2010).

Dengan definisi konseptual ini, Penulis dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dua elemen penting dalam penelitian. Ini akan membantu peneliti dalam merancang metodologi penelitian dan menganalisis hubungan antara partai politik berbasis pondok pesantren dan pandangan politik dalam perspektif Islam, terutama dalam konteks Pemilu 2020 di Kabupaten Kendal.

Dalam pandangan Islam, politik memiliki aspek spiritual selain duniawi. Konsep politik Islam menekankan betapa pentingnya untuk menerapkan prinsip moral, keadilan, dan kesejahteraan di seluruh masyarakat. Quran, misalnya, dalam surah an-Nisa ayat 59, disebutkan bahwa perintah mengikuti perintah Allah, Rasul, dan pemerintah, yang dalam ayat ini disebut dengan istilah "ulul amri." Umat Islam diharapkan untuk mematuhi otoritas yang sah selain mematuhi perintah-perintah Allah dan ajaran Nabi SAW dalam hal politik dan sosial.

Surah An-Nisa' · Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَارَ عَنْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Penjelasan dari ayat ini adalah bahwa umat Islam diwajibkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, serta para pemimpin atau ulil amri yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Ulil amri dapat diartikan sebagai para pemimpin atau otoritas yang ditunjuk untuk memimpin dan mengatur urusan umat. Keterkaitannya dengan penelitian Anda tentang "Partai Politik Berbasis Pondok Pesantren" dapat diuraikan sebagai berikut:

Otoritas dan Kepemimpinan: Ayat ini menegaskan pentingnya mentaati para pemimpin atau otoritas yang sah dalam Islam. Dalam konteks penelitian Anda, pondok pesantren sering kali dipimpin oleh kyai atau ulama yang dihormati dan dianggap memiliki otoritas moral di masyarakat. Para pemimpin pesantren tersebut memiliki peran penting dalam membimbing umat dan mempengaruhi pandangan politik mereka.

Konsultasi dan Penyelesaian Perselisihan: Ayat ini juga menunjukkan pentingnya konsultasi dan penyelesaian perselisihan secara bijaksana. Dalam konteks politik, partai politik berbasis pondok pesantren dapat menggunakan prinsip konsultasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan politik dan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara anggotanya.

Mengacu pada Al-Quran dan Sunnah: Ayat ini menekankan pentingnya mengambil pedoman dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dalam mengatur urusan masyarakat. Dalam konteks penelitian Anda, partai politik berbasis pondok pesantren dapat mengambil inspirasi dan pedoman dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah untuk merumuskan kebijakan dan program-program politiknya.

Dengan memasukkan dalil dari Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 59 ke dalam teori penelitian, dapat menunjukkan bahwa pendekatan politik yang dijalankan oleh partai politik berbasis pondok pesantren memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Hal ini dapat memberikan legitimasi dan kekuatan moral pada upaya politik yang dilakukan oleh partai politik tersebut, serta menunjukkan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Islam dalam memimpin dan mengatur masyarakat.

B. Teori Politik Identitas Fukuyama

1. Asumsi Dasar

Politik identitas menurut Francis Fukuyama adalah konsep yang memainkan peran penting dalam dinamika politik dan dapat terbentuk melalui berbagai faktor, termasuk agama, budaya, atau bahkan afiliasi politik. Konsep ini memberikan wawasan yang berharga dalam konteks penelitian tentang ‘Partai Politik Berbasis Pondok Pesantren (Studi Kasus di Kabupaten Kendal dalam Pemilu 2020).’ Dalam konteks Pondok Pesantren dan pemilu, identitas agama dan budaya mungkin menjadi faktor sentral yang membentuk dukungan politik dan preferensi pemilih. Identitas Islam, dalam hal ini, bisa menjadi elemen kunci dalam membentuk preferensi politik di Kabupaten Kendal, di mana Pondok Pesantren memiliki pengaruh yang signifikan. (Fukuyama, 2018)

Teori identitas yang dikemukakan oleh Fukuyama menekankan pentingnya inklusi dan eksklusivitas dalam politik identitas. Menurut teori ini, pertanyaan penting adalah sejauh mana berbagai entitas politik mampu memasukkan beragam identitas ke dalam platform dan agenda politik mereka. Hal ini dapat memengaruhi sejauh mana entitas-entitas tersebut dapat mendapatkan dukungan lintas identitas. Oleh karena itu, dalam analisis dinamika politik, penting untuk mempertimbangkan bagaimana identitas politik yang terbentuk dapat memengaruhi dinamika politik dan strategi berbagai entitas politik. (Fukuyama, 2018) Asumsi dasar teori politik identitas Fukuyama adalah bahwa identitas politik adalah unsur yang mendasar dalam pemahaman perilaku politik individu dan kelompok. Salah satu asumsi kunci dalam teorinya adalah bahwa manusia secara inheren memiliki kebutuhan untuk diakui dan diidentifikasi oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Identitas politik, seperti identitas agama, etnis, atau budaya, memainkan peran krusial dalam membentuk preferensi politik dan orientasi pemilih. Fukuyama menganggap bahwa identitas ini tidak hanya mencakup faktor-faktor sosial dan budaya, tetapi juga berakar dalam kebutuhan manusia untuk merasa bagian dari komunitas yang lebih besar. (Fukuyama, 2018)

Selain itu, Fukuyama berpendapat bahwa identitas politik bukanlah fenomena statis, tetapi dapat berubah seiring waktu dan situasi politik. Identitas dapat diperkuat atau dilemahkan oleh isu-isu politik tertentu, kampanye politik, atau perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian Anda tentang partai politik berbasis Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal, pemahaman terhadap asumsi dasar teori identitas Fukuyama dapat

membantu menjelaskan bagaimana identitas politik di kalangan pemilih dan aktor politik dalam Pondok Pesantren dapat berubah atau berkembang seiring dengan dinamika politik lokal dan nasional. Ini juga dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana partai politik memanfaatkan atau menghadapi perubahan dalam identitas politik ini untuk mencapai tujuan politik mereka. (Fukuyama, 2018)

2. Istilah-istilah kunci dalam teori politik Identitas Fukuyama

Identitas Politik: Ini adalah istilah sentral dalam teori Fukuyama yang mengacu pada cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik. Identitas politik dapat mencakup aspek-aspek seperti identitas agama, etnis, budaya, atau sosial yang memengaruhi preferensi politik seseorang.

- 1) Inklusi dan Eksklusi: Ini merujuk pada cara kelompok-kelompok politik atau masyarakat memasukkan atau mengecualikan individu atau kelompok lain dalam pembentukan identitas politik mereka. Pertanyaan tentang sejauh mana suatu kelompok bersedia memasukkan kelompok lain dalam identitas politiknya dapat memiliki dampak signifikan pada dinamika politik. (Fukuyama, 2018)
- 2) Perubahan Identitas Politik: Fukuyama menggarisbawahi fleksibilitas identitas politik. Ini berarti identitas politik dapat berubah seiring waktu dan pengaruh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, atau politik. Perubahan ini bisa signifikan dalam konteks perubahan orientasi politik individu atau kelompok. (Fukuyama, 2018)
- 3) Kebutuhan akan Pengakuan: Fukuyama menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diakui dan diidentifikasi oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Kebutuhan ini dapat memainkan peran penting dalam pembentukan identitas politik dan motivasi politik. (Fukuyama, 2018)
- 4) Kohesi Sosial: Ini mengacu pada konsep bahwa identitas politik dapat menjadi perekat yang mempersatukan anggota kelompok dalam masyarakat. Kohesi sosial sering kali muncul ketika individu merasa terkait dengan identitas politik yang sama. (Fukuyama, 2018)
- 5) Isu Identitas: Dalam konteks politik, isu-isu identitas merujuk pada masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas seperti agama, etnisitas, atau budaya yang menjadi fokus dalam kompetisi politik dan perdebatan publik. (Fukuyama, 2018)

Menguraikan istilah-istilah ini dengan lebih rinci dalam sub bab akan membantu peneliti memahami kerangka teoretis Fukuyama dalam konteks penelitian tentang partai politik berbasis Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal dan pemilihan umum.

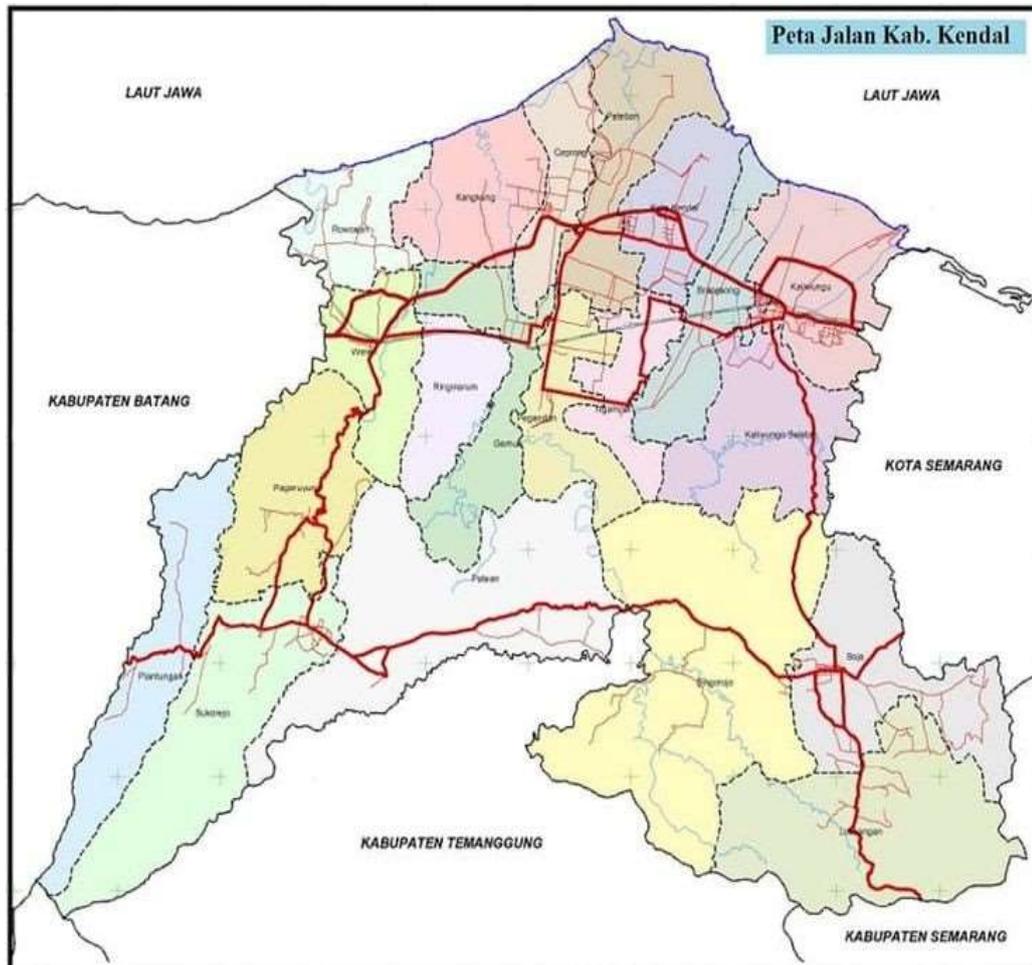
BAB III

PARTAI POLITIK DAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN KENDAL

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang gambaran umum penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian pemilu pada 2020 Kabupaten Kendal. Untuk menambah informasi, penulis dapat memberikan penjelasan tentang sejarah Kabupaten Kendal sebelum memberikan temuan dalam penelitian ini.

A. GAMBARAN UMUM KAB. KENDAL

1. Kondisi Geografis



Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal*

Salah satu dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kendal. Geografis Kabupaten Kendal adalah pada 60°32'-70°24' Lintang Selatan dan 109°40'-110°18' Bujur Timur. Kabupaten Kendal berada di antara:

Wilayah Utara : Laut Jawa
Wilayah Timur : Kota Semarang
Wilayah Selatan : Kabupaten Temanggung
Wilayah Barat : Kabupaten Batang

Kabupaten Kendal terdiri dari 20 kecamatan dan 285 desa/kelurahan, dengan total luas 100.223 ha. Wilayah terbesar adalah Kecamatan Singorojo, dengan 11.932 ha, atau 11,91% dari total luas Kabupaten Kendal. Wilayah terendah adalah Kecamatan Ringinarum, dengan 2.350 ha, atau sekitar 2,34% dari total luas Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal memiliki kondisi geografis yang beragam, yang memengaruhi pola kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sekitar 1.010,59 kilometer persegi. Secara umum, topografi Kabupaten Kendal dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Daerah pegunungan terletak di bagian paling selatan Kabupaten Kendal, dengan ketinggian mencapai 0 hingga 2.579 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan suhu berkisar sekitar 25 derajat Celsius. Di bagian tengah terdapat daerah perbukitan, sementara di bagian utara terdapat dataran rendah dan pantai, dengan ketinggian antara 0 hingga 10 mdpl dan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celsius.

Kabupaten Kendal memiliki karakteristik geografis yang memengaruhi sektor ekonomi utamanya. Pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Kendal, didukung oleh lahan yang subur dan kondisi iklim yang cocok. Sekitar 75,92 persen dari total luas wilayah digunakan untuk pertanian, hutan, dan perkebunan. Tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai menjadi komoditas utama dalam pertanian di Kendal, sementara perkebunan juga memiliki peran penting dengan produksi kopi, cengkeh, dan karet.

Selain pertanian, industri juga menjadi sektor ekonomi yang penting di Kabupaten Kendal. Kawasan Industri Kendal (KIK) merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Tengah, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Kawasan ini terletak di dekat jalur transportasi utama seperti jalan tol dan pelabuhan, memudahkan distribusi produk-produk industri dari Kendal ke berbagai daerah lain di Indonesia.

Selain itu, Kabupaten Kendal juga memiliki potensi dalam sektor pariwisata. Dengan beragam atraksi alam seperti Gunung Prah, Pantai Lampu Satu, dan Danau Rawa Pening, Kendal menawarkan berbagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kegiatan wisata yang berkembang di Kabupaten Kendal juga membantu meningkatkan perekonomian lokal dan mendukung upaya diversifikasi sumber pendapatan masyarakat.

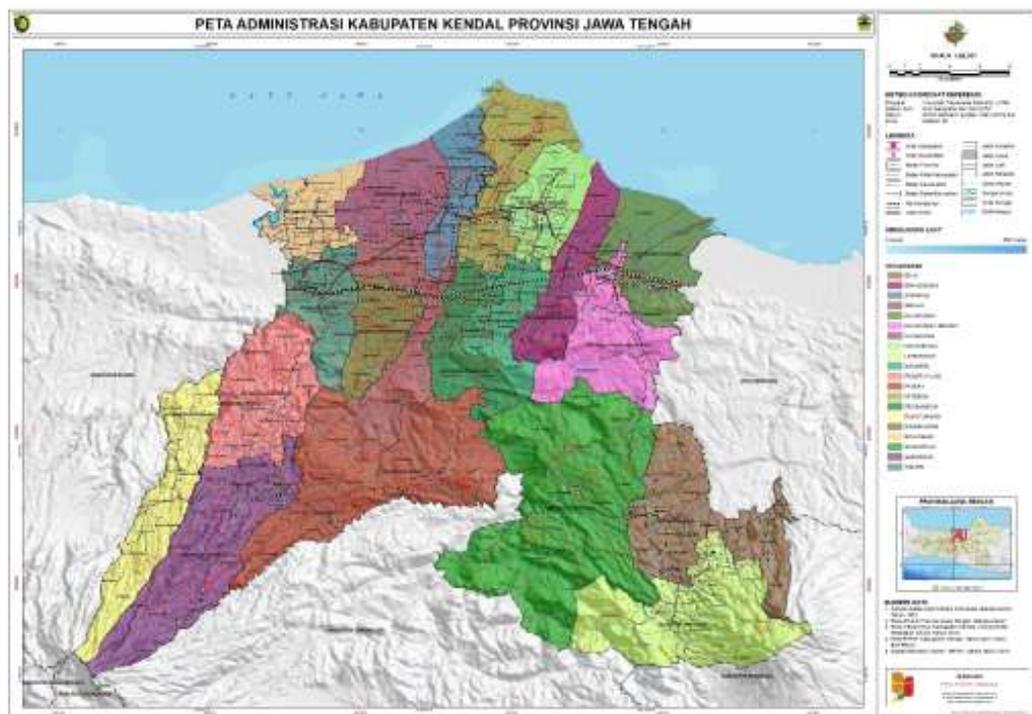
Dalam hal infrastruktur, Kabupaten Kendal memiliki jaringan transportasi yang cukup baik, terutama dengan adanya akses jalan tol Trans Jawa dan jalan-jalan arteri

yang menghubungkan berbagai kota dan desa di Kendal. Namun, terdapat juga tantangan dalam hal aksesibilitas terhadap daerah-daerah pedesaan, di mana beberapa wilayah masih sulit dijangkau oleh sarana transportasi umum.

Kabupaten Kendal juga memiliki kondisi hidrologis yang penting, terutama dengan adanya Danau Rawa Pening yang berperan sebagai sumber air irigasi dan sumber daya perikanan bagi masyarakat sekitar. Namun, tantangan terkait polusi air dan degradasi lingkungan juga perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kondisi geografis Kabupaten Kendal memiliki peran yang signifikan dalam menentukan perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah bersama dengan berbagai stakeholder terkait diharapkan dapat melakukan upaya yang terkoordinasi untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi tantangan yang ada dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kendal.

2. Kondisi Topografi



Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal*

Topografi Kabupaten Kendal terdiri dari tiga kategori: daerah pegunungan di bagian paling selatan memiliki ketinggian antara 0 dan 2.579 mdpl dan suhu berkisar antara 25 derajat Celcius; daerah perbukitan di bagian tengah dan daratan rendah; dan

pantai di bagian utara memiliki ketinggian antara 0-10 mdpl dan suhu berkisar antara 27 derajat Celcius.

Kabupaten Kendal adalah wilayah pertanian. Ini ditunjukkan oleh banyaknya lahan yang digunakan sebagai pertanian atau ladang. Dari seluruh luas lahan di Kabupaten Kendal, 75,92 persen digunakan untuk pertanian (sawah, tegalan, tambak, dan kolam), hutan dan perkebunan, dan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput, dan lahan yang sementara tidak digunakan.

Kecamatan Plantungan termasuk ke dalam kategori dataran tinggi dengan ketinggian 641 meter di atas permukaan laut, sedangkan Kecamatan Sukorejo berada di kisaran 560,00 meter, dan Kaliwungu adalah kecamatan dengan ketinggian tertinggi 4 meter di atas permukaan laut.

Secara garis besar, topografi Kabupaten Kendal terdiri dari lereng dan pegunungan yang bergerak dari selatan ke utara dan berakhir di utara sebagai dataran pantai utara. Dua gunung, prahu (bagian barat daya) dan ungaran (bagian tenggara), membentuk bagian selatan Kabupaten Kendal.

Topografi Kabupaten Kendal memiliki peran yang signifikan dalam menentukan ragam kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Dari segi kondisi geografis, Kabupaten Kendal dapat dibagi menjadi tiga kategori topografi yang berbeda. Daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan Kabupaten Kendal memiliki ketinggian yang bervariasi antara 0 hingga 2.579 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 25 derajat Celsius. Di bagian tengah, terdapat daerah perbukitan dan dataran rendah yang memberikan beragam kesempatan dalam bidang pertanian dan pembangunan lainnya. Sementara itu, di bagian utara terdapat pantai dengan ketinggian antara 0 hingga 10 mdpl, dengan suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celsius.

Kabupaten Kendal secara umum merupakan wilayah yang subur dan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini tercermin dari penggunaan lahan yang mayoritas digunakan untuk kegiatan pertanian, seperti sawah, tegalan, tambak, dan kolam ikan. Dari total luas lahan di Kabupaten Kendal, sekitar 75,92 persen digunakan untuk keperluan pertanian, hutan, perkebunan, dan sebagainya, sementara sisanya digunakan untuk keperluan pekarangan, padang rumput, dan lahan yang sementara tidak digunakan. Sejumlah kecamatan di Kendal juga menunjukkan variasi ketinggian yang signifikan. Misalnya, Kecamatan Plantungan terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar

641 meter di atas permukaan laut, sedangkan Kecamatan Sukorejo memiliki ketinggian sekitar 560 meter, dan Kaliwungu merupakan kecamatan dengan ketinggian tertinggi, yaitu 4 meter di atas permukaan laut.

Secara keseluruhan, topografi Kabupaten Kendal membentuk sebuah pola lereng yang bergerak dari selatan ke utara, yang berakhir di pantai utara. Keberadaan dua gunung, yaitu Gunung Prahu di bagian barat daya dan Gunung Ungaran di bagian tenggara, memperkaya keragaman topografi Kabupaten Kendal. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Kendal memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya, serta menjadi faktor penting dalam menentukan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat.

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2019 tercatat sebanyak 977.917 jiwa yang terdiri dari 495.488 jiwa penduduk laki-laki dan 482.429 jiwa penduduk perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 70.527 jiwa atau 7% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 30.506 jiwa atau sekitar 3% dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Dari 955.949 jiwa, tercatat jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Kendal sebanyak 266.595 rumah tangga, sehingga rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga adalah 4 orang. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak adalah Kecamatan Boja sebanyak 18.855 rumah tangga dan rumah tangga paling sedikit berada di Kecamatan Limbangan 8.586 rumah tangga. Kepadatan penduduk Kabupaten Kendal tahun 2014 adalah 954 jiwa/Km². Kecamatan terpadat adalah Weleri dan Kota Kendal dengan kepadatan penduduk 1948 jiwa/Km² dan Kota Kendal 1955 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Singorojo 432 jiwa/Km² dan Limbangan 445 jiwa/Km².

Kepadatan Penduduk

Kabupaten Kendal terdiri atas 20 Kecamatan dengan luas wilayah yang relative tidak sama. Diantara kecamatan di Kabupaten Kendal ada yang menjadi pusat wilayah dengan penduduk pada, juga ada wilayah yang penduduknya sedikit.

Konsentrasi penduduk tahun 2018 pada Kabupaten Kendal secara total sebesar 991.686 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Weleri, dengan luasan Kecamatan 30,29 Km² dan jumlah penduduk 60.167 jiwa didapat

kepadatan penduduk 6.07% merupakan presentase tertinggi dibanding kecamatan yang lain. sedangkan kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan Plantungan, hanya 31.871 jiwa/Km2 dengan tingkat kepadatan 3.21%. (Disdukcapil, 2019, p. 1)

Jumlah penduduk di Kabupaten Kendal diuraikan berdasarkan kecamatan:

Tabel 2

Jumlah Penduduk per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL								
No	Kecamatan		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.24.01	PLANTUNGAN	16,284	51.09%	15,587	48,91%	31,871	3,21%
2	33.24.02	PAGERUYUNG	18,071	51.31%	17,151	48,69%	35,222	3,55%
3	33.24.03	SUKOREJO	30,017	51.36%	28,425	48,64%	58,442	5,89%
4	33.24.04	PATEAN	26,101	50.95%	25,132	49,05%	51,233	5,17%
5	33.24.05	SINGOROJO	26,155	50.45%	25,693	49,55%	51,848	5,23%
6	33.24.06	LIMBANGAN	17,392	50.43%	17,094	49,57%	34,486	3,48%
7	33.24.07	BOJA	37,967	50.28%	37,549	49,72%	75,516	7,61%
8	33.24.08	KALIWUNGU	30,804	50.16%	30,605	49,84%	61,409	6,19%
9	33.24.09	BRANGSONG	25,076	50.63%	24,450	49,37%	49,526	4,99%
10	33.24.10	PEGANDON	19,158	50.12%	19,069	49,88%	38,227	3,85%
11	33.24.11	GEMUH	26,100	50.3%	25,787	49,7%	51,887	5,23%
12	33.24.12	WELERI	30,309	50.37%	29,858	49,63%	60,167	6,07%
13	33.24.13	CEPIRING	26,273	49.89%	26,393	50,11%	52,666	5,31%
14	33.24.14	PATEBON	29,750	50.28%	29,413	49,72%	59,163	5,97%
15	33.24.15	KENDAL	28,821	50.12%	28,682	49,88%	57,503	5,8%
16	33.24.16	ROWOSARI	26,472	50.34%	26,118	49,66%	52,590	5,3%
17	33.24.17	KANGKUNG	25,007	50.09%	24,913	49,91%	49,920	5,03%
18	33.24.18	RINGINARUM	18,799	50.99%	18,072	49,01%	36,871	3,72%
19	33.24.19	NGAMPEL	18,008	50.32%	17,782	49,68%	35,790	3,61%
20	33.24.20	KALIWUNGU SELATAN	23,882	50.44%	23,467	49,56%	47,349	4,77%
Jumlah			500,446	50,46%	491,240	49,54%	991,686	0.00
Jumlah Total			500,446	50,46%	491,240	49,54%	991,686	0.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah salah satu daerah yang mengalami kenaikan penduduk yang relatif cepat dan tingkat kenaikan yang stabil. Ini terlihat pada jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Kendal pada tahun 2018 sebesar 488.618 jiwa, naik lagi pada tahun 2019 sebesar 492.113 jiwa, dan naik lagi pada tahun 2020 sebesar 495.488 jiwa. Kenaikan ini dapat dianggap sebagai kenaikan yang stabil karena setiap tahunnya jumlah penduduknya meningkat.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
2010	457 275	457 275	444 710	444 710	901 985	901 985
2011	461 577	461 577	448 917	448 917	910 494	910 494
2012	465 800	465 800	452 998	452 998	918 798	918 798
2013	469 874	469 874	456 917	456 917	926 791	926 791
2014	473 802	473 802	460 825	460 825	934 627	934 627
2015	477 675	477 675	464 608	464 608	942 283	942 283
2016	481 382	481 382	468 300	468 300	949 682	949 682
2017	485 102	485 102	471 922	471 922	957 024	957 024
2018	488 618	488 618	475 488	475 488	964 106	964 106
2019	492 113	492 113	478 973	478 973	971 086	971 086
2020	495 488	-	482 429	-	977 917	-

Sumber:<https://kendalkab.bps.go.id/indicator/12/388/1/proyeksi-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>

Penduduk Berdasarkan Umur

Tabel berikut menunjukkan populasi perkecamatan berdasarkan usia 0–14 tahun:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL														
No	Kecamatan		0-4				5-9				10-14			
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	33.24.01	PLANTUNGAN	866	806	1.672	5,25%	1.216	1.188	2.404	7,54%	1.222	1.119	2.341	7,35%
2	33.24.02	PAGERUTUNG	1.131	1.005	2.136	6,66%	1.477	1.381	2.858	8,11%	1.362	1.225	2.587	7,34%
3	33.24.03	SUKOREJO	1.657	1.592	3.229	5,55%	2.531	2.406	4.937	8,45%	2.244	2.180	4.424	7,57%
4	33.24.04	PATEAN	1.532	1.501	3.033	9,96%	2.232	2.014	4.246	8,29%	1.919	1.914	3.833	7,48%
5	33.24.05	SINGOROJO	1.708	1.603	3.310	6,58%	2.219	2.155	4.374	8,44%	2.087	2.017	4.104	7,92%
6	33.24.06	LIMBANGAN	1.091	1.128	2.219	6,43%	1.461	1.332	2.793	8,1%	1.254	1.176	2.430	7,05%
7	33.24.07	BOJA	2.650	2.404	5.054	8,69%	3.233	2.945	6.178	8,18%	3.012	2.791	5.803	7,68%
8	33.24.08	KALIWUNGU	2.037	2.020	4.047	6,59%	2.663	2.522	5.185	8,44%	2.445	2.332	4.777	7,78%
9	33.24.09	BRANGSONG	1.659	1.665	3.324	6,71%	2.074	1.874	3.948	7,97%	1.913	1.718	3.631	7,33%
10	33.24.10	PEGANDOM	1.280	1.144	2.424	6,34%	1.589	1.510	3.099	8,11%	1.444	1.339	2.783	7,28%
11	33.24.11	GEMUH	1.538	1.447	2.985	5,75%	2.158	2.081	4.239	8,17%	1.932	1.796	3.728	7,18%
12	33.24.12	WELERI	1.897	1.743	3.639	6,05%	2.449	2.297	4.746	7,89%	2.269	2.125	4.394	7,3%
13	33.24.13	CEPKING	1.698	1.625	3.323	6,31%	2.199	2.064	4.263	8,09%	1.871	1.829	3.700	7,03%
14	33.24.14	PATEBON	1.958	1.909	3.867	6,54%	2.475	2.371	4.846	8,19%	2.214	1.977	4.191	7,08%
15	33.24.15	KENDAL	1.991	1.948	3.937	6,85%	2.463	2.303	4.666	8,11%	2.220	2.138	4.358	7,58%
16	33.24.16	ROWOSARI	1.840	1.507	3.147	5,98%	2.171	2.012	4.183	7,95%	1.824	1.762	3.586	6,82%
17	33.24.17	KANGKUNG	1.632	1.488	3.120	6,25%	1.991	1.951	3.942	7,9%	1.794	1.750	3.544	7,1%
18	33.24.18	RINGINARUM	978	935	1.913	5,19%	1.371	1.312	2.683	7,28%	1.311	1.182	2.493	6,76%
19	33.24.19	NGAMPAL	1.212	1.142	2.354	6,58%	1.543	1.434	2.957	8,28%	1.327	1.270	2.597	7,26%
20	33.24.20	KALIWUNGU SELATAN	1.510	1.451	3.001	6,34%	1.891	1.849	3.740	7,9%	1.905	1.798	3.703	7,82%
Jumlah			31.705	30.049	61.754	6,23%	41.406	38.881	80.287	8,1%	37.569	35.438	73.007	7,36%
Jumlah Total			31.705	30.049	61.754	6,23%	41.406	38.881	80.287	8,1%	37.569	35.438	73.007	7,36%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki data kependudukan yang mencerminkan keragaman sosial, ekonomi, dan demografis. Menurut data terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Kendal terus bertambah, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Dengan populasi yang terus berkembang, kabupaten ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan politik di wilayah tersebut.

Data kependudukan memberikan gambaran tentang komposisi usia penduduk di Kabupaten Kendal. Seperti banyak daerah di Indonesia, Kabupaten Kendal memiliki struktur piramida penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk yang lebih banyak pada kelompok usia muda. Namun, ada juga peningkatan jumlah penduduk di kelompok usia lanjut, menandakan adanya peningkatan harapan hidup dan penurunan tingkat kematian.

Dalam konteks demografi, data kependudukan Kabupaten Kendal juga mencerminkan ragam suku dan etnis. Meskipun mayoritas penduduknya adalah Jawa, terdapat juga minoritas etnis seperti Sunda, Batak, dan Tionghoa, yang memberikan warna dan keberagaman budaya di wilayah tersebut. Keharmonisan antar-etnis menjadi salah satu ciri khas masyarakat Kendal.

Pola migrasi juga merupakan faktor penting dalam data kependudukan Kabupaten Kendal. Sebagian besar migrasi terjadi dari desa ke kota, dengan penduduk pedesaan yang mencari peluang ekonomi dan pendidikan di pusat-pusat perkotaan seperti Kecamatan Kendal dan sekitarnya. Namun, ada juga kecenderungan sebaliknya, dengan beberapa penduduk kota yang memilih kembali ke desa untuk memulai usaha pertanian atau industri kecil.

Selain itu, data kependudukan juga menggambarkan tingkat pendidikan dan tingkat melek huruf di Kabupaten Kendal. Ada peningkatan yang signifikan dalam akses pendidikan, dengan lebih banyak penduduk yang menerima pendidikan formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Tingkat melek huruf yang meningkat merupakan indikator kemajuan sosial dan ekonomi di wilayah ini.

Data kependudukan juga memberikan informasi tentang tingkat pengangguran dan lapangan kerja di Kabupaten Kendal. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, masih ada tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang cepat. Inisiatif untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal dan memperluas kesempatan kerja terus ditingkatkan.

Tingkat urbanisasi adalah aspek penting dalam data kependudukan Kabupaten Kendal. Dengan pertumbuhan kota dan perkembangan infrastruktur, lebih banyak penduduk bermigrasi ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan dan peluang hidup yang lebih baik. Hal ini berdampak pada tata ruang perkotaan dan permukiman, serta menimbulkan tantangan baru dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur perkotaan.

Selain itu, data kependudukan juga mencakup informasi tentang komposisi keluarga dan pola kehidupan rumah tangga. Perubahan dalam struktur keluarga, seperti peningkatan jumlah keluarga kecil dan tingkat kelahiran yang menurun, memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Kabupaten Kendal. Pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya untuk menyediakan dukungan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga modern.

Data kependudukan di Kabupaten Kendal juga menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Informasi tentang jumlah penduduk, distribusi geografis, dan karakteristik demografis lainnya digunakan untuk merumuskan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam keseluruhan, data kependudukan menjadi landasan penting dalam pemahaman tentang dinamika sosial, ekonomi, dan demografi di Kabupaten Kendal. Dengan memahami tren dan pola yang tergambar dari data ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan

Kabupaten/Wilayah : 33.24 KENDAL														
No	Kecamatan		15-19				20-24				25-29			
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	33.24.01	PLANTUNGAN	1.194	1.136	2.330	7,51%	1.281	1.218	2.499	7,84%	1.346	1.242	2.588	8,12%
2	33.24.02	PAGERIJUNG	1.313	1.211	2.524	7,37%	1.404	1.355	2.757	7,77%	1.433	1.359	2.792	7,93%
3	33.24.03	SUKOREJO	2.328	2.188	4.514	7,72%	2.340	2.176	4.513	7,34%	2.282	2.235	4.517	7,73%
4	33.24.04	PATEAN	1.942	1.980	3.922	7,58%	2.123	1.925	4.048	7,3%	2.038	1.902	3.940	7,89%
5	33.24.05	SINGOROJO	1.864	1.884	3.748	7,23%	2.005	2.021	4.026	7,77%	2.152	2.019	4.171	8,04%
6	33.24.06	LIMBANGAN	1.268	1.208	2.476	7,18%	1.394	1.387	2.781	8,06%	1.378	1.391	2.769	8,03%
7	33.24.07	BOJA	2.813	2.863	5.676	7,52%	3.062	3.094	6.156	8,03%	3.103	3.071	6.174	8,18%
8	33.24.08	KALIWUNGU	2.390	2.246	4.636	7,55%	2.479	2.423	4.902	7,88%	2.378	2.487	5.073	8,24%
9	33.24.09	BRANGSONG	1.863	1.793	3.646	7,36%	2.121	2.099	4.219	8,32%	2.232	2.215	4.347	8,78%
10	33.24.10	PEGANDON	1.405	1.298	2.701	7,07%	1.409	1.463	2.872	7,51%	1.571	1.502	3.073	8,04%
11	33.24.11	GEMUH	1.848	1.794	3.642	7,05%	2.068	2.008	4.071	7,89%	2.112	2.088	4.180	8,01%
12	33.24.12	WELERI	2.290	2.202	4.492	7,47%	2.483	2.326	4.791	7,87%	2.588	2.370	4.958	8,28%
13	33.24.13	CEPRING	1.895	1.878	3.743	7,11%	2.079	2.057	4.136	7,89%	2.140	2.088	4.228	8,05%
14	33.24.14	PATERON	2.259	2.125	4.381	7,4%	2.442	2.384	4.826	8,16%	2.577	2.483	5.060	8,53%
15	33.24.15	KENDAL	2.236	2.124	4.360	7,38%	2.399	2.332	4.728	8,22%	2.448	2.315	4.763	8,28%
16	33.24.16	KOWOSARI	2.085	2.113	4.198	7,99%	2.245	2.234	4.479	8,52%	2.400	2.371	4.771	8,89%
17	33.24.17	KANGRUNG	1.932	1.820	3.752	7,56%	1.830	1.820	3.650	7,37%	1.913	1.870	3.783	7,93%
18	33.24.18	RINGHARUM	1.296	1.240	2.546	6,9%	1.489	1.408	2.894	7,85%	1.602	1.512	3.114	8,33%
19	33.24.19	NGAMPIL	1.268	1.194	2.463	6,88%	1.318	1.298	2.614	7,3%	1.484	1.474	2.958	8,21%
20	33.24.20	KALIWUNGU SELATAN	1.817	1.788	3.605	7,87%	2.008	1.924	3.932	8,3%	2.003	1.972	3.975	8,46%
Jumlah			37.402	36.052	73.454	7,41%	39.958	38.839	78.797	7,95%	41.433	39.667	81.100	8,18%
Jumlah Total			37.402	36.052	73.454	7,41%	39.958	38.839	78.797	7,95%	41.433	39.667	81.100	8,18%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan

Kabupaten/Wilayah : 33.24 KENDAL														
No	Kecamatan		30-34				35-39				40-44			
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	33.24.01	PLANTUNGAN	1.397	1.280	2.660	8,59%	1.314	1.219	2.533	7,99%	1.300	1.077	2.377	6,89%
2	33.24.02	PAGERIJUNG	1.506	1.435	2.941	8,95%	1.455	1.376	2.831	8,04%	1.371	1.182	2.553	6,71%
3	33.24.03	SUKOREJO	2.479	2.310	4.789	8,19%	2.625	2.371	4.996	8,59%	2.233	2.213	4.446	7,81%
4	33.24.04	PATEAN	2.018	1.921	3.939	7,69%	2.064	1.988	4.052	7,93%	1.912	1.917	3.829	7,47%
5	33.24.05	SINGOROJO	2.037	2.063	4.120	7,95%	2.137	2.090	4.227	8,15%	1.897	1.927	3.824	7,58%
6	33.24.06	LIMBANGAN	1.287	1.118	2.403	7,35%	1.371	1.157	2.528	7,87%	1.389	1.289	2.588	7,45%
7	33.24.07	BOJA	3.010	2.961	5.971	7,92%	3.117	3.111	6.228	8,38%	2.700	2.763	5.463	7,23%
8	33.24.08	KALIWUNGU	2.670	2.555	5.225	8,51%	2.650	2.641	5.291	8,82%	2.282	2.360	4.642	7,59%
9	33.24.09	BRANGSONG	2.095	2.008	4.104	8,39%	2.069	2.017	4.086	8,29%	1.767	1.761	3.528	7,12%
10	33.24.10	PEGANDON	1.635	1.582	3.217	8,44%	1.694	1.694	3.388	8,67%	1.482	1.535	3.017	7,82%
11	33.24.11	GEMUH	2.301	2.215	4.516	8,7%	2.388	2.189	4.577	8,52%	2.107	2.051	4.158	8,01%
12	33.24.12	WELERI	2.582	2.398	4.980	8,29%	2.448	2.478	4.927	8,19%	2.320	2.295	4.615	7,67%
13	33.24.13	CEPRING	2.238	2.148	4.374	8,52%	2.190	2.150	4.340	8,24%	1.837	2.050	3.887	7,58%
14	33.24.14	PATERON	2.518	2.405	4.923	8,52%	2.340	2.389	4.729	7,99%	1.997	2.125	4.122	8,57%
15	33.24.15	KENDAL	2.429	2.377	4.806	8,36%	2.297	2.378	4.674	8,13%	2.011	2.017	4.028	7,01%
16	33.24.16	KOWOSARI	2.361	2.080	4.441	8,47%	2.056	2.118	4.174	7,94%	1.788	1.951	3.739	7,11%
17	33.24.17	KANGRUNG	2.076	2.171	4.247	8,52%	1.944	2.043	3.987	7,99%	1.902	1.896	3.798	7,61%
18	33.24.18	RINGHARUM	1.721	1.494	3.215	8,69%	1.500	1.333	2.833	8,21%	1.581	1.576	3.157	8,57%
19	33.24.19	NGAMPIL	1.634	1.553	3.187	8,05%	1.500	1.537	3.037	8,5%	1.313	1.376	2.689	7,33%
20	33.24.20	KALIWUNGU SELATAN	1.940	1.881	3.821	8,07%	1.931	1.937	3.868	8,17%	1.729	1.762	3.491	7,37%
Jumlah			41.924	40.188	82.112	8,28%	40.879	40.668	81.546	8,22%	36.454	37.166	73.620	7,42%
Jumlah Total			41.924	40.188	82.112	8,28%	40.879	40.668	81.546	8,22%	36.454	37.166	73.620	7,42%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Data kependudukan Kabupaten Kendal berdasarkan kelompok umur memberikan gambaran yang penting tentang struktur usia penduduk di wilayah tersebut.

Kelompok usia ini mempengaruhi banyak aspek dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Berikut adalah deskripsi data kependudukan Kabupaten Kendal berdasarkan kelompok umur:

Bayi dan Balita (0-4 tahun): Kelompok usia ini mencerminkan tingkat kelahiran dan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kendal. Tingkat kematian bayi dan balita juga menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak.

Anak-anak (5-14 tahun): Data usia ini mencakup populasi pelajar dan mencerminkan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah. Tingkat partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan menjadi fokus dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah ini.

Remaja (15-24 tahun): Kelompok ini mencakup individu yang sedang dalam masa transisi dari pendidikan ke dunia kerja. Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi menjadi penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan.

Dewasa Muda (25-39 tahun): Merupakan kelompok usia produktif yang berperan dalam kegiatan ekonomi dan sosial di Kabupaten Kendal. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan menjadi kunci dalam memanfaatkan potensi mereka.

Dewasa (40-59 tahun): Kelompok ini sering kali menjadi tulang punggung keluarga dan masyarakat, terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi perhatian penting dalam menjaga kesejahteraan mereka.

Lansia (60-74 tahun): Mewakili kelompok usia yang memasuki masa pensiun dan memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan dan sosial. Program-program kesejahteraan lansia dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi penting dalam memastikan kualitas hidup mereka.

Lansia Lanjut (75 tahun ke atas): Merupakan kelompok usia yang rentan dan memerlukan perawatan ekstra dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan. Fokus pada pelayanan kesehatan jangka panjang dan dukungan sosial menjadi penting dalam menjaga kualitas hidup mereka.

Kelompok Umur Produktif (15-59 tahun): Menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Kendal. Program pelatihan

keterampilan, akses terhadap lapangan kerja yang layak, dan perlindungan sosial menjadi penting dalam memastikan kesejahteraan mereka.

Kelompok Usia Tidak Produktif (0-14 tahun dan 60 tahun ke atas): Kelompok ini memerlukan perhatian khusus dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pelayanan kesehatan pranatal, pendidikan anak usia dini, dan program kesejahteraan lansia menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Kelompok Usia yang Membutuhkan Perhatian Khusus (anak-anak di bawah 5 tahun dan lansia di atas 75 tahun): Merupakan kelompok yang memerlukan perhatian ekstra dalam pelayanan kesehatan dan sosial. Program-program pemberdayaan anak usia dini dan perawatan lansia menjadi penting dalam memastikan kesejahteraan mereka.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL														
No	Kode	Kecamatan Nama	45-49				50-54				55-59			
			Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
1	33.24.01	PLANTUNGAN	1.147	1.305	2.452	7,38%	1.067	1.163	2.229	6,99%	871	812	1.683	5,91%
2	33.24.02	PAGERUYUNG	1.211	1.219	2.430	6,9%	1.301	1.256	2.457	6,98%	1.079	1.005	2.114	6%
3	33.24.03	SUKOREJO	2.025	2.009	4.034	6,9%	1.877	1.856	3.733	6,39%	1.707	1.699	3.406	5,87%
4	33.24.04	PATEAN	1.834	1.847	3.681	7,18%	1.671	1.677	3.348	6,52%	1.482	1.468	2.950	5,76%
5	33.24.05	SINGOROHO	1.706	1.736	3.422	6,6%	1.837	1.704	3.541	6,44%	1.481	1.522	3.003	5,79%
6	33.24.06	UMBANGAN	1.185	1.308	2.373	6,88%	1.233	1.194	2.427	7,04%	1.021	976	1.997	5,79%
7	33.24.07	BOJA	2.580	2.675	5.255	6,96%	2.362	2.531	4.893	6,48%	2.153	2.101	4.254	5,63%
8	33.24.08	KALIWUNGU	2.145	2.252	4.397	7,16%	1.928	2.067	3.995	6,51%	1.693	1.701	3.394	5,59%
9	33.24.09	BRANGSONG	1.731	1.753	3.484	7,03%	1.570	1.709	3.279	6,62%	1.448	1.569	2.817	5,69%
10	33.24.10	PEGADON	1.243	1.322	2.567	6,73%	1.306	1.243	2.451	6,41%	1.025	1.127	2.152	5,63%
11	33.24.11	GENUH	1.683	1.812	3.495	6,74%	1.595	1.632	3.247	6,28%	1.472	1.491	2.963	5,71%
12	33.24.12	WELURI	1.937	2.116	4.053	6,74%	1.853	2.115	3.968	6,59%	1.752	1.867	3.619	6,01%
13	33.24.13	CEPRING	1.673	1.860	3.533	6,71%	1.779	1.896	3.676	6,58%	1.654	1.675	3.329	6,52%
14	33.24.14	PATEBORO	1.894	2.096	3.990	6,74%	2.024	2.201	4.225	7,14%	1.820	1.864	3.784	6,4%
15	33.24.15	KENDAL	1.909	2.060	3.977	6,92%	1.887	2.046	3.933	6,84%	1.682	1.809	3.491	6,07%
16	33.24.16	ROWOSARI	1.631	1.903	3.534	6,76%	1.748	1.713	3.461	6,58%	1.519	1.498	3.017	5,74%
17	33.24.17	NANGRONG	1.556	1.714	3.270	6,53%	1.656	1.709	3.365	6,74%	1.530	1.521	3.051	6,11%
18	33.24.18	BINGINARUM	1.303	1.335	2.638	7,15%	1.304	1.304	2.608	6,8%	1.101	1.005	2.116	5,79%
19	33.24.19	NGAMPEL	1.182	1.293	2.435	6,8%	1.341	1.340	2.681	6,65%	1.026	982	2.008	5,61%
20	33.24.20	KALIWUNGU SELATAN	1.736	1.736	3.472	7,33%	1.476	1.583	3.059	6,46%	1.332	1.235	2.567	5,42%
Jumlah			33.312	35.100	68.412	6,9%	32.114	33.861	65.975	6,65%	29.048	28.887	57.935	5,84%
Jumlah Total			33.312	35.100	68.412	6,9%	32.114	33.861	65.975	6,65%	29.048	28.887	57.935	5,84%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Kondisi demografis Kabupaten Kendal mencerminkan keberagaman etnis, agama, dan tingkat pendidikan di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, Kabupaten Kendal memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa, menjadikannya salah satu kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Tengah. Kepadatan penduduknya cukup tinggi, terutama di daerah perkotaan dan sekitarnya. Mayoritas penduduk Kendal adalah suku Jawa, namun terdapat juga minoritas suku Batak, Tionghoa, dan suku-suku lainnya yang memberikan warna dalam keragaman budaya di daerah ini.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, Kabupaten Kendal juga menunjukkan tingkat urbanisasi yang signifikan. Kota-kota dan pusat-pusat perkotaan

di Kendal, seperti Kota Kendal dan Kecamatan-ngaca-pinggir">Ngampel">Ngampel, mengalami pertumbuhan pesat dengan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota ini dalam pencarian peluang ekonomi dan lapangan kerja. Fenomena urbanisasi ini mempengaruhi pola permukiman, infrastruktur, dan layanan publik di Kabupaten Kendal.

Dalam hal tingkat pendidikan, Kabupaten Kendal telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakatnya. Sektor pendidikan di Kendal terdiri dari jaringan sekolah dasar, menengah, dan tinggi yang tersebar di seluruh kabupaten. Namun, tantangan dalam hal ketersediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas masih menjadi fokus pembangunan pendidikan di daerah ini.

Selain itu, demografi Kendal juga mencerminkan profil usia yang beragam. Terdapat peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang merupakan potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Kendal. Namun, perlu juga diperhatikan peningkatan jumlah lansia sebagai tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai bagi kelompok ini.

Dengan memahami kondisi demografis yang heterogen ini, pemerintah daerah, bersama dengan berbagai stakeholder terkait, diharapkan dapat merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Kendal serta meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakatnya.

Tabel 5

Tabel jumlah tenaga kerja berdasarkan kelompok umur per kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk 15 - 64 Tahun)		Jumlah Penduduk		Persentase Tenaga Kerja
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
1	PLANTUNGAN	23,807	3.17	34,153	3.19	69.71
2	PAGERUYUNG	26,349	3.51	38,213	3.57	68.95
3	SUKOREJO	44,272	5.89	63,511	5.94	69.71
4	PATEAN	38,700	5.15	55,490	5.19	69.74
5	SINGOROJO	38,381	5.11	55,638	5.20	68.98
6	LIMBANGAN	25,624	3.41	36,922	3.45	69.40
7	BOJA	58,711	7.81	84,332	7.88	69.62
8	KALIWUNGU	47,452	6.31	66,897	6.25	70.93
9	BRANGSONG	37,668	5.01	53,293	4.98	70.68
10	PEGANDON	28,569	3.80	40,538	3.79	70.47
11	GEMUH	39,030	5.19	55,254	5.17	70.64
12	WELERI	45,400	6.04	64,043	5.99	70.89
13	CEPIRING	39,271	5.23	55,396	5.18	70.89
14	PATEBON	44,984	5.99	63,558	5.94	70.78
15	KENDAL	43,561	5.80	61,642	5.76	70.67
16	ROWOSARI	39,982	5.32	56,663	5.30	70.56
17	KANGKUNG	37,312	4.96	53,230	4.98	70.10
18	RINGINARUM	28,459	3.79	39,835	3.72	71.44
19	NGAMPEL	26,727	3.56	38,258	3.58	69.86
20	KALIWUNGU SELATAN	37,262	4.96	52,729	4.93	70.67
Jumlah		751,521	100.00	1,069,595	100.00	70.26

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal, yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia, menawarkan beragam peluang pekerjaan yang mencakup berbagai sektor ekonomi. Pertanian menjadi salah satu pilar utama ekonomi di daerah ini, dengan lahan pertanian yang subur mendukung pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, kedelai, dan sayuran. Selain itu, sektor perikanan juga berkembang di Kabupaten Kendal berkat sungai-sungai yang melintasi wilayahnya dan Pantai Kartini di pantai utara, yang memberikan peluang bagi pekerjaan di bidang perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan pedagang ikan. Di samping itu, sektor industri manufaktur juga menawarkan banyak peluang pekerjaan, termasuk di industri tekstil, makanan, minuman, dan pengolahan hasil pertanian, yang mencakup berbagai peran mulai dari operator mesin hingga manajer pabrik. Pariwisata juga menjadi sektor penting, dengan pekerjaan di bidang pemandu wisata, pengelola hotel, dan agen perjalanan yang tersedia di Kabupaten Kendal. Di sektor perdagangan, terdapat peluang pekerjaan sebagai pedagang, karyawan toko, dan tenaga penjualan. Fasilitas kesehatan yang berkembang di Kabupaten Kendal, seperti rumah sakit dan klinik, menawarkan peluang pekerjaan di sektor kesehatan, termasuk sebagai dokter, perawat, dan bidan. Selain itu, sektor pendidikan, konstruksi, teknologi informasi, dan layanan publik juga menyediakan banyak peluang pekerjaan yang beragam bagi penduduk Kabupaten Kendal.

Tabel 6

Tabel jumlah agama di Kabupaten Kendal

No	Agama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	Islam	532,880	49.82	526,793	49.25	1,059,673	99.07
2	Kristen	2,612	0.24	2,830	0.26	5,442	0.51
3	Katholik	1,763	0.16	2,010	0.19	3,773	0.35
4	Hindu	152	0.01	126	0.01	278	0.03
5	Budha	137	0.01	141	0.01	278	0.03
6	Konghuchu	2	0	1	0	3	0.00
7	Kepercayaan	80	0.01	68	0.01	148	0.01
Jumlah		537,626	50.26	531,969	49.74	1,069,595	100.00

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal*

Kabupaten Kendal, yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki data demografi agama yang beragam. Islam adalah agama mayoritas di Kabupaten Kendal, dengan sebagian besar penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Mereka secara luas menganut ajaran Islam dan terlibat dalam praktik keagamaan seperti shalat lima waktu, puasa Ramadan, dan ibadah haji. Selain Islam, agama-agama lain juga diakui dan dihormati di Kabupaten Kendal, termasuk Kristen, Hindu, dan Buddha. Masing-masing memiliki komunitas yang signifikan dan terlibat dalam berbagai aktivitas keagamaan dan kegiatan sosial di wilayah tersebut.

Komposisi demografi agama di Kabupaten Kendal tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk budaya, tradisi, dan tatanan sosial. Praktik keagamaan dan ritual agama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, dan festival-festival keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak dirayakan dengan semangat dan kegembiraan oleh komunitas yang sesuai.

Data demografi agama juga memengaruhi struktur sosial dan politik di Kabupaten Kendal. Meskipun prinsip-prinsip kesetaraan dan toleransi agama dijunjung tinggi, ada juga dinamika politik lokal yang berkaitan dengan identitas keagamaan. Partai politik dan pemimpin masyarakat sering memperhitungkan sensitivitas agama dalam pembentukan kebijakan dan kampanye politik mereka.

Di samping itu, lembaga keagamaan seperti masjid, gereja, pura, dan vihara memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keagamaan dan sosial bagi

penduduk. Mereka sering menjadi pusat kegiatan komunitas dan tempat berkumpul untuk mengadakan kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Tingkat keberagaman agama di Kabupaten Kendal juga tercermin dalam sistem pendidikan. Sekolah-sekolah umum dan agama menyediakan pendidikan yang mencakup nilai-nilai keagamaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang pluralisme agama dan saling menghormati antaragama.

Pentingnya data demografi agama di Kabupaten Kendal juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan keagamaan masyarakat dengan membangun dan mendukung fasilitas keagamaan seperti tempat ibadah, pemakaman, dan pusat kegiatan keagamaan.

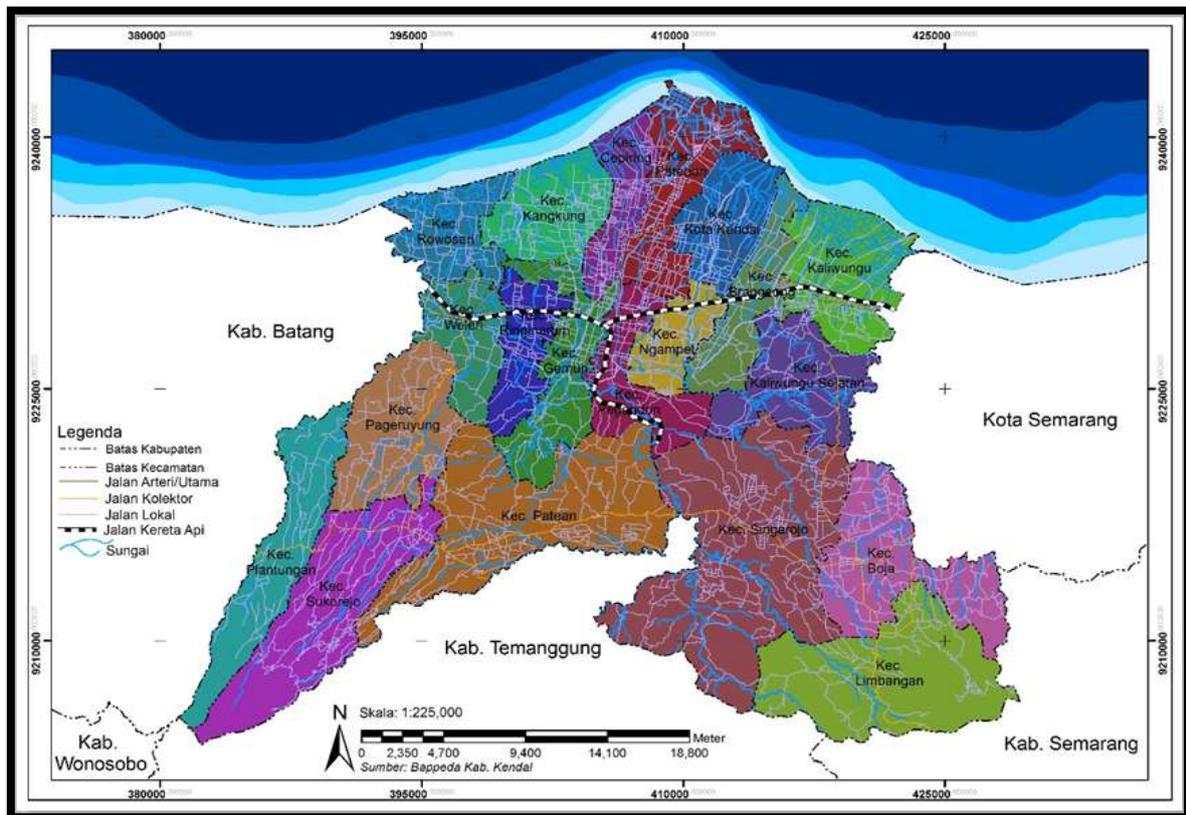
Selain itu, data demografi agama juga memengaruhi pola konsumsi dan ekonomi lokal di Kabupaten Kendal. Bisnis dan industri yang berhubungan dengan kebutuhan keagamaan seperti makanan halal, busana muslim, dan barang-barang keagamaan lainnya berkembang pesat untuk memenuhi permintaan pasar.

Dalam konteks demografi agama, juga terdapat kerja sama antaragama yang erat di Kabupaten Kendal. Program-program dialog antaragama, pertemuan lintas agama, dan kegiatan sosial bersama sering diadakan untuk memperkuat toleransi, pemahaman, dan kerjasama antarumat beragama.

Pemahaman mendalam tentang data demografi agama ini penting bagi pengambil kebijakan, pemimpin masyarakat, dan stakeholders lainnya untuk merancang program-program yang inklusif, mendorong kerjasama antaragama, dan mempromosikan perdamaian dan harmoni antarumat beragama di Kabupaten Kendal.

4. Profil Kabupaten Kendal

Gambar. 1



Sumber: Peta Kendal Jawa Tengah 2020

Kabupaten Kendal, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki profil demografis yang beragam dan menarik untuk ditelusuri. Dengan luas wilayah sekitar 1.010,59 kilometer persegi, Kendal merupakan salah satu kabupaten terbesar di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kendal mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang signifikan di wilayah tersebut. Secara geografis, Kendal memiliki letak yang strategis, berbatasan dengan Kabupaten Batang di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, serta Laut Jawa di sebelah selatan.

Kendal juga dikenal sebagai daerah yang memiliki beragam latar belakang budaya dan etnis. Masyarakat Kendal terdiri dari berbagai suku dan agama, dengan mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dan menganut agama Islam. Namun, terdapat juga komunitas minoritas seperti suku Batak, Tionghoa, dan beberapa suku lainnya yang berkontribusi dalam memperkaya keragaman budaya di daerah ini. Keragaman ini tercermin dalam berbagai tradisi, seni, dan budaya lokal yang diwarisi secara turun-temurun oleh penduduk Kendal.

Selain itu, sektor pertanian dan industri menjadi pilar utama dalam struktur ekonomi Kabupaten Kendal. Pertanian, terutama sektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, memiliki peran yang signifikan dalam menyokong mata pencaharian masyarakat. Di samping itu, industri juga berkembang pesat di Kendal, dengan adanya berbagai pabrik dan sentra produksi yang tersebar di beberapa wilayah. Sebagai contoh, Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Tengah, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang kuat, Kabupaten Kendal juga dihadapkan pada tantangan dalam hal pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan masih menjadi perhatian utama, terutama di daerah-daerah pedesaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi juga perlu terus ditingkatkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

Dengan demikian, profil demografis Kabupaten Kendal mencerminkan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi ciri khas wilayah ini. Dalam upaya untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal secara optimal.

Musim kemarau di Kabupaten Kendal terjadi dari bulan Juli hingga September karena arah angin tidak mengandung banyak uap air. Namun, dari bulan Oktober hingga Juni, arus angin mengandung banyak uap air, yang membuat wilayah tersebut rentan terhadap musim hujan. Selain musim, kondisi iklim, perputaran dan pertemuan arus udara, dan faktor geografis lainnya memengaruhi jumlah hujan di suatu lokasi.

Kondisi iklim di Kabupaten Kendal bagian selatan (Dataran Tinggi) cenderung lebih sejuk, sementara wilayah bagian utara yang berdekatan dengan laut Jawa (Dataran Rendah) cenderung lebih panas. Di Kabupaten Kendal, lima stasiun pengamatan hujan—Kendal, Weleri, Kaliwungu, Sukorejo, dan Boja—mencatat curah hujan. Stasiun pencatatan Boja mencatat curah hujan tertinggi setiap tahun dengan 4.104 mm. Untuk Kabupaten Kendal, curah hujan tahun 2013 rata-rata sebesar 2.704 mm, naik 14,72 persen dari tahun sebelumnya. Curah hujan tahun 2012 sekitar 2.358 mm, dengan

rata-rata 116 hari hujan, dan curah hujan tertinggi sebesar 551 mm terjadi pada bulan Januari.

Di Kabupaten Kendal, musim hujan paling sering terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember, dengan hari hujan rata-rata 116 hari. Menurut rata-rata tahunan, bulan Desember dan Januari adalah bulan musim hujan, dengan curah hujan yang paling tinggi. Bulan Desember dan Januari memiliki curah hujan tertinggi, masing-masing 398 mm dan 551 mm, masing-masing. Di Sukorejo, curah hujan tertinggi mencapai 3.270 mm, sedangkan Kaliwungu memiliki curah hujan terkecil, rata-rata 201 mm.

B. Pondok Pesantren dan Partai Politik

1. Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal



Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an As-Shiddiqie

Sumber : <https://www.semuaabis.com/pptq-asshiddiqie-0294-384054>

Pondok pesantren memegang peran penting dalam kehidupan sosial, agama, dan pendidikan di Kabupaten Kendal. Sebagai salah satu bentuk tradisi keagamaan yang khas di Indonesia, pondok pesantren di Kendal menjadi pusat pembelajaran Islam yang memadukan pendidikan agama dengan pelajaran umum. Pesantren-pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan formal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya.

Setiap pondok pesantren di Kendal memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi ukuran, fokus pendidikan, maupun tradisi keagamaannya. Sebagian pesantren mungkin menekankan pada studi agama Islam, sementara yang lainnya mungkin menawarkan program pendidikan yang lebih luas termasuk pelajaran umum seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam. Selain itu, beberapa pesantren di Kendal juga terkenal dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian, kajian kitab kuning, dan kegiatan sosial masyarakat.

Pondok pesantren di Kendal tidak hanya menerima santri dari daerah sekitarnya, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Jawa Tengah dan bahkan luar provinsi. Hal ini mencerminkan reputasi yang baik dari pondok pesantren di Kendal dalam memberikan pendidikan agama yang berkualitas dan suasana keagamaan yang kondusif bagi para santri.

Pondok pesantren di Kendal juga berperan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal. Melalui kegiatan pengajian, peringatan hari-hari besar Islam, dan kegiatan budaya lainnya, pesantren membantu melestarikan warisan budaya yang kaya dan memperkuat identitas keagamaan dan budaya masyarakat Kendal.

Pentingnya peran pondok pesantren di Kendal juga tercermin dalam kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat. Banyak pesantren yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial seperti pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.

Dalam hal infrastruktur, sebagian besar pondok pesantren di Kendal dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti masjid, ruang kelas, asrama, dan fasilitas olahraga. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi para santri.

Selain pendidikan agama, beberapa pondok pesantren di Kendal juga menawarkan program-program pelatihan keterampilan bagi para santri. Program ini

bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis kepada para santri agar dapat bersaing dalam dunia kerja setelah mereka meninggalkan pondok pesantren.

Pemerintah daerah Kendal juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan pondok pesantren. Melalui program-program bantuan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur pondok pesantren di Kabupaten Kendal.

Namun, di samping berbagai kontribusi positifnya, pondok pesantren di Kendal juga dihadapkan pada tantangan-tantangan, termasuk dalam hal pendanaan, tenaga pengajar, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi kunci dalam menjaga dan mengembangkan peran pondok pesantren di Kabupaten Kendal ke depan.

Dengan demikian, pondok pesantren di Kabupaten Kendal bukan hanya merupakan lembaga pendidikan agama, tetapi juga merupakan pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya yang berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat setempat.

2. Partai Politik di Kabupaten Kendal

Partai Politik



Sumber : <https://www.gurugeografi.id/2017/11/perkembangan-partai-politik-di.html>

Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, banyak perubahan sosial dan politik terjadi pada tahun 2020. Kabupaten tersebut terus mengalami pertumbuhan penduduk dan

ekonomi yang cukup besar. Pemerintah daerah fokus pada masalah seperti perumahan, infrastruktur, dan pekerjaan karena populasi kendal yang terus meningkat. Di tahun ini, pemerintah daerah juga berusaha memperkuat identitas masyarakat Kendal dengan mendukung seni dan budaya lokal.

Dalam hal politik, tahun 2020 menyaksikan persiapan pemilihan kepala daerah juga dikenal sebagai pilkada secara serentak di seluruh Indonesia di Kendal. Pilkada Kabupaten Kendal merupakan peristiwa penting yang akan menentukan jalan ke depan kemajuan di daerah tersebut. Karena setiap calon kepala daerah memiliki visi dan misi pembangunan yang berbeda, persaingan sangat ketat. Selain itu, isu-isu penting seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan telah menjadi subjek perdebatan dalam pilkada ini.

Di samping itu, tahun 2020 juga diwarnai oleh dampak pandemi COVID-19. Kendal, seperti daerah-daerah lainnya, harus menghadapi tantangan serius dalam menangani penyebaran virus ini dan dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan COVID-19. Hal ini juga mempengaruhi dinamika sosial dan politik, dengan masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan dan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.

Secara keseluruhan, tahun 2020 di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mencerminkan keragaman dinamika sosial dan politik yang melibatkan pertumbuhan penduduk, Pilkada, dan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat terus berupaya menjawab tantangan ini dan mencari solusi untuk memajukan kabupaten ini dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Partai politik memainkan peran penting dalam menentukan arah politik dan kebijakan pemerintahan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2020 di Kabupaten Kendal. Partai politik memiliki peran penting dalam menyediakan masyarakat dengan alternatif kepemimpinan dan agenda politik, sebagai bagian dari proses demokratisasi. Dalam konteks skripsiá berjudul " RELASI PASLON DENGAN PONDOK PESANTREN (Study Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilukada 2020)", penting untuk diingat bahwa ada dinamika khusus di Kabupaten Kendal di mana beberapa partai politik mungkin memiliki hubungan erat dengan pondok pesantren atau lembaga keagamaan Islam lainnya. Ini mungkin tercermin dalam basis pendukung partai-partai tersebut, garis kebijakan mereka, atau taktik kampanye mereka.

Berbagai masalah dan dinamika lokal yang menarik perhatian masyarakat dapat mendorong partisipasi politik dalam Pemilu 2020 di Kabupaten Kendal. Partai politik berbasis pondok pesantren dapat memanfaatkan koneksi dan dukungan mereka untuk menekankan masalah-masalah ini dan memperkuat pesan keagamaan atau moral dalam kampanye mereka. Isu-isu tersebut mungkin mencakup pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan masalah keagamaan yang terkait dengan komunitas pondok pesantren. Jadi, untuk memahami dinamika politik yang berkaitan dengan pondok pesantren dan kehidupan politik lokal di Kabupaten Kendal, sangat penting untuk memahami gambaran umum partai politik dalam konteks Pemilu 2020 di Kabupaten Kendal.

Selain itu, dinamika politik nasional, termasuk kebijakan pemerintah pusat atau masalah politik yang sedang diperdebatkan di seluruh negara, dapat memengaruhi partai politik di Kabupaten Kendal dalam Pemilu 2020. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi cerita dan taktik kampanye partai politik di Kabupaten Kendal, dan juga dapat meningkatkan pembicaraan politik selama proses Pemilu.

Pondok pesantren di Kabupaten Kendal sangat penting untuk kehidupan agama, budaya, dan sosial masyarakat setempat. Pondok pesantren di Kabupaten Kendal menjadi pusat pendidikan agama Islam sebagai bagian dari tradisi Islam di Indonesia. Mereka memadukan pendidikan agama dengan pendidikan formal dan informal. Mereka menyediakan lingkungan yang mendukung bagi para santri (murid) untuk belajar tentang ajaran Islam, kaidah keagamaan, dan prinsip moral dan etika.

Pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan budaya penting di Kabupaten Kendal. Mereka menyelenggarakan aktivitas sosial seperti bantuan sosial, pengajian, pengobatan gratis, dan kegiatan amal lainnya. Selain itu, pondok pesantren juga berfungsi sebagai pusat kegiatan budaya seperti seni tradisional, musik, dan tari, yang merupakan bagian penting dari budaya lokal.

Pondok pesantren di Kabupaten Kendal memiliki dampak politik yang signifikan. Sebagian besar pondok pesantren mungkin berafiliasi dengan politisi lokal atau partai politik tertentu. Dukungan politik dari pondok pesantren dapat menjadi faktor penting dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu) 2020 karena partai politik berbasis pondok pesantren dapat menggunakan jaringan dan basis pendukung mereka untuk menang dalam kontestasi politik di Kabupaten Kendal.

C. Profil Singkat Tino Mustamsikin.

1. Tino Indra Wardono

Tino Indra Wardono, sosok yang luar biasa, memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi. Lahir pada tanggal 26 April 1983, di Gresik, Indonesia, ia telah mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan melalui kerja keras, tekad, dan kepemimpinan.

Perjalanan kewirausahaan Tino dimulai dari awal yang sederhana. Saat belajar di Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, ia menghadapi kendala keuangan karena ayahnya sakit. Bertekad untuk tidak membiarkan kesulitan ekonomi menghambat pendidikannya, Tino bekerja tanpa lelah. Dia menyediakan layanan perbaikan pendingin udara (AC), sering bekerja berjam-jam, kadang-kadang hanya dengan 3-4 jam tidur untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Komitmennya untuk memaksimalkan pekerjaan daripada waktu luang membuahkan hasil, dan ia secara bertahap membangun kerajaan bisnisnya sendiri, Grup Indra, dengan unit bisnis yang beragam.

Kepemimpinan Tino melampaui kewirausahaan. Ia menjabat sebagai Ketua Komite Kepemudaan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Semarang dan kemudian sebagai Sekretaris Komite Kepemudaan Daerah (BPD HIPMI) Jawa Tengah. Dedikasi dan dampaknya membawanya terpilih sebagai Ketua Komite Kepemudaan Daerah Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPD KNPI) Jawa Tengah periode 2018-2021. (<https://metrotimes.news/headline/>)

Pada tahun 2022, Tino melanjutkan keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan, menunggu kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI)2. Perjalanannya mencontohkan ketahanan, tekad, dan komitmen untuk membuat dampak positif pada komunitasnya.

Kisah Tino mengingatkan kita bahwa kesuksesan sering muncul dari kesulitan, dan kepemimpinan sejati terletak pada pelayanan kepada orang lain. Perjalanannya dari tukang reparasi AC menjadi CEO dan pemimpin pemuda menjadi inspirasi bagi banyak orang.

2. KH. Muh Mustamsikin

KH. Muh Mustamsikin adalah seorang kyai (ulama Islam) yang memiliki peran penting dalam politik di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam pemilihan umum, peran kyai seringkali sangat diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan. Namun, keterlibatan kyai tidak hanya terbatas pada peran di balik layar, tetapi juga sebagai calon wakil kepala daerah.

Pada pemilihan daerah di Kendal, pasangan Widya Kandi Susanti-KH. Muh Mustamsikin berhasil memenangkan pemilihan. KH. Muh Mustamsikin, yang memiliki latar belakang sebagai kyai, aktif terlibat dalam pemerintahan daerah. Ia menggunakan modal sosial yang dimilikinya secara efektif untuk memperoleh dukungan pemilih. Sebagai seorang kyai yang aktif dalam politik, KH. Muh Mustamsikin memiliki idealisme untuk memajukan segala sesuatu yang berbau agama dalam konsep pembangunan.

Namun, keinginan ini juga menjadi kesalahan bagi KH. Muh Mustamsikin. Ia keluar dari partai PKB karena konflik kepentingan dengan NU (Nahdlatul Ulama). Selain itu, ketidaksepakatan politik dengan bupati Widya Kandi Susanti menyebabkan KH. Muh Mustamsikin memutuskan untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik, yang kemudian menimbulkan perbedaan di antara mereka. (<https://metrotimes.news/headline/>)

BAB IV

KUNJUNGAN PASLON KE PESANTREN DAN ALASANNYA

Kunjungan balon ke pesantren dalam Pemilukada 2020 di Kabupaten Kendal menunjukkan adanya upaya untuk membangun silaturahmi dan memohon do'a restu terutama melalui interaksi dengan pimpinan pesantren, jajaran pengurus, dan santri. Berikut adalah beberapa calon pilkada yang berkunjung ke pesantren. Kegiatan ini mencakup presentasi program pendidikan dan kesejahteraan, diskusi isu-isu penting, serta memberikan edukasi tentang cara berpolitik yang baik. Selain itu, dokumentasi kunjungan juga dilakukan. Respon dari pesantren tergolong positif, dengan pesantren cenderung bersikap netral dan terbuka, mengingat kunjungan tersebut lebih bersifat silaturahmi dan permohonan doa restu daripada kampanye politik. Beberapa aspek hasil temuan yang dilakukan oleh balon adalah sebagai berikut:

A. Aktivitas Kunjungan Bakal Calon ke Pesantren

1. Kunjungan dalam agenda rapat tertentu

Salah satu kunjungan yang dilakukan adalah kunjungan rapat FUSPAQ (Forum Ukhuwah Silaturrahim Pendidikan Al-Qur'an), sebuah forum yang mempertemukan berbagai tokoh agama dan masyarakat untuk membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan kehidupan umat. Dalam kunjungan ini, bakal calon berusaha memperoleh dukungan dan membangun hubungan baik dengan para tokoh agama dan masyarakat agar dapat memperoleh dukungan dalam pemilihan berikutnya.

Selain kunjungan ke FUSPAQ, bakal calon juga melakukan kunjungan ke Forum Kyai Kampung. Forum ini merupakan wadah bagi para kyai atau pemuka agama di setiap kampung untuk saling berdiskusi dan bertukar informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan masyarakat. Kunjungan ke Forum Kyai Kampung ini memungkinkan bakal calon untuk memperoleh dukungan dari para kyai yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat setempat.

Foto bersama Forum Kyai Kampung di Kendal



Sumber : <https://radarsemarang.jawapos.com>

Tidak hanya itu, bakal calon juga melakukan kunjungan ke Forum Para Pengasuh Pondok Pesantren. Forum ini merupakan ajang bagi para pengasuh pondok pesantren untuk bertukar informasi, pengalaman, dan ide-ide dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama di pesantren mereka masing-masing. Dalam kunjungan ini, bakal calon berusaha memperoleh dukungan dan membangun hubungan baik dengan para pengasuh pondok pesantren agar dapat memperoleh dukungan dalam pemilihan berikutnya.

Selanjutnya, bakal calon juga melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren As-Shiddiqie Kendal. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya bakal calon untuk memperoleh dukungan dari pesantren-pesantren di Kendal. Di Pondok Pesantren As-Shiddiqie, bakal calon berkesempatan untuk bertemu dengan para santri dan para pengasuh pesantren, serta berdiskusi mengenai berbagai isu terkini yang berkaitan dengan kehidupan umat.

Selain kunjungan ke pondok pesantren, bakal calon juga melakukan kunjungan ke PWMC NU (Pimpinan Wilayah Mathla'ul Anwar Nahdlatul Ulama) Kendal. PWMC NU merupakan lembaga resmi yang mewadahi kegiatan-kegiatan NU di wilayah Kendal. Dalam kunjungan ini, bakal calon berusaha memperoleh dukungan dari NU, yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, serta memperluas jaringan politiknya.

Selanjutnya, bakal calon juga melakukan kunjungan ke BATSUL MASAIL Kendal. BATSUL MASAIL adalah badan otonom Nahdlatul Ulama yang bertugas memberikan fatwa atau pendapat hukum Islam dalam berbagai masalah yang dihadapi umat. Dalam kunjungan ini, bakal calon berusaha memperoleh dukungan dari BATSUL MASAIL agar mendapatkan legitimasi agama dalam upaya pencalonannya.

Tidak hanya itu, bakal calon juga melakukan kunjungan ke alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang berada di wilayah Kendal. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya bakal calon untuk memperoleh dukungan dari kalangan alumni pondok pesantren yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Kendal. Dengan memperoleh dukungan dari kalangan alumni, diharapkan bakal calon dapat memperluas basis dukungan politiknya.

Dalam kunjungan ini, bakal calon memanfaatkan berbagai informasi yang diperoleh selama kunjungan. Misalnya, bakal calon dapat menggali informasi mengenai preferensi dan harapan para tokoh agama dan masyarakat terhadap calon pemimpin yang akan mereka dukung. Dengan demikian, bakal calon dapat menyesuaikan strategi kampanye dan pesan politiknya agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Kendal.

Dalam kunjungan-kunjungan ini, bakal calon berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh dalam masyarakat Kendal. Melalui pertemuan-pertemuan ini, bakal calon berkesempatan untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi dan misinya, serta mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat Kendal. Dengan demikian, bakal calon dapat memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai kalangan dalam masyarakat Kendal.

Namun, dalam melakukan kunjungan-kunjungan ini, bakal calon juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Misalnya, bakal calon harus mampu mengatasi resistensi dan keraguan dari pihak-pihak yang belum yakin dengan kemampuan dan integritasnya sebagai pemimpin. Selain itu, bakal calon juga harus mampu bersaing dengan calon-calon lainnya yang juga melakukan upaya serupa untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Kendal. Oleh karena itu, bakal calon harus memiliki strategi dan komunikasi politik yang efektif untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Kendal.

Dengan demikian, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh bakal calon ke berbagai pesantren dan forum-forum agama dan masyarakat di Kendal merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka memperoleh dukungan politik dan

memenangkan pemilihan berikutnya. Dalam kunjungan-kunjungan ini, bakal calon berusaha untuk membangun jaringan politik yang kuat, memperluas basis dukungan politiknya, dan menyesuaikan strategi kampanye dan pesan politiknya agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Kendal. Dengan demikian, diharapkan bakal calon dapat memenangkan pemilihan dan menjadi pemimpin yang mampu memajukan Kabupaten Kendal ke arah yang lebih baik.

Dalam upaya memperoleh dukungan politik, kunjungan-kunjungan bakal calon ke pesantren dan forum-forum agama serta masyarakat merupakan langkah strategis untuk memperluas basis dukungan politiknya. Selama kunjungan-kunjungan ini, bakal calon juga dapat memanfaatkan momen untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Kendal. Dengan cara ini, bakal calon dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari para tokoh agama, masyarakat, serta alumni pondok pesantren yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Kendal.

Selain itu, kunjungan-kunjungan bakal calon juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan membangun hubungan personal dengan para kyai, pengasuh pesantren, dan tokoh agama lainnya. Dengan memperoleh dukungan personal dari para tokoh agama dan masyarakat yang dihormati, bakal calon dapat memperkuat posisinya dalam persaingan politik di Kabupaten Kendal.

Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, bakal calon juga dapat menggali informasi mengenai isu-isu terkini dan kebutuhan masyarakat Kendal. Dengan memahami secara mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kendal, bakal calon dapat menyusun program-program yang relevan dan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, kunjungan-kunjungan tersebut juga menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat Kendal secara langsung. Dengan demikian, bakal calon dapat memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan lebih baik, serta dapat merancang kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kendal.

Kunjungan-kunjungan ini juga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai informasi yang diperoleh selama kunjungan untuk mendukung narasi politik bakal calon. Misalnya, bakal calon dapat menggunakan testimonial atau dukungan dari para tokoh agama dan masyarakat yang didapat selama kunjungan untuk memperkuat pesan politiknya.

Selama kunjungan-kunjungan tersebut, bakal calon juga dapat menggunakan momen untuk melakukan pendekatan politik kepada para pengikut atau pendukung lawan politiknya. Dengan berkomunikasi secara langsung dan membangun hubungan personal dengan para pengikut lawan politiknya, bakal calon dapat memperoleh dukungan dari kalangan tersebut atau setidaknya memperoleh pengertian dan kerjasama dalam menjalankan kampanye politiknya.

Namun, dalam melakukan kunjungan-kunjungan ini, bakal calon juga harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam politik identitas atau politik uang yang dapat merusak citra dan integritasnya sebagai pemimpin yang bersih dan jujur. Sebaliknya, bakal calon harus tetap menjaga integritas dan moralitasnya sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh masyarakat Kendal.

Selain itu, bakal calon juga harus memperhatikan etika dan tata cara yang berlaku dalam setiap kunjungan yang dilakukan. Dalam berinteraksi dengan para tokoh agama dan masyarakat, bakal calon harus menghormati adat dan tradisi setempat, serta memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan moral yang diyakini oleh masyarakat Kendal.

Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam kunjungan-kunjungan tersebut, bakal calon juga harus memiliki tim kampanye yang handal dan terorganisir dengan baik. Tim kampanye dapat membantu dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan setiap kunjungan dengan efektif dan efisien, serta dapat memberikan dukungan moral dan logistik kepada bakal calon selama kunjungan berlangsung.

Selain itu, bakal calon juga harus memiliki strategi komunikasi yang baik dalam setiap kunjungan yang dilakukan. Bakal calon harus mampu menyampaikan pesan politiknya dengan jelas, persuasif, dan meyakinkan kepada para tokoh agama dan masyarakat yang dikunjungi, serta harus mampu menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang diajukan oleh mereka dengan baik dan bijaksana.

Dalam melakukan kunjungan-kunjungan tersebut, bakal calon juga harus memperhatikan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan kunjungan. Bakal calon harus mengatur jadwal kunjungan yang tidak bertabrakan dengan acara-acara penting atau moment yang sakral bagi masyarakat Kendal, serta harus memilih tempat-tempat yang strategis dan representatif untuk melakukan kunjungan.

Tidak hanya itu, bakal calon juga harus memperhatikan tata krama dan sopan santun yang berlaku dalam setiap kunjungan yang dilakukan. Bakal calon harus

menghormati adat dan tradisi setempat, serta harus memperlakukan para tokoh agama dan masyarakat dengan hormat dan sopan selama kunjungan berlangsung.

Dalam rangka memperoleh dukungan politik yang kuat dari masyarakat Kendal, bakal calon juga harus dapat membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Bakal calon harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi para tokoh agama, masyarakat, serta alumni pondok pesantren dalam merencanakan dan menjalankan kampanye politiknya.

Dengan demikian, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh bakal calon ke pesantren dan forum-forum agama serta masyarakat di Kendal merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka memperoleh dukungan politik dan memenangkan pemilihan berikutnya. Dalam kunjungan-kunjungan ini, bakal calon berusaha untuk membangun jaringan politik yang kuat, memperluas basis dukungannya, dan menyesuaikan strategi kampanye dan pesan politiknya agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Kendal. Dengan demikian, diharapkan bakal calon dapat memenangkan pemilihan dan menjadi pemimpin yang mampu memajukan Kabupaten Kendal ke arah yang lebih baik.

Kunjungan balon ke pesantren seringkali dilakukan oleh para kandidat yang mencalonkan diri dalam sebuah ajang kontestasi politik. Beberapa alasan balon melakukan kunjungan ke pondok pesantren adalah membangun sebuah relasi dengan tokoh agama yang nantinya akan memberikan impact yang cukup signifikan dalam dinamika politik terutama untuk mendulang suara.

Foto PMWC NU Kendal



Sumber : <https://radarsemarang.jawapos.com>

Tokoh agama, seperti kyai di pesantren, memiliki kekuasaan moral dan spiritual yang tinggi di masyarakat. Balon dapat mendapatkan dukungan moral dan politis karena ada tokoh agama yang dihormati. Selama kunjungan mereka, balon cenderung menekankan prinsip keagamaan pesantren, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mencari dukungan politik, tetapi juga memahami dan menghargai prinsip-prinsip keagamaan yang dipegang oleh masyarakat pesantren.

Pembahasan hasil penelitian antara kandidat bupati dan tokoh agama mengungkap fakta menarik terkait dengan hubungan personal yang terjalin selama kunjungan ke pesantren. Meskipun kunjungan tersebut tidak secara langsung menunjukkan keterlibatan politik di dalam pesantren, terdapat upaya untuk menjauhkan diri dari dinamika politik formal di tempat tersebut.

Kandidat bupati dan tokoh agama, dalam konteks kunjungan ke pesantren, terlihat menjalankan interaksi yang lebih terfokus pada kegiatan umum daripada agenda politik. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pesantren menjadi platform di mana mereka berkomunikasi, tetapi hubungan yang terjalin cenderung bersifat informal dan tidak terikat pada dinamika politik formal.

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa kandidat bupati dan tokoh agama menciptakan forum di luar pesantren sebagai alternatif untuk menjaga dan memperdalam hubungan personal mereka. Forum ini memberikan kesempatan bagi keduanya untuk berkomunikasi tanpa terikat oleh tekanan politik yang mungkin muncul di dalam pesantren. Interaksi yang terjalin di luar pesantren lebih lepas dan fokus pada pembahasan isu-isu umum serta kebutuhan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini tidak menggambarkan adanya hubungan politik yang eksplisit di dalam pesantren. Meskipun kunjungan ke pesantren tetap menjadi bagian dari agenda mereka, kandidat bupati dan tokoh agama tampaknya berupaya menjaga keseimbangan antara hubungan personal dan interaksi dengan masyarakat, tanpa memperkenalkan unsur politik formal yang terlalu mendalam. Implikasinya adalah adanya kesadaran untuk menjauhkan diri dari politisasi pesantren dan menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih lepas dan terbuka.

“Pak Mustamskin selaku ketua PMWC NU dan Ketua FUSPAQ serta penagruh ponpes Al-Uswah, kunjungan beliau ke pondok pesantren bukan untuk kepentingan politik melainkan menjalin silaturahmi antar ponpes.” Ujar Pak Ridwan

“Seperti yang saya katakan sebelumnya jika pak Mus sudah memiliki afiliasi dengan pondok pesantren di kabupaten Kendal maka akan disambut baik...” ujar Pak Agus.

“Tidak ada, Cuma memiliki hubungan dengan KH. Mustamskin pada FUSPAQ” ujar Pak KH. Irfan.

Analisis mengenai hubungan ketokohan dalam konteks kunjungan paslon ke pesantren dapat disimak sebagai bentuk hubungan informal atau hubungan sosial yang kuat. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada aspek politik formal, tetapi juga mencerminkan ikatan sosial yang erat antara paslon dan komunitas pesantren. Dalam banyak kasus, kunjungan paslon ke pesantren menjadi ajang untuk memperkuat dan menjalin kembali ikatan personal dengan pemimpin agama dan pengasuh pondok pesantren.

Hal tersebut selaras dengan istilah kunci dalam teori politik identitas Fukuyama yakni eksklusivitas yang merujuk pada kelompok-kelompok politik atau masyarakat memasukkan individu atau kelompok lain dalam konteks pembentukan politik identitas, dalam kasus ini kelompok yang dimasukkan dalam pembentukan politik identitas dalam memobilisasi masa adalah para Kyai, forum keagamaan, tokoh agama, dan pengasuh pondok pesantren.

Terlebih lagi, dalam konteks politik, kunjungan paslon ke pesantren memperkuat identitas politik mereka sebagai calon pemimpin yang peduli terhadap nilai-nilai agama dan masyarakat pesantren. Hal ini terutama terjadi ketika paslon telah mencalonkan diri sebagai wakil bupati di Kabupaten Kendal. Kunjungan ke pesantren dianggap sebagai strategi politik yang efektif untuk memperoleh legitimasi dan dukungan politik dari kalangan agama Islam dan masyarakat pesantren.

Penting untuk dicatat bahwa kunjungan ke pesantren tidak hanya berdampak pada dimensi politik, tetapi juga mencerminkan penggabungan antara politik dan tindakan sosial. Dalam konteks ini, kunjungan paslon ke pesantren menjadi wujud konkret bahwa politik dapat menyatu dengan tindakan sosial yang dianggap penting dalam membangun jaringan dan memperoleh dukungan politik.

Analisis hubungan antara paslon politik dan pesantren juga menyoroti pandangan bahwa identitas politik dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan agama. Teori politik identitas yang dikemukakan oleh Fukuyama menekankan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam membentuk identitas politik seseorang.

Dalam memahami dinamika hubungan antara paslon politik dan pesantren, data wawancara dengan para ahli politik dan tokoh agama akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi dari hubungan ini dalam konteks politik lokal. Analisis data ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dari kunjungan paslon ke pesantren dalam strategi politik mereka.

Dengan demikian, kesimpulan dari analisis ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara politik dan sosial dalam dinamika politik lokal. Kunjungan paslon ke pesantren bukan hanya merupakan upaya politik formal, tetapi juga menjadi bagian integral dari interaksi sosial yang kompleks dalam memperkuat identitas politik dan memperoleh dukungan politik di Kabupaten Kendal.

Dalam upaya memperoleh dukungan politik, kunjungan-kunjungan bakal calon ke pesantren dan forum-forum agama serta masyarakat merupakan langkah strategis untuk memperluas basis dukungan politiknya. Selama kunjungan-kunjungan ini, bakal calon juga dapat memanfaatkan momen untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Kendal. Dengan cara ini, bakal calon dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari para tokoh agama, masyarakat, serta alumni pondok pesantren yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Kendal.

Selain itu, kunjungan-kunjungan bakal calon juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan diri dan membangun hubungan personal dengan para kyai, pengasuh pesantren, dan tokoh agama lainnya. Dengan memperoleh dukungan personal dari para tokoh agama dan masyarakat yang dihormati, bakal calon dapat memperkuat posisinya dalam persaingan politik di Kabupaten Kendal.

Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, bakal calon juga dapat menggali informasi mengenai isu-isu terkini dan kebutuhan masyarakat Kendal. Dengan memahami secara mendalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kendal, bakal calon dapat menyusun program-program yang relevan dan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, kunjungan-kunjungan tersebut juga menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat Kendal secara langsung. Dengan demikian, bakal calon dapat memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan lebih baik, serta dapat merancang kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kendal.

Selama kunjungan-kunjungan tersebut, bakal calon juga dapat menggunakan momen untuk melakukan pendekatan politik kepada para pengikut atau pendukung lawan politiknya. Dengan berkomunikasi secara langsung dan membangun hubungan personal dengan para pengikut lawan politiknya, bakal calon dapat memperoleh dukungan dari kalangan tersebut atau setidaknya memperoleh pengertian dan kerjasama dalam menjalankan kampanye politiknya.

Namun, dalam melakukan kunjungan-kunjungan ini, bakal calon juga harus berhati-hati untuk tidak terjebak dalam politik identitas atau politik uang yang dapat merusak citra dan integritasnya sebagai pemimpin yang bersih dan jujur. Sebaliknya, bakal calon harus tetap menjaga integritas dan moralitasnya sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh masyarakat Kendal.

Selain itu, bakal calon juga harus memperhatikan etika dan tata cara yang berlaku dalam setiap kunjungan yang dilakukan. Dalam berinteraksi dengan para tokoh agama dan masyarakat, bakal calon harus menghormati adat dan tradisi setempat, serta memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan moral yang diyakini oleh masyarakat Kendal.

Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam kunjungan-kunjungan tersebut, bakal calon juga harus memiliki tim kampanye yang handal dan terorganisir dengan baik. Tim kampanye dapat membantu dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan setiap kunjungan dengan efektif dan efisien, serta dapat memberikan dukungan moral dan logistik kepada bakal calon selama kunjungan berlangsung.

Selain itu, bakal calon juga harus memiliki strategi komunikasi yang baik dalam setiap kunjungan yang dilakukan. Bakal calon harus mampu menyampaikan pesan politiknya dengan jelas, persuasif, dan meyakinkan kepada para tokoh agama dan masyarakat yang dikunjungi, serta harus mampu menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang diajukan oleh mereka dengan baik dan bijaksana.

Dalam melakukan kunjungan-kunjungan tersebut, bakal calon juga harus memperhatikan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan kunjungan. Bakal calon harus mengatur jadwal kunjungan yang tidak bertabrakan dengan acara-acara penting atau moment yang sakral bagi masyarakat Kendal, serta harus memilih tempat-tempat yang strategis dan representatif untuk melakukan kunjungan.

Tidak hanya itu, bakal calon juga harus memperhatikan tata krama dan sopan santun yang berlaku dalam setiap kunjungan yang dilakukan. Bakal calon harus

menghormati adat dan tradisi setempat, serta harus memperlakukan para tokoh agama dan masyarakat dengan hormat dan sopan selama kunjungan berlangsung.

Dalam rangka memperoleh dukungan politik yang kuat dari masyarakat Kendal, bakal calon juga harus dapat membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Bakal calon harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi para tokoh agama, masyarakat, serta alumni pondok pesantren dalam merencanakan dan menjalankan kampanye politiknya.

Dengan demikian, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh bakal calon ke pesantren dan forum-forum agama serta masyarakat di Kendal merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka memperoleh dukungan politik dan memenangkan pemilihan berikutnya. Dalam kunjungan-kunjungan ini, bakal calon berusaha untuk membangun jaringan politik yang kuat, memperluas basis dukungannya, dan menyesuaikan strategi kampanye dan pesan politiknya agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Kendal. Dengan demikian, diharapkan bakal calon dapat memenangkan pemilihan dan menjadi pemimpin yang mampu memajukan Kabupaten Kendal ke arah yang lebih baik.

2. Harapan atas kunjungan

Pembahasan hasil penelitian ini menyoroiti kompleksitas hubungan antara kandidat bupati dan tokoh agama, khususnya kyai dalam konteks pesantren. Kedatangan kandidat ke pesantren dijelaskan sebagai bentuk penghormatan (ta'dhim) kepada kyai, seorang tokoh agama yang dihargai di masyarakat. Namun, penelitian menemukan dinamika yang menarik di balik kehadiran tersebut, terutama dalam konteks intensitas kunjungan kandidat di masa kampanye atau menjelang pemilu.

Penelitian menegaskan bahwa kedatangan kandidat ke pesantren seringkali diilustrasikan sebagai ekspresi penghormatan dan pengakuan terhadap peran kyai sebagai pemimpin spiritual. Meski demikian, intensitas kunjungan yang lebih sering di masa kampanye menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik kehormatan tersebut. Ada indikasi kuat bahwa kunjungan ini memiliki tujuan politik, yaitu meraih dukungan suara dari kyai beserta santrinya.

Dengan meningkatnya frekuensi kunjungan di masa kampanye, terbuka potensi dukungan politik yang signifikan bagi kandidat. Hubungan dekat dengan kyai dan pesantren menjadi strategi politik yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Kyai dan santrinya, sebagai bagian integral dari masyarakat pesantren, menjadi faktor penting

yang dapat membentuk opini politik dan memberikan dukungan yang berdampak pada hasil pemilihan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menciptakan pemahaman lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara dunia politik dan agama. Kedatangan kandidat ke pesantren, sekalipun diawali dengan tujuan penghormatan, ternyata memiliki dimensi politik yang signifikan. Implikasinya adalah perlunya kewaspadaan dalam menginterpretasikan dinamika ini, memastikan bahwa dukungan suara berasal dari pemahaman yang lebih mendalam dan kesadaran akan kepentingan bersama, serta menjamin keberlanjutan demokrasi yang sehat.

“Sebelum Abah nyalon itu sudah sowan ke Kyai-Kyai di kabupaten Kendal dan ada beberapa pondok pesantren Kyai di kabupaten Kendal, ada beberapa Kyai yang di sowani untuk mengharapkan dukungan maju untuk menjadi calon...” ujar Gus Alfie. Dari data di atas Pak KH. Mustamskin selaku calon Bupati di kabupaten Kendal sudah memiliki relasi dengan kyai di kabupaten Kendal.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya hanya meminta doa restu dan silaturahmi,...”pak Agus

“Kegiatannya bisa berupa silaturahmi dan sosialisasi, Pak Mus tidak terlalu signifikan berkampanye di ponpes”. Ujar pak Ridwan.

“tidak ada, karena partai politik tidak boleh terlibat dengan Lembaga Pendidikan seperti pondok pesantren.” Ujar KH. Irfan Shodiq

Analisis mengenai hubungan antara calon politik dan kyai di pondok pesantren perlu mempertimbangkan bahwa khidmah dan ta'dhim kepada kyai merupakan bentuk penghormatan yang mendalam dalam tradisi pesantren. Hal ini selaras dengan istilah kunci dalam teori politik identitas Fukuyama Kebutuhan dan pengakuan yakni manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diakui dan diidentifikasi oleh kelompok tertentu untuk memainkan peran penting dalam pembentukan identitas politik. Dalam konteks politik, hubungan dekat antara calon dengan kyai menjadi strategi politik yang efektif dalam mempengaruhi pemilih, karena kyai memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas pesantren dan umat Islam secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan politik tidak hanya didasarkan pada faktor-faktor ideologis atau program politik, tetapi juga pada hubungan personal dan kepercayaan antara calon dan pemimpin agama.

Foto Sowan ke Kyai di Kendal



Sumber : <https://www.ayosemarang.com>

Namun, perlu diingat bahwa perlunya kewaspadaan dalam menginterpretasikan dinamika ini. Meskipun hubungan dekat antara paslon dan kyai dapat membantu memperoleh dukungan politik, penting untuk memastikan bahwa dukungan suara berasal dari pemahaman yang lebih mendalam dan sadar akan kepentingan bersama serta menjamin keberlanjutan demokrasi yang sehat. Dukungan politik yang didasarkan pada hubungan personal semata dapat mengarah pada politik patronase yang tidak sehat.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara paslon politik dan kyai di pondok pesantren memiliki implikasi yang kompleks dalam dinamika politik lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang cermat dalam memahami dinamika ini, termasuk melalui analisis pendapat ahli dan integrasi dengan teori politik identitas, seperti yang dikemukakan oleh Fukuyama.

Teori politik identitas Fukuyama menyoroti pentingnya faktor-faktor sosial, budaya, dan agama dalam membentuk identitas politik seseorang. Dengan mengaitkan data wawancara dengan para ahli politik dan tokoh agama dengan teori Fukuyama politik identitas, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hubungan antara paslon politik dan kyai di pondok pesantren memengaruhi identitas politik mereka serta strategi politik yang mereka terapkan.

Dengan demikian, analisis yang holistik dan terintegrasi tentang hubungan antara paslon politik dan kyai di pondok pesantren menjadi penting dalam memahami dinamika politik lokal yang kompleks. Melalui pendekatan yang cermat dan terinformasi, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang membentuk identitas politik dan strategi politik paslon dalam konteks pemilihan di Kabupaten Kendal.

Alasan balon ke pesantren dalam Pemilu 2020 di Kabupaten Kendal menandai suatu inisiatif yang sungguh-sungguh dalam membangun hubungan yang lebih mendalam dan substansial. Saat berada di pesantren, para calon dengan aktif terlibat dalam interaksi langsung dengan pimpinan pesantren, jajaran pengurus, dan santri. Sebagaimana dalam wawancara “Sebelum Abah nyalon itu sudah sowan ke Kyai-Kyai di kabupaten Kendal dan ada beberapa pondok pesantren Kyai di kabupaten Kendal, ada beberapa Kyai yang di sowani untuk mengharapkan dukungan maju untuk menjadi balon.” Ujar Gus Alfie.

Kunjungan ini bukan sekedar seremonial semata, namun mencakup program pendidikan dan kesejahteraan Lembaga Pendidikan keagamaan, isu-isu penting pada Masyarakat dan balon berusaha untuk menjalin ikatan yang kuat dengan pesantren sebagai bagian integral dari komunitas yang mereka tuju. Dalam hal ini, kegiatan kunjungan balon ke pesantren dilakukan sebelum pak Mustamskin maju sebagai balon, Tindakan ini menjelaskan bahwa kunjungan ke pesantren tersebut tidak melanggar aturan pemilu dengan berkampanye di Lembaga Pendidikan tempat ibadah.

Upaya balon untuk bersilaturahmi dan meminta do'a restu di pesantren mengindikasikan bahwasanya do'a dari seorang kyai sehingga do'anya maqbul. Kegiatan kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menyatu dengan pesantren dan membangun pendekatan yang holistik. Jadi betapa disini simbolisme agama digunakan balon untuk mendulang dukungan.

Rangkuman kunjungan dari wawancara dengan Gus Alfie

Tanggal	Siapa yang Berkunjung	Rata-rata jumlah orang	Waktu Berkunjung	Tempat Berkunjung	Alasan berkunjung
15/08/2019	Tino-Mustamsikin	30	Pagi	Kediaman KH. Danial Royyan, Desa Taman Gede	Memperoleh restu dari ketua PCNU Kendal
25/11/2019	Tino-Mustamsikin	50	Pagi	Pondok Pesantren As Shiddiqie, Kebondalem	Membahas rencana program pembangunan untuk pesantren
10/02/2020	Tino-Mustamsikin	40	Sore	Pondok Pesantren Darul Ulum Weleri Kendal	Memperkenalkan diri sebagai calon bupati
05/05/2020	Tino-Mustamsikin	60	Pagi, Malam	Pondok Pesantren At-Taqwa, Singorojo Kendal	Menggalang dukungan politik kyai NU
20/07/2020	Tino-Mustamsikin	45	Siang	Pondok Pesantren An-Nur,	Menyampaikan visi dan misi politik

3. Hubungan Bakal calon dengan pesantren

Dalam subbab berikutnya, akan dibahas mengenai harapan yang muncul sebagai respons atas kunjungan yang dilakukan oleh bakal calon. Kunjungan yang dilakukan ke berbagai pesantren dan forum-forum agama serta masyarakat di Kendal tidak hanya bertujuan untuk memperoleh dukungan politik, tetapi juga untuk membangun hubungan yang baik dengan para tokoh agama dan masyarakat serta untuk mendengarkan aspirasi dan harapan mereka terhadap calon pemimpin. Sebagai respons atas kunjungan tersebut, berbagai harapan muncul dari berbagai pihak yang dikunjungi, dan hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan masyarakat dalam memilih calon pemimpin di Kabupaten Kendal.

Salah satu harapan yang muncul dari kunjungan tersebut adalah harapan akan adanya pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkeadilan. Para tokoh agama dan masyarakat mengharapkan agar calon pemimpin yang terpilih dapat mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Mereka menginginkan pemimpin yang memiliki integritas tinggi, moralitas yang kuat, dan komitmen yang jelas terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial.

Selain itu, harapan juga muncul atas kemampuan calon pemimpin untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kendal, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat mengharapkan pemimpin yang memiliki visi dan strategi yang jelas dalam mengembangkan Kabupaten Kendal menjadi lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Mereka menginginkan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks dan dapat memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, harapan juga muncul atas transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Masyarakat menginginkan pemimpin yang terbuka dan jujur dalam mengelola pemerintahan, serta siap bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Mereka mengharapkan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, harapan juga muncul atas kemampuan calon pemimpin untuk membangun kerjasama dan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat menginginkan pemimpin yang dapat bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kendal. Mereka mengharapkan adanya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang diinginkan.

Harapan juga muncul atas kemampuan calon pemimpin untuk memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Masyarakat menginginkan pemimpin yang sensitif terhadap berbagai permasalahan sosial dan mampu merancang kebijakan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Mereka mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Kendal tanpa terkecuali.

Selain itu, harapan juga muncul atas kemampuan calon pemimpin untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal serta nilai-nilai tradisional yang ada di Kabupaten Kendal. Masyarakat menginginkan pemimpin yang memiliki kebanggaan terhadap budaya dan identitas lokal, serta siap untuk melakukan berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi yang ada. Mereka mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kendal.

Selain itu, harapan juga muncul atas kemampuan calon pemimpin untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kendal. Masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta siap untuk melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Tidak hanya itu, harapan juga muncul atas kemampuan calon pemimpin untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Kendal. Masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan politik yang kondusif dan harmonis, serta mampu menjaga kerukunan dan toleransi antar berbagai kelompok masyarakat. Mereka mengharapkan adanya pemimpin yang dapat menghindari konflik politik dan mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Selain itu, harapan juga muncul atas kemampuan calon pemimpin untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan dan bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Kendal. Masyarakat menginginkan pemimpin yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan serta mitigasi risiko bencana yang efektif. Mereka mengharapkan adanya pemimpin yang proaktif dalam melindungi dan melestarikan lingkungan serta mampu menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dari berbagai ancaman bencana alam.

Selain itu, harapan juga muncul atas kemampuan calon pemimpin untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Kendal. Masyarakat menginginkan pemimpin yang memiliki visi dan strategi yang jelas dalam mengembangkan sektor ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mengurangi disparitas sosial dan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Kendal.

Dalam konteks demokrasi lokal, harapan masyarakat terhadap calon pemimpin menjadi sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, penting bagi bakal calon untuk mendengarkan dengan seksama harapan-harapan tersebut dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam merancang program-program dan kebijakan yang dapat memenuhi harapan tersebut. Dengan demikian, diharapkan calon pemimpin yang terpilih nantinya dapat menjadi pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman dan membawa Kabupaten Kendal menuju arah yang lebih baik dan lebih maju.

Pembahasan hasil penelitian ini mengungkapkan kedalaman hubungan personal antara kandidat bupati dan tokoh agama, terutama dalam konteks keanggotaan dalam organisasi dan forum keagamaan. Penelitian menyoroti bahwa kandidat tidak hanya menjalin hubungan formal atau politis, melainkan juga memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, menciptakan dimensi kemanusiaan dalam interaksi mereka.

Dalam konteks NU, penelitian menunjukkan bahwa kandidat aktif terlibat dalam hubungan sevisi dalam organisasi. Keterlibatan ini membawa hubungan yang lebih mendalam dan terorganisir, yang tidak terbatas pada politik formal. Dengan demikian, silaturahmi tidak hanya berfungsi sebagai kampanye politik, tetapi juga sebagai wujud keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh NU.

Forum FUSPAQ juga memiliki peran yang signifikan dalam hubungan personal antara kandidat bupati dan tokoh agama. Keterlibatan dalam forum ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih luas, di mana kandidat dapat menjalin hubungan tanpa mendominasi dengan agenda politik. Forum ini menjadi platform bagi kandidat untuk memperkuat jaringan dan mendukung inisiatif keagamaan, menciptakan landasan kuat untuk hubungan personal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa silaturahmi, yang sering dilakukan oleh kandidat dengan dalih hubungan personal, sebenarnya didukung oleh dasar hubungan kekeluargaan dan sevisi dalam NU serta partisipasi dalam forum FUSPAQ. Ini tidak sekadar strategi politik, melainkan juga hasil dari keterlibatan nyata dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Sebagai strategi hubungan personal, silaturahmi menjadi wadah untuk memperdalam dan memperkuat ikatan ini, memungkinkan kandidat untuk membangun dukungan yang solid dari komunitas keagamaan.

Dalam masa kampanye Balon melakukan berbagai lawatan atau silaturahmi, baik silaturahmi antar kyai maupun lawatan politik. Kalimat dua menjelaskan kenapa lawatan politik perlu dilakukan, kalimat ketiga menjelaskan kenapa Kunjungan balon ke pesantren di dasari oleh hubungan personal antar kyai-kyai di kabupaten Kendal. Kunjungan balon ke pesantren dilakukan karean dari paslon sendiri memiliki hubungan personal antar kyai-kyai di kabupaten Kendal. “Seperti yang saya katakana sebelumnya jika sudah memiliki afiliasi dengan pondok pesantren maka akan disambut baik namun jika belum akan di perlakukan sebagai tamu biasa yang sowan ke Kyai Pondok” ujar Pak Agus Siswanto. Beliau juga menyampaikan bahwa melalui hubungan personalnya antara Pak Mus meminta restu dari kyai-kyai di kabupaten Kendal untuk maju mencalonknkan diri sebagai wakil bupati Bersama pak Tino di kabupaten Kendal.

Selain memiliki hubungan personal dengan kyai-kyai di kabupaten Kendal, pak Mustamskin juga aktif dalam organisasi dan forum keagamaan di Kabupaten Kendal, diantaranya FUSPAQ (Forum Uhkuwah Silaturahmi Pendidikan Al-Qu’ran), Batsul Masail, Forum Kyai Kampung dan Ketua Umum Alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kabupaten Kendal. Seperti yang dikatakan Gus Alfie “...berhubungan Abah menjadi wakil bupati, Abah Menjadi ketua PCNU...” dan Pak KH. Irfan “...Cuma memiliki hubungan dengan KH. Mustamskin pada FUSPAQ”.

Foto Kunjungan Ke Pesantren dan rapat agenda FUSPAQ



Sumber : <https://www.a.yosemarang.com>

Teori politik identitas yang dikemukakan oleh Fukuyama tentang isu identitas menyoroti pentingnya faktor-faktor sosial, budaya, dan agama dalam membentuk identitas politik seseorang. Dengan mengaitkan data wawancara dengan narasumber dan teori Fukuyama politik identitas, dapat diperoleh isu identitas merujuk pada masalah yang berkaitan dengan agama etisitas ataupun budaya, sedangkan temuan peneliti di lapangan adalah paslon membentuk identitas politik melalui isu isu identitas yang berkaitan dengan agama.

Dalam keterlibatannya Pak Mustamskin dalam forum dan organisasi keagamaan pastinya Pak Mustamskin memiliki modal social yang mumpuni untuk memenangkan kontestasi politik. Ditambah lagi dalam Bahasa pondok ada yang dinamakan ta'dhim atau hormat dengan kyai. Seperti yang di katakana Gus Alfie “kyai itu sebagai atau orang yang berpengaruh atau Bahasa santrinya Ta'dhim sama kyai itu sangat tinggi karena Bagaimana pun santri harus ikut dengan Kyai”. Berdasarkan asumsi tersebut Pak Mustamskin memiliki modal social yang besar yang dimana relasi antara kyai dengan kyai memiliki santri dan Masyarakat yang ta'dhim dengan kyai(nderek kyai)

Analisis hubungan antara paslon politik dengan tokoh agama, terutama dalam konteks keanggotaan dalam organisasi dan forum agama seperti lembaga FUSPAQ, BATSUL MASAIL KENDAL, Forum Kyai kampung, dan ketua umum alumni pondok pesantren Lirboyo di Kendal, menyoroti aspek hubungan personal yang terjalin di antara mereka. Keanggotaan dalam organisasi dan forum keagamaan menciptakan platform bagi paslon untuk membangun hubungan personal yang kuat dengan tokoh agama di Kabupaten Kendal.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan dekat antara paslon politik dan tokoh agama tidak selalu terkait dengan aspek politik. Sebaliknya, hubungan ini sering kali didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang kuat, menciptakan dimensi kemanusiaan dalam interaksi mereka. Tokoh agama dan paslon politik seringkali memiliki hubungan personal yang melampaui ranah politik, yang memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan bersinergi dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam menginterpretasikan dinamika ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa dukungan suara berasal dari ikatan kekeluargaan dan kesesuaian program antara paslon dengan organisasi dan forum keagamaan. Dukungan politik yang didasarkan pada hubungan personal dan kesesuaian program dianggap lebih kuat dan berkelanjutan

dalam jangka panjang, karena didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan kepentingan bersama.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara paslon politik dan tokoh agama memiliki implikasi yang kompleks dalam dinamika politik lokal. Diperlukan analisis yang mendalam dari para ahli politik untuk memahami dampak dan implikasi dari hubungan ini, serta untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang dinamika politik lokal di Kabupaten Kendal.

Dalam menghadapi harapan-harapan yang muncul dari kunjungan para bakal calon, penting bagi mereka untuk merumuskan strategi dan agenda yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan dialog dan diskusi terbuka dengan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui dialog ini, bakal calon dapat lebih memahami beragam kebutuhan dan harapan masyarakat, serta merancang program-program yang responsif terhadap kebutuhan tersebut.

Selain itu, bakal calon juga perlu memperhatikan isu-isu spesifik yang menjadi perhatian utama bagi masyarakat Kendal. Misalnya, isu-isu terkait pertanian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup dapat menjadi fokus utama dalam merumuskan agenda politik dan pembangunan. Dengan memperhatikan isu-isu ini, bakal calon dapat menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kendal.

Bakal calon juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih luas dan efektif. Melalui media sosial, bakal calon dapat menyampaikan pesan-pesan politiknya, menggalang dukungan, dan membangun koneksi dengan pemilih potensial. Dengan memanfaatkan media sosial secara cerdas, bakal calon dapat menciptakan momentum politik yang kuat dan memperluas basis dukungan mereka di kalangan masyarakat Kendal.

Urgensi bagi bakal calon untuk menjaga kredibilitas dan integritas mereka sebagai calon pemimpin. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari praktik politik yang korup, menyesuaikan perilaku dan sikap mereka dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, serta tetap berkomitmen untuk melayani kepentingan masyarakat secara adil dan transparan. Dengan menjaga kredibilitas dan integritas mereka, bakal calon dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat Kendal.

Bakal calon juga memperhatikan strategi kampanye yang inklusif dan partisipatif. Mereka mengajak masyarakat Kendal untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, baik melalui partisipasi dalam debat publik, forum diskusi, atau kegiatan-kegiatan sosial-politik lainnya. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, bakal calon dapat menciptakan atmosfer politik yang lebih dinamis dan partisipatif, serta memperoleh dukungan yang lebih luas dari berbagai kalangan masyarakat.

Bakal calon juga memperhatikan isu-isu keagamaan dan identitas budaya dalam kampanye politik mereka. Masyarakat Kendal memiliki beragam latar belakang agama dan budaya, sehingga penting bagi bakal calon untuk menghormati dan mengakomodasi keberagaman ini dalam pesan politik dan program-program pembangunan mereka. Dengan memperhatikan isu-isu keagamaan dan budaya, bakal calon dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat Kendal dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari berbagai kelompok masyarakat.

Selain itu, penting bagi bakal calon untuk menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan ini, bakal calon dapat memperoleh dukungan politik dan sosial yang lebih besar, serta memperluas jaringan politik mereka di Kabupaten Kendal.

Bakal calon juga memperhatikan strategi kampanye yang berbasis data dan analisis yang komprehensif. Mereka melakukan survei dan penelitian yang mendalam untuk memahami preferensi dan kebutuhan pemilih, serta untuk menentukan strategi kampanye yang paling efektif. Dengan memanfaatkan data dan analisis secara cerdas, bakal calon dapat mengidentifikasi peluang-peluang politik yang ada dan mengoptimalkan upaya kampanye mereka untuk memenangkan pemilihan.

Selain itu, bakal calon juga perlu memperhatikan isu-isu lingkungan dalam kampanye politik mereka. Kabupaten Kendal memiliki potensi alam yang besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, dan polusi air dan udara. Dengan memperhatikan isu-isu lingkungan dalam kampanye politik mereka, bakal calon dapat menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kendal.

Disini bakal calon sangat memperhatikan isu-isu gender dan kesetaraan dalam kampanye politik mereka. Kabupaten Kendal juga memiliki tantangan terkait

kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, sehingga penting bagi bakal calon untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan peningkatan akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keadilan sosial. Dengan memperhatikan isu-isu gender dalam kampanye politik mereka, bakal calon dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dari kalangan perempuan dan masyarakat yang peduli akan kesetaraan gender.

Bakal calon memperhatikan strategi komunikasi yang efektif dalam kampanye politik mereka. Mereka perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan pesan yang menarik untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki tingkat literasi dan pendidikan yang rendah. Dengan menggunakan strategi komunikasi yang efektif, bakal calon dapat memperoleh dukungan yang lebih luas dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap diri mereka.

Catatan penting bagi bakal calon untuk menjaga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam menjalankan kampanye politik mereka. Mereka harus menghindari praktik politik yang merugikan integritas demokrasi dan mengancam stabilitas politik, serta memperjuangkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua warga Kendal. Dengan menjaga kesetiaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, bakal calon dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dari masyarakat Kendal yang menghargai nilai-nilai tersebut.

Bakal calon sangat memperhatikan strategi mobilisasi massa dalam kampanye politik mereka. Dengan mengorganisir masa suaranya secara efektif, termasuk melalui kegiatan-kegiatan seperti kampanye, rapat umum, dan konser politik. Dengan melakukan mobilisasi massa yang efektif, bakal calon dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dan memperoleh dukungan yang lebih besar dalam pemilihan nanti.

Selain itu, bakal calon sangat memperhatikan isu-isu keamanan dalam kampanye politik mereka. Kabupaten Kendal memiliki potensi konflik dan gangguan keamanan, sehingga penting bagi bakal calon untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam setiap kegiatan kampanye mereka. Mereka bekerja sama dengan pihak keamanan dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan mengamankan proses pemilihan secara aman dan damai.

Selain itu, bakal calon memperhatikan strategi rekayasa sosial dalam kampanye politik mereka. Mereka perlu menggunakan berbagai teknik dan metode rekayasa sosial untuk mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap diri mereka, lawan politik mereka, dan isu-isu politik yang sedang berkembang. Dengan menggunakan rekayasa

sosial yang cerdas, bakal calon dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dan memenangkan pemilihan dengan margin yang lebih besar.

Bakal calon juga memperhatikan strategi koalisi dan aliansi dalam kampanye politik mereka. Mereka membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan lainnya, untuk memperluas basis dukungan politik mereka. Dengan membentuk koalisi dan aliansi yang kuat, bakal calon dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dan memenangkan pemilihan dengan lebih mudah.

Bakal calon juga memperhatikan strategi kampanye negatif dalam kampanye politik mereka. Mereka menggunakan berbagai teknik dan metode kampanye negatif untuk menyerang lawan politik mereka, memperkuat citra mereka sendiri, dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap diri mereka dan lawan politik mereka. Dengan menggunakan kampanye negatif yang cerdas, bakal calon dapat memperoleh keuntungan politik yang signifikan dan memenangkan pemilihan dengan margin yang lebih besar.

Bakal calon memperhatikan strategi kampanye lapangan dalam kampanye politik mereka. Mereka mengadakan berbagai kegiatan kampanye di lapangan, termasuk rapat umum, pawai politik, dan pertemuan dengan warga masyarakat, untuk memperkenalkan diri mereka, menyampaikan pesan politik mereka, dan memperoleh dukungan dari pemilih. Dengan melakukan kampanye lapangan yang intensif, bakal calon dapat memperluas basis dukungan politik mereka dan memenangkan pemilihan dengan margin yang lebih besar.

Terakhir, bakal calon memperhatikan strategi kampanye digital dalam kampanye politik mereka. Mereka menggunakan berbagai platform digital, seperti media sosial, situs web, dan aplikasi seluler, untuk menyampaikan pesan politik mereka, menggalang dukungan, dan memobilisasi pemilih. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara efektif, bakal calon dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari kalangan masyarakat Kendal.

BAB V

DAMPAK DUKUNGAN PASLON KE PESANTREN

Kunjungan balon membawa dampak psikologis dan dampak public bagi balon. Walaupun pernyataan dari narasumber mengatakan bahwa kunjungan dari balon ke pondok pesantren tidak langsung memberikan dampak dalam mendulang dukunan yang signifikan. Kunjungan paslon Tino-Mustamsikin ke pesantren memiliki dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak, baik bagi paslon maupun bagi pesantren itu sendiri. Dampaknya mencakup aspek psikologis dan politik yang perlu dipahami secara mendalam.

Pertama-tama, kunjungan ke pesantren memberikan dampak psikologis yang kuat bagi paslon Tino-Mustamsikin. Mereka mendapatkan dukungan langsung dari tokoh agama dan masyarakat pesantren, yang memberikan dorongan moral yang besar. Dukungan ini memperkuat keyakinan paslon untuk terus maju dalam perjuangan politik, serta meningkatkan optimisme mereka akan kemenangan dalam pemilihan. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya dukungan dari pesantren dalam memperkuat keyakinan dan semangat paslon.

Di sisi lain, kunjungan paslon Tino-Mustamsikin juga berdampak pada pesantren itu sendiri. Terutama dalam hal perubahan dukungan politik dan pola dukungan di kalangan pesantren. Dukungan yang diberikan oleh tokoh agama dan pengasuh pesantren dapat memicu perubahan dalam preferensi politik dan loyalitas di antara masyarakat pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran yang signifikan dalam dinamika politik lokal.

Dalam konteks ini, perubahan dukungan dan pola dukungan di kalangan pesantren mencerminkan pentingnya peran pesantren sebagai kekuatan politik lokal. Pesantren bukan hanya tempat ibadah atau pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pengambilan keputusan politik. Dukungan yang diberikan oleh pesantren dapat memiliki dampak besar dalam menentukan hasil pemilihan, serta membentuk arah dan orientasi politik di suatu daerah.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dampak kunjungan paslon ke pesantren sangatlah penting. Paslon perlu memahami betapa krusialnya dukungan dari pesantren dalam meraih kemenangan dalam pemilihan. Di sisi lain, pesantren juga perlu mempertimbangkan secara cermat implikasi politik dari dukungan yang mereka berikan, serta dampaknya terhadap dinamika politik lokal.

Secara keseluruhan, kunjungan paslon Tino-Mustamsikin ke pesantren memiliki dampak yang kompleks dan beragam, baik bagi paslon maupun bagi pesantren itu sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dinamika politik lokal dan peran pesantren dalam konteks politik yang lebih luas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dampak ini, paslon dan pesantren dapat berkolaborasi secara efektif dalam mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Maka dari itu penting untuk mempertimbangkan harapan kedepannya dan dampak tidak langsung yang kemungkinan akan muncul dari kegiatan kunjungan tersebut. Beberapa dampak dukungan dari kunjungan balon ke pesantren adalah sebagai berikut:

A. Psikologis

Dukungan secara tidak langsung dari kyai-kyai, forum dan organisasi keagamaan mencakup pengaruh social sehingga mempengaruhi pandangan Masyarakat terhadap balon akibat kunjungan ke pesantren. Setelah mendapat restu dan dukungan dari kyai-kyai di kabupaten Kendal Pak Mustamskin mantap untuk melanjutkan maju untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Sebagai kyai yang memiliki kharismatik di kabupaten Kendal, Pak Mustamsikin.

Secara tidak langsung, restu dan dukungan dari kyai-kyai di kabupaten memberikan dampak psikologis bagi balon, yakni memberikan ketenangan, karena pak Mustamskin sendiri sudah mendapat do'a restu dan dukungan dari kyai-kyai yang ada di kabupaten Kendal yang dimana do'a dari kyai itu bersifat *maqbul*, sehingga balon memiliki keyakinan untuk memenangkan kontestasi politik.

Kemungkinan setelah paslon mendapat modal social yang tinggi, balon juga memikul beban social karena memikul tanggung jawab yang besar dan memiliki pengaruh yang besar. Hal ini juga dapat menjadi beban psikologi namun juga bisa menjadi motivasi untuk tetap tenang dan memenangkan kontestasi politik.

Dilansir inspirasi123.com, banyak para kyai yang tergabung pada forum kyai kampung di Kabupaten Kendal. Forum tersebut menjadi satu visi dan misi bersama ketua pimpinan cabang NU (PCNU) Kendal, Danial Royyan, untuk mendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati Kendal. Pernyataan Daniel Royyan yang menyampaikan adanya pembentukan forum ini sebagai wadah dan saluran politik para kyai menegaskan komitmen politik dari para pemimpin agama dalam memengaruhi proses pemilihan. Lebih lanjut, pembentukan forum ini dinilai sebagai bentuk khittah

politik dan terjun ke dunia politik praktis, menunjukkan bahwa kyai memiliki peran yang signifikan dalam politik lokal.

Foto balon mencalonkan diri



Sumber : <https://radarsemarang.jawapos.com/>

Dalam menanggapi dukungan dari forum kyai kampung dan PCNU Kendal, pasangan Tino-Mustamsikin menyatakan bahwa mereka senang mendapat dukungan atau mobilisasi massa dari pihak tersebut. Reaksi positif ini menunjukkan bahwa dukungan dari kalangan kyai dianggap sebagai aset penting dalam kampanye mereka. Secara psikologis, dukungan tersebut membuat pasangan ini bertambah yakin untuk memenangkan Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal. Keyakinan ini mungkin didorong oleh rasa percaya diri yang meningkat akibat dukungan dari tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat.

Dukungan politik dari forum kyai kampung dan PCNU Kendal juga dapat memperkuat legitimasi dan otoritas pasangan Tino-Mustamsikin di mata masyarakat. Kyai memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas agama dan masyarakat lokal,

sehingga dukungan dari mereka dapat memperkuat citra paslon sebagai pemimpin yang diakui dan dihormati. Hal ini dapat memberikan keuntungan psikologis bagi paslon, seperti meningkatnya rasa percaya diri dan keyakinan akan kemungkinan kemenangan dalam pemilihan.

Selain itu, dukungan dari forum kyai kampung dan PCNU Kendal juga dapat memberikan motivasi tambahan bagi paslon untuk meningkatkan intensitas kampanye mereka. Pasangan Tino-Mustamsikin mungkin merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk tidak mengecewakan para pendukung mereka, terutama dari kalangan kyai dan masyarakat agama. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dalam menggalang dukungan dan memperkenalkan program-program politik mereka kepada pemilih.

Namun, penting untuk diingat bahwa dukungan politik tidak selalu menjamin kemenangan dalam pemilihan. Meskipun pasangan Tino-Mustamsikin merasa yakin dengan dukungan yang mereka terima, mereka tetap harus berusaha keras untuk memenangkan hati pemilih dan meraih suara mayoritas. Dukungan dari forum kyai kampung dan PCNU Kendal dapat menjadi modal penting dalam kampanye mereka, tetapi mereka juga harus memperhatikan dinamika politik yang lebih luas dan mempersiapkan strategi yang matang untuk menghadapi persaingan yang ketat dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal.

Dalam analisis tentang dampak dukungan paslon dari kunjungan ke pesantren, fokus pada pasangan Tino-Mustamsikin selaras dengan istilah kunci politik identitas Fukuyama dalam perubahan politik identitas yaitu politik identitas dapat berubah seiring waktu dan berbagai factor seperti social, ekonomi atau politik. Dalam konteks ini, dampak bagi paslon Tino-Mustamsikin mencakup aspek psikologis yang sangat signifikan. Kunjungan ke pesantren memberikan mereka keyakinan yang kuat untuk terus maju dan mencalonkan diri. Dukungan dan restu yang diterima dari tokoh agama dan masyarakat pesantren memberikan dorongan moral yang besar bagi paslon ini, sehingga mereka merasa didukung dalam perjuangan politik mereka.

Foto yakin dapat memenangkan pilkada



Sumber : <https://beritakita.net>

Dampak psikologis lainnya bagi paslon Tino-Mustamsikin adalah keyakinan akan kemenangan. Dengan mendapatkan dukungan yang kuat dari pesantren, mereka menjadi lebih yakin bahwa mereka memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan bupati. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat mereka dalam melakukan kampanye serta menghadapi tantangan politik yang ada.

Sementara itu, dampak kunjungan paslon Tino-Mustamsikin ke pesantren juga dapat dirasakan oleh pesantren itu sendiri. Kunjungan paslon dapat menyebabkan perubahan dalam dukungan politik di kalangan pesantren, dengan kemungkinan adanya pergeseran dalam preferensi dan loyalitas politik. Pesantren yang sebelumnya netral atau mendukung kandidat lain dapat beralih dukungannya kepada Tino-Mustamsikin sebagai bentuk apresiasi atas kunjungan dan hubungan yang mereka bangun.

Perubahan pola dukungan juga mungkin terjadi di kalangan pesantren setelah kunjungan paslon Tino-Mustamsikin. Pola dukungan politik di pesantren dapat berubah, di mana sebelumnya mungkin tersebar secara merata di antara berbagai kandidat, namun setelah kunjungan paslon, ada kemungkinan terjadi konsolidasi dukungan di sekitar Tino-Mustamsikin yang telah melakukan kunjungan.

Selanjutnya, dampak psikologis dari dukungan paslon oleh forum kyai kampung dan PCNU Kendal juga dapat menciptakan efek psikologis yang positif di kalangan pendukungnya. Para pendukung pasangan Tino-Mustamsikin mungkin merasa lebih

optimis dan yakin akan kesempatan paslon tersebut untuk memenangkan pemilihan. Dukungan dari tokoh agama yang dihormati dapat memberikan legitimasi moral pada paslon, yang dapat memperkuat komitmen pendukung untuk mendukungnya dengan lebih gigih.

Selain itu, dukungan dari forum kyai kampung dan PCNU Kendal dapat menciptakan solidaritas dan persatuan di kalangan masyarakat yang tergabung dalam lembaga-lembaga tersebut. Paslon Tino-Mustamsikin dapat dianggap sebagai representasi kepentingan dan aspirasi bersama dari komunitas agama, yang dapat mempersatukan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat dalam mendukung tujuan bersama. Hal ini dapat menciptakan efek domino dalam mendapatkan dukungan yang lebih luas dari berbagai sektor masyarakat.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan politik dari forum kyai kampung dan PCNU Kendal juga dapat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Dukungan dari lembaga keagamaan sering kali menjadi bahan perdebatan dalam konteks politik, terutama jika ada dugaan intervensi politik dalam ranah keagamaan. Hal ini dapat menciptakan polarisasi di masyarakat, dengan beberapa pihak mengkritik dukungan tersebut sebagai campur tangan dalam politik dan mempertanyakan independensi lembaga keagamaan.

Selain itu, dampak psikologis dari dukungan paslon oleh forum kyai kampung dan PCNU Kendal juga dapat menciptakan tekanan tambahan bagi paslon itu sendiri. Mereka mungkin merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk tidak mengecewakan para pendukung mereka, terutama dari kalangan tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Hal ini dapat menciptakan beban psikologis yang berat, karena paslon perlu terus berusaha keras untuk memenuhi harapan dan ekspektasi yang telah ditetapkan oleh pendukungnya.

Dalam konteks politik lokal di Kabupaten Kendal, dampak psikologis dari dukungan paslon oleh forum kyai kampung dan PCNU Kendal dapat menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan hasil pemilihan. Keyakinan dan semangat yang tinggi dari paslon dan pendukungnya dapat menciptakan energi positif dalam kampanye, yang dapat memengaruhi persepsi dan keputusan pemilih. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti dan analis politik untuk memahami secara mendalam dampak psikologis dari dukungan politik dalam konteks pemilihan lokal.

Dengan demikian, kunjungan paslon Tino-Mustamsikin ke pesantren memiliki dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi paslon, kunjungan tersebut

memberikan dorongan moral dan keyakinan yang kuat untuk terus berjuang, sementara bagi pesantren, kunjungan tersebut dapat memengaruhi dinamika politik di kalangan mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dampak ini memungkinkan paslon untuk merancang strategi politik yang lebih efektif dalam meraih dukungan politik di Kabupaten Kendal.

Dukungan yang diberikan oleh bakal calon kepada pesantren memiliki dampak yang signifikan, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam konteks pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN, dukungan yang diberikan kepada pesantren dapat memberikan dampak psikologis yang positif bagi mereka. Pertama-tama, dukungan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme calon kandidat dalam menghadapi pemilihan. Mengetahui bahwa mereka memiliki dukungan dari pesantren, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan politik dan spiritual di masyarakat, dapat memberikan dorongan moral dan semangat perjuangan yang lebih besar bagi pasangan calon tersebut.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga dapat memberikan legitimasi politik bagi pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN di mata masyarakat. Kehadiran dukungan dari pesantren dapat memperkuat citra mereka sebagai calon yang berkomitmen terhadap nilai-nilai agama dan kearifan lokal, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kapabilitas mereka sebagai pemimpin. Dengan demikian, dukungan dari pesantren tidak hanya memberikan dampak psikologis positif bagi calon kandidat, tetapi juga dapat membantu memperkuat posisi mereka dalam persaingan politik.

Selain dampak psikologis bagi calon kandidat, dukungan dari pesantren juga memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Pertama-tama, dukungan ini dapat memberikan arahan politik kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka. Pesantren sering kali dianggap sebagai otoritas moral dan spiritual dalam masyarakat, sehingga dukungan yang diberikan oleh pesantren dapat mempengaruhi persepsi dan sikap politik masyarakat secara luas. Masyarakat cenderung akan lebih memperhatikan rekomendasi dan pandangan politik yang diberikan oleh pesantren dalam menentukan pilihan mereka dalam pemilihan.

Dukungan dari pesantren juga dapat meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat, terutama di kalangan pemilih yang memiliki kecenderungan untuk mengikuti arahan dari pesantren. Dengan mengetahui bahwa pesantren mendukung pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN, masyarakat yang memiliki keterikatan

emosional atau spiritual dengan pesantren tersebut cenderung akan lebih termotivasi untuk turut serta dalam pemilihan dan memberikan suara untuk pasangan calon tersebut. Dengan demikian, dukungan dari pesantren dapat membantu meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dan mendukung proses demokrasi yang lebih inklusif.

Namun, meskipun memiliki dampak yang positif, dukungan dari pesantren juga dapat memunculkan potensi konflik dan polarisasi dalam masyarakat. Terkadang, dukungan dari pesantren dapat memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing dan bertentangan, terutama jika terdapat perbedaan pandangan politik di antara pesantren-pesantren yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan risiko terjadinya konflik politik atau sosial dalam masyarakat.

Deklarasi pemilu damai oleh calon



Sumber : <https://derapjuang.id/>

Dukungan dari pesantren juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan netralitas lembaga keagamaan dalam politik. Meskipun pesantren memiliki hak untuk memberikan dukungan politik sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka, namun terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan pesantren dalam politik dapat mengurangi independensi dan netralitas mereka sebagai lembaga keagamaan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan antara agama dan politik dalam masyarakat, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga dapat menimbulkan isu-isu terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Terkadang, dukungan dari pesantren dapat dianggap sebagai bentuk pengaruh politik yang tidak transparan dan tidak terbuka, terutama jika terdapat pertanyaan tentang motif dan kepentingan yang mendasari dukungan tersebut. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan legitimasi proses politik, serta merusak stabilitas dan kredibilitas institusi politik dalam jangka panjang.

Selanjutnya dukungan dari pesantren juga dapat mempengaruhi dinamika kompetisi politik dalam pemilihan. Pesantren sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan hasil pemilihan, sehingga dukungan dari pesantren dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi calon kandidat yang mendapat dukungan tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik antara calon kandidat yang didukung oleh pesantren dan calon kandidat lainnya, serta mempengaruhi keadilan dan keseimbangan dalam persaingan politik.

Dukungan dari pesantren juga dapat memicu persaingan antara pesantren-pesantren dalam memperebutkan pengaruh politik. Terkadang, dukungan politik dari pesantren dapat dipandang sebagai alat untuk memperkuat posisi dan kepentingan pesantren tersebut dalam lingkungan politik lokal atau nasional. Hal ini dapat menciptakan persaingan yang intens antara pesantren-pesantren yang bersaing untuk mendapatkan dukungan politik, serta dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik atau rivalitas antara pesantren-pesantren tersebut.

Kendati demikian, meskipun memiliki dampak-dampak yang kompleks dan beragam, dukungan dari pesantren juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan antara politik dan agama dalam masyarakat. Dukungan dari pesantren dapat membantu menguatkan legitimasi politik dan moral para pemimpin yang terpilih, serta dapat membantu memperkuat partisipasi politik dan kesadaran politik masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjaga keseimbangan antara politik dan agama, dukungan dari pesantren dapat menjadi sumber kekuatan yang positif dalam proses politik lokal dan nasional.

Dukungan yang diberikan oleh bakal calon kepada pesantren memiliki implikasi yang kompleks, termasuk dampak psikologis yang mungkin berbeda bagi setiap calon kandidat dan masyarakat. Dalam konteks pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN, dukungan dari pesantren mungkin memberikan rasa kepercayaan diri dan optimisme yang lebih besar, karena mereka merasa didukung oleh salah satu institusi yang

dihormati secara luas dalam masyarakat. Namun, dampak psikologis ini juga bisa menjadi beban tersendiri jika pasangan calon tidak memenuhi harapan yang diletakkan pada mereka oleh pesantren.

Di sisi lain, masyarakat mungkin bereaksi dengan beragam cara terhadap dukungan yang diberikan oleh pesantren kepada pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN. Beberapa masyarakat mungkin merasa terpolarisasi, di mana beberapa mendukung secara tulus sementara yang lain merasa terintimidasi atau tidak memiliki pilihan lain selain mendukung pasangan calon yang didukung oleh pesantren. Ini bisa menciptakan ketegangan dan mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat.

Selain dampak psikologis dan sosial, dukungan dari pesantren juga memiliki konsekuensi politik yang signifikan. Misalnya, dapat mempengaruhi keterbukaan politik dan pluralisme di masyarakat. Dukungan yang kuat dari pesantren terhadap satu pasangan calon mungkin menyebabkan terpinggirkannya suara atau opini kelompok masyarakat lain yang mungkin tidak sejalan dengan pandangan yang didukung oleh pesantren. Ini bisa menjadi tantangan bagi keberagaman pandangan politik dan kebebasan berpendapat di masyarakat.

Dampak dari dukungan pesantren terhadap pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN juga dapat terlihat dalam peningkatan atau penurunan partisipasi pemilih. Beberapa pemilih mungkin merasa terdorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pemilihan karena merasa terkait secara spiritual dengan pesantren yang memberikan dukungan. Namun, ada juga kemungkinan bahwa beberapa pemilih merasa terhalang atau tidak termotivasi untuk ikut serta dalam pemilihan jika merasa opini mereka tidak diwakili oleh dukungan pesantren.

Lebih jauh lagi, dukungan pesantren juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan moralitas pasangan calon. Pasangan calon yang didukung oleh pesantren mungkin dianggap lebih "saleh" atau "bersih" oleh sebagian masyarakat, terlepas dari rekam jejak dan kualitas kepemimpinan mereka yang sebenarnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana agama harus menjadi faktor penentu dalam memilih pemimpin, serta apakah dukungan dari pesantren seharusnya menjadi indikator utama kualifikasi seorang calon.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga dapat memicu persaingan antara pesantren-pesantren dalam memperebutkan pengaruh politik. Terkadang, dukungan politik dari pesantren dapat dipandang sebagai alat untuk memperkuat posisi dan kepentingan pesantren tertentu dalam lingkungan politik lokal atau nasional. Hal ini dapat

menciptakan persaingan yang intens antara pesantren-pesantren yang bersaing untuk mendapatkan dukungan politik, serta dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik atau rivalitas antara pesantren-pesantren tersebut.

Namun, dampak dari dukungan pesantren tidak selalu merugikan bagi masyarakat. Dukungan dari pesantren juga bisa menjadi indikator kualitas dan integritas seorang calon, terutama jika pesantren yang memberikan dukungan telah terbukti memiliki reputasi yang baik dalam memilih pemimpin yang kompeten dan bermoral. Ini bisa membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih informasi dan bertanggung jawab dalam pemilihan.

Selain itu, dukungan pesantren juga bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada para pemimpin. Dengan mengetahui bahwa pesantren mendukung pasangan calon tertentu, masyarakat dapat menggunakan dukungan ini sebagai sarana untuk menekan atau mendorong calon tersebut agar memperhatikan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dukungan pesantren tidak hanya mempengaruhi para pemimpin, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Dukungan pesantren juga dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Pasangan calon yang mendapat dukungan dari pesantren mungkin merasa lebih bertanggung jawab dan terikat secara moral kepada masyarakat, karena merasa mendapat legitimasi moral dari pesantren. Ini bisa membantu memperkuat ikatan antara pemimpin dan masyarakat, serta meningkatkan rasa kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pembangunan daerah mereka.

Namun, ada juga risiko bahwa dukungan pesantren dapat membatasi ruang bagi masyarakat untuk mengkritik atau menantang kebijakan yang diambil oleh pasangan calon yang didukung oleh pesantren. Masyarakat mungkin merasa tidak nyaman untuk menyuarakan pendapat mereka jika hal tersebut bertentangan dengan pandangan atau kepentingan pesantren. Ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik dan mengurangi pluralisme politik di masyarakat.

Selain itu, terdapat risiko bahwa dukungan dari pesantren dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk kepentingan politik mereka sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pasangan calon yang mendapat dukungan dari pesantren mungkin cenderung lebih memperhatikan kepentingan pesantren daripada kepentingan masyarakat secara umum, sehingga keputusan dan

kebijakan yang diambil dapat menjadi tidak representatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, dukungan dari pesantren juga bisa menjadi sumber konflik dan perselisihan dalam masyarakat. Terkadang, dukungan dari pesantren dapat memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing dan bertentangan, terutama jika terdapat perbedaan pandangan politik di antara pesantren-pesantren yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan risiko terjadinya konflik politik atau sosial dalam masyarakat.

Dukungan dari pesantren juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan netralitas lembaga keagamaan dalam politik. Meskipun pesantren memiliki hak untuk memberikan dukungan politik sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka, namun terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan pesantren dalam politik dapat mengurangi independensi dan netralitas mereka sebagai lembaga keagamaan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan antara agama dan politik dalam masyarakat, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga dapat menimbulkan isu-isu terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Terkadang, dukungan dari pesantren dapat dianggap sebagai bentuk pengaruh politik yang tidak transparan dan tidak terbuka, terutama jika terdapat pertanyaan tentang motif dan kepentingan yang mendasari dukungan tersebut. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan legitimasi proses politik, serta merusak stabilitas dan kredibilitas institusi politik dalam jangka panjang.

Dukungan dari pesantren juga dapat mempengaruhi dinamika kompetisi politik dalam pemilihan. Pesantren sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan hasil pemilihan, sehingga dukungan dari pesantren dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi calon kandidat yang mendapat dukungan tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik antara calon kandidat yang didukung oleh pesantren dan calon kandidat lainnya, serta mempengaruhi keadilan dan keseimbangan dalam persaingan politik.

B. Dukungan Publik Publik

Selain dukungan balon memberikan dampak psikologis bagi balon, dalam temuan di penelitian di lapangan balon juga mendapatkan dukungan dari forum dan organisasi keagamaan di kabupaten Kendal. Forum dan organisasi keagamaan memiliki jaringan

yang luas serta pengaruh yang signifikan dalam komunitas mereka. Dukungan dari forum dan organisasi keagamaan dapat membantu paslon untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilih yang sudah familiar dengan Pak Mustamskin selaku kyai termasyhur di kabupaten Kendal.

Dukungan publik terhadap paslon dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal memiliki dampak yang luas dan signifikan dalam dinamika politik lokal. Dukungan dari masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan hasil akhir dari pemilihan, serta memengaruhi arah dan orientasi politik di daerah tersebut.

Pertama-tama, dukungan publik kepada paslon dapat meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kandidat tersebut. Paslon yang mendapatkan dukungan publik yang luas cenderung lebih dipercaya dan dianggap lebih kompeten dalam memimpin daerah, sehingga mendapatkan keuntungan dalam meraih suara pada hari pemilihan.

Foto popularitas balon



Sumber : <https://newnews.gatra.com/>

Dampak public juga dapat mempengaruhi pandangan tentang nilai dan prinsip balon, dikarenakan balon yang di dukung oleh forum dan organisasi keagamaan akan di pandang sebagai personal yang menjunjung tinggi etika dan niali-niali moral. Hal tersebut dapat menjadi magnet bagi balon untuk mendulang suara di kalangan orang orang yang menjunjung tinggi nilai-niali agama bagi pengambilan kebijakan pemerinah mereka.

Dukungan yang berasal dari organisasi keagamaan juga bisa disebut berlian saat masa-masa kampanye, dikarenakan dari salah satu anggota atau relawan mau menyediakan sarana prasarana pendukung kampanye seperti ruang pertemuan bahkan sampai pendanaan kampanye. Namun hal ini juga dapat menjadi boomerang bagi calon karena setelah dibantu mungkin akan meminta kepentingan dan juga pandangan kedepan tentang organisasi dalam mempengaruhi kebijakan mereka.

Selain itu, dukungan publik juga dapat memperkuat legitimasi politik bagi calon. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat membuat calon memiliki otoritas politik yang lebih besar, serta memberikan legitimasi bagi program-program dan kebijakan yang mereka usung.

Dukungan publik kepada calon juga dapat memicu efek domino di kalangan masyarakat. Ketika satu kelompok atau individu memberikan dukungan kepada calon tertentu, hal ini dapat memengaruhi orang lain untuk mengikuti jejak dan mendukung calon yang sama. Dukungan publik yang berkembang secara organik dapat menjadi momentum yang kuat bagi calon untuk meraih kemenangan.

Namun, di sisi lain, dukungan publik juga dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat. Terkadang, dukungan yang terlalu keras terhadap satu calon dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di daerah tersebut.

Dukungan publik juga dapat memengaruhi hubungan antara calon dan pemerintah daerah. Calon yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat kemungkinan besar akan memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya dan dukungan dari pemerintah daerah. Hal ini dapat memengaruhi distribusi sumber daya publik dan program-program pembangunan di daerah tersebut.

Selain itu, dukungan publik juga dapat memengaruhi pandangan dan sikap politik di masyarakat. Calon yang mendapatkan dukungan luas cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah dan orientasi politik di daerah tersebut. Hal ini dapat membentuk pola dukungan politik yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

Dukungan publik juga dapat mempengaruhi hasil akhir dari pemilihan. Calon yang berhasil meraih dukungan luas dari masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilihan. Dukungan publik yang kuat dapat menjadi faktor penentu

dalam menentukan kemenangan atau kekalahan paslon dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal.

Namun, penting untuk diingat bahwa dukungan publik tidak selalu menjadi jaminan kemenangan bagi paslon. Faktor-faktor lain seperti kualitas kampanye, program-program yang ditawarkan, dan integritas calon juga dapat memengaruhi hasil pemilihan.

Secara keseluruhan, dampak dukungan publik terhadap paslon dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal sangatlah besar. Dukungan dari masyarakat dapat memengaruhi berbagai aspek politik dan sosial di daerah tersebut, serta menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan arah dan hasil dari pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memperhatikan dampak dari dukungan publik dalam dinamika politik lokal.

Dalam menganalisis dampak dukungan paslon dari kunjungan ke pesantren, fokus pada pasangan Tino-Mustamsikin selaras dengan istilah kunci dalam teroi politik identitas Fukuyama kohesi social yakni politik identitas dapat menjadi perekat dan mempersatukan anggota kelompok dalam masyarakat. Pasangan ini melakukan kunjungan ke sejumlah kyai NU di Kendal, yang kemudian mendapatkan restu dari ketua PCNU Kendal, KH. Danial Royyan. Restu tersebut disampaikan langsung di kediaman KH. Danial Royyan di desa Taman Gede Kecamatan Gemuh Kendal pada tanggal 15 Agustus 2020. Dalam kunjungan tersebut, KH. Danial Royyan menyatakan bahwa KH. Mustamsikin dianggap sebagai adiknya sendiri, sedangkan Tino dianggap sebagai anak sendiri karena perannya sebagai pengurus Ansor Jawa Tengah.

Penting untuk dicatat bahwa Tino Indra, salah satu pasangan dalam Tino-Mustamsikin, adalah seorang kader PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan Mustamsikin dari partai PPP. Alasan klasik di balik koalisi ini adalah adanya kesamaan pemikiran antara keduanya. Ini menunjukkan bahwa koalisi politik antara Tino-Mustamsikin didasarkan pada kesepahaman ideologis dan visi politik yang sama.

Salah satu strategi kampanye yang dilakukan oleh pasangan Tino-Mustamsikin adalah memobilisasi para tokoh agama dan pengasuh pondok pesantren dalam satu forum terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan ini memahami pentingnya dukungan dari kalangan agama, khususnya dari pesantren, dalam memenangkan pemilihan.

Dampak dari kunjungan paslon Tino-Mustamsikin ke pesantren dapat dirasakan baik oleh paslon maupun pesantren itu sendiri. Bagi paslon, kunjungan tersebut

memperkuat keyakinan mereka dalam perjuangan politik, serta meningkatkan optimisme akan kemenangan. Sementara bagi pesantren, kunjungan tersebut dapat memicu perubahan dalam dukungan politik dan pola dukungan di kalangan mereka.

Foto optimism balon untuk menang



Sumber : <https://beritakita.net/>

Perubahan dukungan politik dan pola dukungan di kalangan pesantren dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hasil akhir dari pemilihan. Oleh karena itu, kunjungan paslon Tino-Mustamsikin ke pesantren memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik lokal, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi politik yang efektif dalam meraih dukungan politik di Kabupaten Kendal.

Dukungan dari bakal calon kepada pesantren memiliki dampak publik yang signifikan, terutama dalam hal meningkatkan popularitas dan visibilitas calon kandidat, seperti pasangan TINO dan MUSTAMSIKIN, di mata masyarakat luas. Pertama-tama, dukungan yang diberikan kepada pesantren oleh pasangan calon tersebut dapat membawa mereka ke dalam sorotan publik yang lebih besar. Dengan pesantren sebagai

lembaga yang dihormati di masyarakat, kehadiran dan dukungan dari pesantren bisa menjadi pemberitahuan bagi masyarakat bahwa pasangan calon tersebut adalah pilihan yang layak dan diperhitungkan.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga dapat memberikan pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN keuntungan dalam hal meningkatkan visibilitas mereka di masyarakat. Pesantren sering kali memiliki jaringan dan hubungan yang luas di berbagai tingkatan, yang dapat digunakan untuk mengamplifikasi pesan politik dan program-program dari pasangan calon tersebut. Dengan demikian, dukungan pesantren dapat membantu pasangan calon mendapatkan eksposur yang lebih besar di berbagai segmen masyarakat.

Dampak publik dari dukungan pesantren juga dapat terlihat dalam peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN. Melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pesantren, seperti diskusi, pengajian, atau pertemuan publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk lebih memahami visi, misi, dan program-program yang diusung oleh pasangan calon tersebut. Hal ini dapat membantu membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasi dalam pemilihan.

Selain meningkatkan pengetahuan, dukungan dari pesantren juga dapat membantu pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN mendapatkan lebih banyak dukungan secara langsung dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki hubungan emosional atau spiritual dengan pesantren yang memberikan dukungan mungkin lebih cenderung untuk memberikan dukungan mereka kepada pasangan calon tersebut. Dengan demikian, dukungan dari pesantren dapat menjadi katalisator untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari pemilih yang potensial.

Namun, dampak publik dari dukungan pesantren juga dapat menimbulkan polemik dan kontroversi dalam masyarakat. Terkadang, dukungan dari pesantren dapat dilihat oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk intervensi atau pengaruh yang tidak diinginkan dalam proses politik. Hal ini dapat menciptakan perpecahan di antara masyarakat, dengan sebagian mendukung dan menghormati dukungan pesantren, sementara yang lain menolak dan menentangnya.

Selain itu, terdapat potensi bahwa dukungan dari pesantren dapat menyebabkan polarisasi atau fragmentasi dalam masyarakat. Masyarakat dapat terbagi menjadi kelompok-kelompok yang mendukung atau menentang pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN berdasarkan dukungan yang diberikan oleh pesantren. Hal ini dapat

menciptakan ketegangan sosial dan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.

Dukungan dari forum kyai



Sumber : <https://www.inspirasiline.com/>

Namun, dampak dari dukungan pesantren juga dapat dipandang sebagai bentuk pluralisme politik dalam masyarakat. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat tentang dukungan pesantren, namun keberadaannya mencerminkan adanya kebebasan berpendapat dan keberagaman pandangan dalam masyarakat. Dukungan dari pesantren dapat menjadi salah satu wujud dari partisipasi politik yang aktif dan beragam di kalangan masyarakat

Selain itu, dampak publik dari dukungan pesantren juga dapat membuka ruang untuk dialog dan diskusi yang lebih luas tentang peran agama dalam politik. Dukungan dari pesantren dapat menjadi topik pembicaraan yang menarik dalam masyarakat, dan dapat memicu debat yang konstruktif tentang hubungan antara agama dan politik dalam konteks demokrasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan literasi masyarakat tentang isu-isu yang relevan dalam pemilihan.

Namun, ada juga risiko bahwa dukungan dari pesantren dapat menyebabkan politisasi agama dalam masyarakat. Dukungan dari pesantren mungkin dianggap sebagai upaya untuk memanipulasi atau memanfaatkan keyakinan agama masyarakat untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara kelompok agama dan politik, serta dapat mengganggu keharmonisan dan kohesi sosial dalam masyarakat.

Selain itu, dampak publik dari dukungan pesantren juga dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Pasangan calon yang mendapat dukungan dari pesantren mungkin merasa lebih bertanggung jawab dan terikat secara moral kepada masyarakat, karena merasa mendapat legitimasi moral dari pesantren. Ini bisa membantu memperkuat ikatan antara pemimpin dan masyarakat, serta meningkatkan rasa kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pembangunan daerah mereka.

Namun, ada juga risiko bahwa dukungan pesantren dapat membatasi ruang bagi masyarakat untuk mengkritik atau menantang kebijakan yang diambil oleh pasangan calon yang didukung oleh pesantren. Masyarakat mungkin merasa tidak nyaman untuk menyuarakan pendapat mereka jika hal tersebut bertentangan dengan pandangan atau kepentingan pesantren. Ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik dan mengurangi pluralisme politik di masyarakat.

Selain itu, terdapat risiko bahwa dukungan dari pesantren dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk kepentingan politik mereka sendiri, tanpa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pasangan calon yang mendapat dukungan dari pesantren mungkin cenderung lebih memperhatikan kepentingan pesantren daripada kepentingan masyarakat secara umum, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil dapat menjadi tidak representatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga bisa menjadi sumber konflik dan perselisihan dalam masyarakat. Terkadang, dukungan dari pesantren dapat memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing dan bertentangan, terutama jika terdapat perbedaan pandangan politik di antara pesantren-pesantren yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan risiko terjadinya konflik politik atau sosial dalam masyarakat.

Dukungan dari pesantren juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan netralitas lembaga keagamaan dalam politik. Meskipun pesantren memiliki hak

untuk memberikan dukungan politik sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka, namun terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan pesantren dalam politik dapat mengurangi independensi dan netralitas mereka sebagai lembaga keagamaan. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan antara agama dan politik dalam masyarakat, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga dapat menimbulkan isu-isu terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Terkadang, dukungan dari pesantren dapat dianggap sebagai bentuk pengaruh politik yang tidak transparan dan tidak terbuka, terutama jika terdapat pertanyaan tentang motif dan kepentingan yang mendasari dukungan tersebut. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan legitimasi proses politik, serta merusak stabilitas dan kredibilitas institusi politik dalam jangka panjang.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga dapat mempengaruhi dinamika kompetisi politik dalam pemilihan. Pesantren sering kali memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan hasil pemilihan, sehingga dukungan dari pesantren dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi calon kandidat yang mendapat dukungan tersebut. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik antara calon kandidat yang didukung oleh pesantren dan calon kandidat lainnya, serta mempengaruhi keadilan dan keseimbangan dalam persaingan politik.

Dukungan yang diberikan oleh bakal calon kepada pesantren memiliki implikasi yang kompleks terhadap dinamika politik dan masyarakat. Dampak yang pertama adalah dalam konteks visibilitas dan popularitas pasangan calon, seperti TINO dan MUSTAMSIKIN. Dukungan dari pesantren bisa menjadi aspek penting dalam meningkatkan eksposur publik pasangan calon tersebut, memberikan kesan bahwa mereka mendapat dukungan dari lembaga yang dihormati secara luas di masyarakat. Ini mengisyaratkan kepada pemilih potensial bahwa pasangan calon tersebut adalah pilihan yang layak dan bisa dipercaya.

Namun, dampak dari dukungan pesantren ini tidak hanya dirasakan oleh calon kandidat, tetapi juga oleh masyarakat luas. Masyarakat menjadi lebih mengenal pasangan calon tersebut melalui jaringan pesantren, baik melalui acara-acara resmi maupun informasi yang tersebar di lingkungan sekitar. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang visi, misi, dan program-program yang diusung oleh pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN.

Selain itu, dampak publik dari dukungan pesantren juga bisa menciptakan ketegangan sosial dan politik dalam masyarakat. Terutama jika terdapat perbedaan pendapat atau preferensi politik di antara masyarakat, dukungan pesantren dapat memecah belah opini publik dan memicu konflik antar kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan pesantren dapat memberikan keuntungan bagi pasangan calon, namun juga memperumit dinamika politik dan sosial di tingkat lokal.

Dampak dari dukungan pesantren juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk manifestasi pluralisme politik di masyarakat. Meskipun ada pendapat yang beragam tentang apakah dukungan pesantren sesuai atau tidak dalam politik, namun keberadaannya mencerminkan adanya kebebasan berpendapat dan keberagaman pandangan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh nilai dan keyakinan agama, yang harus dipahami dan dikelola dengan bijaksana.

Namun, terdapat juga risiko bahwa dukungan dari pesantren dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh para pemimpin untuk kepentingan politik mereka sendiri. Pasangan calon TINO dan MUSTAMSIKIN mungkin menggunakan dukungan pesantren sebagai alat untuk memperoleh keunggulan politik, tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik, serta keberpihakan pemimpin terhadap kelompok tertentu.

Selain itu, dampak dari dukungan pesantren juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan moralitas pasangan calon. Meskipun dukungan pesantren dapat dianggap sebagai indikasi dukungan moral, namun hal ini tidak selalu berkorelasi dengan kualitas kepemimpinan atau integritas seorang calon. Masyarakat harus mampu melihat melampaui dukungan pesantren dan melakukan evaluasi yang rasional terhadap kualifikasi dan rekam jejak calon tersebut.

Dukungan dari pesantren juga dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta memberikan pemimpin legitimasi moral. Namun, risiko dari hal ini adalah bahwa pemimpin menjadi terlalu bergantung pada dukungan pesantren dan kehilangan keterhubungan dengan kebutuhan masyarakat secara luas. Pemimpin harus tetap memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang lebih besar, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu yang memberikan dukungan politik.

Dukungan dari pesantren juga bisa menjadi instrumen bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada para pemimpin. Namun, penting

untuk memastikan bahwa pesantren tidak menjadi satu-satunya saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik harus inklusif dan masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap pemimpin dan proses politik.

Selain itu, dukungan dari pesantren juga dapat memicu perdebatan dan refleksi lebih lanjut tentang peran agama dalam politik. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendiskusikan batasan antara agama dan politik, serta implikasinya dalam sistem demokrasi. Diskusi ini dapat membantu meningkatkan literasi politik dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di tingkat lokal.

Namun, ada juga risiko bahwa dukungan pesantren dapat menyebabkan politisasi agama dalam masyarakat, dengan adanya tekanan atau intimidasi terhadap masyarakat untuk mendukung calon yang didukung oleh pesantren. Hal ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat dalam masyarakat, serta mengancam kerukunan dan harmoni sosial.

Selain itu, perlu dicatat bahwa dukungan pesantren tidak selalu mencerminkan pandangan atau preferensi seluruh masyarakat. Dukungan dari pesantren mungkin hanya mencerminkan pandangan sebagian kecil dari masyarakat, sementara sebagian besar masyarakat mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk tidak menggeneralisasi dukungan pesantren sebagai representasi keseluruhan masyarakat.

Dukungan pesantren juga dapat memicu reaksi yang beragam di kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin merasa terhormat dan terwakili oleh dukungan pesantren, sementara yang lain mungkin merasa terintimidasi atau terancam oleh pengaruh pesantren dalam politik. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks dan menunjukkan pentingnya dialog dan dialog antar berbagai kelompok masyarakat.

Namun, ada juga potensi bahwa dukungan dari pesantren dapat membawa dampak positif bagi proses demokrasi lokal. Dukungan dari pesantren dapat membantu membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat, meningkatkan partisipasi pemilih, dan mendorong pertukaran ide dan pandangan politik di masyarakat. Hal ini dapat memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas representasi politik di tingkat daerah.

Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa dukungan pesantren dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Terutama jika terdapat

perbedaan pendapat politik di antara pesantren-pesantren yang berbeda, dukungan pesantren dapat memicu perselisihan dan pertentangan antar kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya dialog dan rekonsiliasi untuk mengatasi ketegangan politik dalam masyarakat.

Selain itu, perlu diingat bahwa dukungan dari pesantren juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan netralitas lembaga keagamaan dalam politik. Dukungan pesantren dapat dianggap sebagai campur tangan dalam proses politik, yang dapat mengurangi integritas dan otonomi lembaga keagamaan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pesantren tetap independen dan netral dalam keterlibatannya dalam politik.

Namun, dukungan pesantren juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk partisipasi politik yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pesantren, sebagai lembaga keagamaan dan sosial yang dihormati, memiliki hak untuk mengemukakan pandangan politik mereka dan memberikan dukungan kepada calon kandidat yang mereka anggap sesuai dengan nilai-nilai mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya menghormati pluralisme politik dan kebebasan berpendapat dalam masyarakat.

Namun, perlu diingat bahwa dukungan pesantren juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang inklusif. Dukungan pesantren tidak boleh menjadi alat untuk memanipulasi atau mengendalikan proses politik, tetapi harus menjadi ekspresi yang sah dari kehendak masyarakat dan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses politik tetap terbuka, adil, dan partisipatif bagi semua pihak yang terlibat.

Dukungan dari pesantren juga harus diinterpretasikan dalam konteks lebih luas dari dinamika politik dan sosial di masyarakat. Pesantren adalah bagian integral dari jaringan sosial dan politik di tingkat lokal, dan dukungan mereka mencerminkan dinamika yang kompleks dari hubungan kekuasaan, identitas, dan kepentingan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks lokal dan dinamika politik secara menyeluruh saat mengevaluasi dampak dari dukungan pesantren dalam pemilihan.

C. Penguatan Identitas

Biasanya, setelah paslon berkunjung ke Kyai di pondok pesantren, mereka mendapatkan pelabelan atau secara tidak langsung diakui oleh masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat tersebut. Pasangan Tino Mustamsikin, misalnya, setelah berkunjung ke berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kendal, mulai

mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari komunitas pesantren. Kunjungan ini tidak hanya memperkuat posisi politik mereka, tetapi juga memperkuat identitas mereka sebagai calon yang berkomitmen terhadap nilai-nilai agama yang dianut oleh komunitas pesantren.

Kunjungan ke pondok pesantren sering kali melibatkan dialog langsung dengan Kyai dan tokoh agama setempat, di mana paslon memiliki kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi mereka secara mendalam. Dalam proses ini, Kyai dan tokoh agama dapat mengajukan pertanyaan kritis yang menguji sejauh mana pemahaman dan komitmen paslon terhadap isu-isu keagamaan dan sosial. Hal ini memberikan kesempatan bagi paslon untuk menunjukkan integritas dan keseriusan mereka dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan mereka, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat pesantren terhadap paslon tersebut.

Selanjutnya, penguatan identitas politik dari sisi agama juga terlihat melalui dukungan simbolik yang diberikan oleh Kyai dan tokoh pesantren. Dalam temuan dilapangan, ketika Kyai secara terbuka memberikan restu atau dukungan kepada paslon, hal ini akan diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai sinyal kuat bahwa paslon tersebut layak dipercaya dan didukung. Restu dari Kyai sering kali dianggap sebagai petunjuk moral yang sangat penting, mengingat posisi Kyai sebagai pemimpin spiritual dan moral dalam komunitas pesantren. Hal tersebut selaras dengan teori politik identitas yang dikemukakan oleh Fukuyama tentang isu identitas menyoroti pentingnya faktor-faktor sosial, budaya, dan agama dalam membentuk identitas politik seseorang. Dengan mengaitkan temuan ini dan teori Fukuyama politik identitas, dapat diperoleh isu identitas merujuk pada masalah yang berkaitan dengan agama etisitas ataupun budaya, sedangkan temuan peneliti di lapangan adalah paslon membentuk identitas politik melalui isu isu identitas yang berkaitan dengan agama.

Paslon yang mendapatkan dukungan dari pesantren juga sering kali menggunakan platform ini untuk memperkenalkan program-program yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan sosial yang relevan dengan komunitas pesantren. Program-program ini mungkin mencakup inisiatif untuk memperkuat pendidikan agama, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong pembangunan berbasis komunitas. Dengan demikian, paslon tidak hanya berusaha mendapatkan dukungan suara tetapi juga berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan komunitas pesantren secara berkelanjutan.

Penguatan identitas politik dari sisi agama juga tercermin dalam cara paslon berkomunikasi dengan masyarakat. Setelah kunjungan ke pesantren, paslon cenderung lebih sering menggunakan retorika yang menekankan nilai-nilai keagamaan dalam pidato dan kampanye mereka. Mereka mungkin mengutip ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadis untuk mendukung argumen mereka dan menunjukkan keselarasan antara program mereka dengan ajaran agama. Hal ini membantu membangun citra paslon sebagai pemimpin yang tidak hanya kompeten secara politik tetapi juga saleh dan berkomitmen terhadap nilai-nilai agama.

Dalam konteks ini, Surah An-Nisa ayat 59 menjadi sangat relevan. Ayat ini menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai perintah untuk taat kepada pemimpin yang adil dan beriman. Dengan mendapatkan dukungan dari Kyai dan pesantren, paslon seperti Tino Mustamsikin dapat menguatkan posisi mereka sebagai ulil amri yang diakui dan dipercaya oleh komunitas pesantren. Dukungan ini memberikan legitimasi moral dan religius yang penting dalam kontestasi politik di Kabupaten Kendal.

Secara keseluruhan, kunjungan ke pondok pesantren dan dukungan dari Kyai berkontribusi signifikan terhadap penguatan identitas politik paslon dari sisi agama. Ini bukan hanya tentang mendapatkan suara, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan komunitas pesantren dan menunjukkan komitmen yang tulus terhadap nilai-nilai agama. Dalam konteks Kabupaten Kendal, strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan legitimasi dan dukungan politik, sekaligus memperkuat identitas paslon sebagai pemimpin yang beriman dan berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

Strategi kunjungan ke pondok pesantren oleh paslon juga memiliki dimensi simbolis yang kuat. Ketika seorang paslon mengunjungi pesantren, mereka tidak hanya hadir secara fisik tetapi juga menyampaikan pesan simbolis tentang kedekatan mereka dengan nilai-nilai keagamaan dan komunitas yang menghargai tradisi pesantren. Kunjungan ini sering kali diiringi dengan ritual-ritual keagamaan, seperti doa bersama, yang menegaskan lagi komitmen paslon terhadap agama dan moralitas.

Lebih jauh, dukungan dari pesantren dapat berfungsi sebagai modal sosial yang penting bagi paslon. Pesantren sering kali memiliki jaringan sosial yang luas dan berpengaruh di tingkat lokal. Dukungan dari pesantren berarti paslon dapat memanfaatkan jaringan ini untuk memperluas basis dukungan mereka. Ini termasuk dukungan dari para santri, alumni pesantren, dan jaringan pengikut Kyai yang tersebar

di berbagai komunitas. Dengan demikian, pesantren bukan hanya pusat keagamaan tetapi juga pusat kekuatan politik yang signifikan.

Namun, penting juga untuk mempertimbangkan potensi dinamika negatif yang bisa muncul dari hubungan erat antara politik dan agama. Sering kali, pemanfaatan pesantren untuk tujuan politik bisa menimbulkan kritik bahwa agama sedang dipolitisasi. Ini bisa mengarah pada skeptisisme atau bahkan penolakan dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa agama seharusnya dijaga dari pengaruh politik praktis. Oleh karena itu, paslon perlu berhati-hati dalam menyeimbangkan antara mengambil manfaat politik dari pesantren dan menjaga integritas keagamaan dari pesantren itu sendiri.

Selain itu, kunjungan ke pesantren memberikan kesempatan bagi paslon untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan aspirasi komunitas pesantren. Melalui dialog dan diskusi langsung dengan Kyai dan tokoh pesantren, paslon dapat mengidentifikasi isu-isu yang menjadi perhatian utama komunitas ini. Informasi ini sangat berharga dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan relevan. Paslon yang mampu menunjukkan pemahaman yang mendalam dan solusi konkret terhadap isu-isu tersebut cenderung mendapatkan dukungan yang lebih kuat.

Keterlibatan pesantren dalam politik lokal juga menciptakan peluang bagi pesantren untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembangunan daerah. Pesantren dapat menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga kesehatan. Kunjungan paslon ke pesantren dapat menjadi titik awal untuk membangun kemitraan yang konstruktif dan berkelanjutan antara pesantren dan pemerintah daerah.

Dalam konteks Kabupaten Kendal, pasangan Tino Mustamsikin memanfaatkan kunjungan ke pesantren sebagai strategi untuk memperkuat basis dukungan mereka. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai agama, mereka berhasil mendapatkan dukungan moral dan politik dari pesantren. Ini tidak hanya membantu mereka dalam pemilihan, tetapi juga memperkuat legitimasi mereka sebagai pemimpin yang peduli dan berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat berbasis agama.

Dengan demikian, kunjungan ke pesantren oleh paslon dalam pemilu di Kabupaten Kendal dapat dilihat sebagai strategi politik yang efektif dan bermakna. Ini tidak hanya tentang mendapatkan suara tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan komunitas pesantren. Penguatan identitas politik dari sisi agama yang dihasilkan dari kunjungan ini menunjukkan pentingnya pesantren sebagai aktor politik yang signifikan dan berpengaruh dalam konteks politik lokal. Strategi ini,

jika dijalankan dengan benar, dapat menghasilkan dukungan yang tulus dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi paslon sebagai pemimpin yang berkomitmen terhadap nilai-nilai agama dan moral.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang berjudul “RELASI PASLON DENGAN PONDOK PESANTREN (Study Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilukada 2020)”, dalam kesimpulannya dapat di simpulkan bahwa :

1. Kunjungan balon ke pesantren selama Pemilukada 2020 di Kabupaten Kendal menunjukkan upaya yang serius untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan signifikan dengan komunitas pesantren. Selama kunjungan, balon aktif berbicara dengan pimpinan, anggota pengurus, dan santri, menunjukkan kesungguhan mereka dalam membangun silaturahmi dan memohon doa restu untuk maju mencalonkan diri sebagai wakil bupati dikabupaten Kendal. Selain itu, kunjungan ini menunjukkan hubungan yang kuat secara pribadi antara balon dan tokoh agama, terutama melalui keterlibatan mereka dalam forum dan organisasi keagamaan di Kendal. Didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan kepentingan bersama, dukungan politik yang didasarkan pada hubungan pribadi dan kesesuaian program dianggap lebih kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kunjungan balon ke pesantren menjadi strategi politik yang efektif untuk mendapatkan legitimasi, dukungan, dan identitas politik yang peduli terhadap nilai-nilai agama dan masyarakat pesantren di Kabupaten Kendal.
2. Kunjungan balon Tino-Mustamsikin ke pesantren memiliki efek psikologis dan politik yang signifikan. Kunjungan tersebut meningkatkan keyakinan paslon dalam perjuangan politik dan meningkatkan keyakinan mereka akan kemenangan dalam pemilihan. Selain itu, pesantren juga dipengaruhi oleh kunjungan tersebut dengan mengubah strategi dukungan politik dan dukungan di antara mereka. Dukungan dari kalangan agama, seperti forum kyai kampung dan PCNU Kendal, memberi paslon legitimasi dan otoritas, dan memperkuat citra mereka sebagai pemimpin yang dihormati dan diakui masyarakat. Namun, konsekuensi dari hal ini dapat menimbulkan kontroversi dan tekanan tambahan bagi paslon, serta menimbulkan perbedaan di masyarakat. Selain itu, dukungan publik memengaruhi pandangan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh partai politik. Kunjungan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan identitas politik yang kuat di kalangan pemilih dan memperkuat hubungan sosial antara paslon dan masyarakat pesantren

3. Kunjungan calon bupati (balon) ke pesantren selama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kendal pada Pemilukada 2020 memengaruhi perolehan dukungan politik dan dinamika politik lokal. Fenomena ini menunjukkan seberapa kompleks hubungan antara pesantren dan partai politik yang berbasis pesantren. Dengan mengandalkan otoritas moral dan kekuatan sosial pesantren, kunjungan ini menunjukkan taktik politik yang efektif untuk mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat yang potensial, terutama dari kalangan agama. Ada perubahan dalam dukungan politik, gaya dukungan, agenda politik, partisipasi politik yang meningkat, dan kekuatan politik lokal yang berubah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang "*RELASI PASLON DENGAN PONDOK PESANTREN (Study Kasus Tino Mustamsikin dalam Pemilukada 2020)*", saya ingin memberikan beberapa saran untuk balon tersebut:

1. Penulis selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam bagaimana pesantren berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik di tingkat lokal. Penelitian ini bisa difokuskan pada analisis bagaimana aspirasi dan kebutuhan komunitas pesantren diterjemahkan ke dalam kebijakan oleh pemerintah daerah yang didukung oleh partai politik berbasis pesantren. Studi ini juga bisa mencakup wawancara dengan pembuat kebijakan, tokoh pesantren, dan anggota masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh pesantren dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan.
2. Disarankan untuk melakukan studi komparatif antara relasi paslon dan pesantren konvensional dalam konteks pemilukada di daerah lain selain Kabupaten Kendal. Penelitian ini dapat mengeksplorasi perbedaan dalam strategi kampanye, mobilisasi massa, dan efektivitas dalam meraih dukungan pemilih. Selain itu, penulis dapat membandingkan dampak sosial dan politik dari kedua jenis partai terhadap masyarakat lokal, termasuk bagaimana mereka mempengaruhi stabilitas sosial, polarisasi politik, dan partisipasi politik masyarakat. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai keunikan dan tantangan yang dihadapi oleh partai politik berbasis pesantren dalam sistem politik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Antonius, B., & Sosrodiharjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Arifin, A. Z. (2019). *Kyai and Political Leadership: The Role of Islamic Boarding Schools in Political Development in Indonesia*. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 349-366.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Putra.
- Azahra, L. K. (2019). Politik Familisme Di Tubuh Partai Islam Lokal. *Jurnal Review Politik*, 17.
- Azwar, S. (2001). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi.
- Dahl, R. A. (2015). *On Democracy*. Yale University Press.
- Caroline Paskaria, Neneng Yani Yuningsih, Siti Witianti. (2012). *Relasi Partai Politik Dan Konstituen di Kota Bandung Dan Kabupaten Sumedang*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Chalid, I. (1992). *Sejarah Partai-Partai Islam Indonesia*. Jakarta : Menara Mas.
- Dian Nafi, D. (2007). *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: Institute for Training and Development (ITD).
- Friedrich, C. J. (1967). *An Introduction to Political Theory; Twelve Lectures at Harvard*. New York: Harper and Row.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Hakim, I. (2022). *Local Politics and the Role of Pesantren: A Case Study in Central Java*. *Journal of Political Science and Public Affairs*, 10(1), 45-64.
- Hamdan, F. (2021). *Political Dynamics of Pesantren and the Role of Social Media in the Digital Era*. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(1), 64-79.
- H. Haryono, H. (1998). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hardani. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hardani, & dkk. (2020). *Metodologi Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hayati, F. (2011). Pesantren sebagai Alternatif Model Lembaga Pendidikan Kader Bangsa. *MIMBAR*, 157-163.

- Held, D. (2006). *Models of Democracy*. Stanford University Press.
- Hendarto. (2006). Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mencetak Kader Pemimpin. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Magelang*, 311-314.
- Huda, M. (2020). *Pondok Pesantren and Political Cadre Development: The Case of an Islamic Boarding School in East Java*. *Journal of Indonesian Islam*, 14(2), 323-346.
- Ihsanudin, M. (2015). *Pesantren Dan Dinamika Politik Lokal, Studi Kasus Pondok Pesantren Assalam, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Sungai Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 1998-2010*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismail, M. (2017). Pondok Pesantren and Political Patronage: A Case Study of Jombang, East Java. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 379-403.
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault. *Tantangan Bagi Sosiologi Politik*.
- Lawang, R. M. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, S. A. (2007). *Konseling Islami*. Yogyakarta: eISAQ Press.
- Marbun. (2007). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moehadjir, N. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serain.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: 2011.
- Muhdam Labolo, T. I. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Musliudin. (2013). MODEL PESANTREN KADER; Relasi ideologis PP Husnul Khotimah dengan PKS, serta Artikulasinya dalam Kegiatan Pesantren. *Holistik*, 30.
- Nahdli, A. F. (2017). *Keterlibatan Ulama Dalam Politik (Studi Terhadap Peran Ulama dalam Kemenangan Pradi pada Pemilu Kota Depok Tahun 2015)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Neumann, S. (1963). "Modern Political Parties". *Dalam Comparative Politics: A Reader*, eds. Harry Eckstein dan David E. Apter. London: The Free Press of Glencoe.
- Norris, P. (2017). *Strengthening Electoral Integrity in the Digital Age*. Oxford University Press.
- Rahayu, S. (2020). *Political Education in Islamic Boarding Schools: A Case Study in East Java, Indonesia*. *Journal of Political Science*
- Rahman, A. (2019). *Pondok Pesantren and Political Identity: A Case Study in Central Java*. *Journal of Indonesian Islam*, 13(1), 21-40.

- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media.
- Santoso, A. B. (2018). *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif- Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, A. (2018). *Pondok Pesantren and Local Politics: A Case Study in East Java*. *Journal of Indonesian Islam*, 12(1), 135-152.
- Wijaya, I. M. (2021). *Dinamika Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus di Kabupaten X*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Local*, 3(2), 123-145.
- Weiner, J. L. (1966). *Political Parties and Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Zaini, A. W. (1996). *Moralitas Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.

LAMPIRAN



Foto wawancara dengan perwakilan dari pak Mustamsikin oleh Gus Alfie S.Pd. M.Pd.



Foto wawancara dengan TU partai PPP Bapak Agus Siswanto Am.d



Foto wawancara dengan Ketua Tani PWMC NU dan timses Pak Mus, Bapak Muhammad Ridwan



Foto wawancara dengan pengasuh Pondok As Shiddiqie Bapak KH. Irfan Shoddiq Al-Hafidz



Foto wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren As Shiddiqie Mas Mughis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Luthfi Ichsanuddin
NIM : 1706016022
Jurusan : Ilmu Politik
TTL : Kendal, 4 Juli 1999
Alamat : Gempol Bapang Gang Presiden RT 001/ RW 001
Brangsong, Kabupaten Kendal
No. Telepon : 089613916383
E-Mail : luthfiichsanuddin@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Tunas Harapan
SD Negeri 2 Kebonadem
SMP Negeri 1 Brangsong
SMK Negeri 4 Kendal
UIN Walisongo Semarang
Madrasah TPQ- MDW Al- Hidayah Kebonadem
Pondok Pesantren Al- Hadid Semarang

Semarang 18 April 2024

Penulis



Luthfi Ichsanuddin

NIM 1706016022